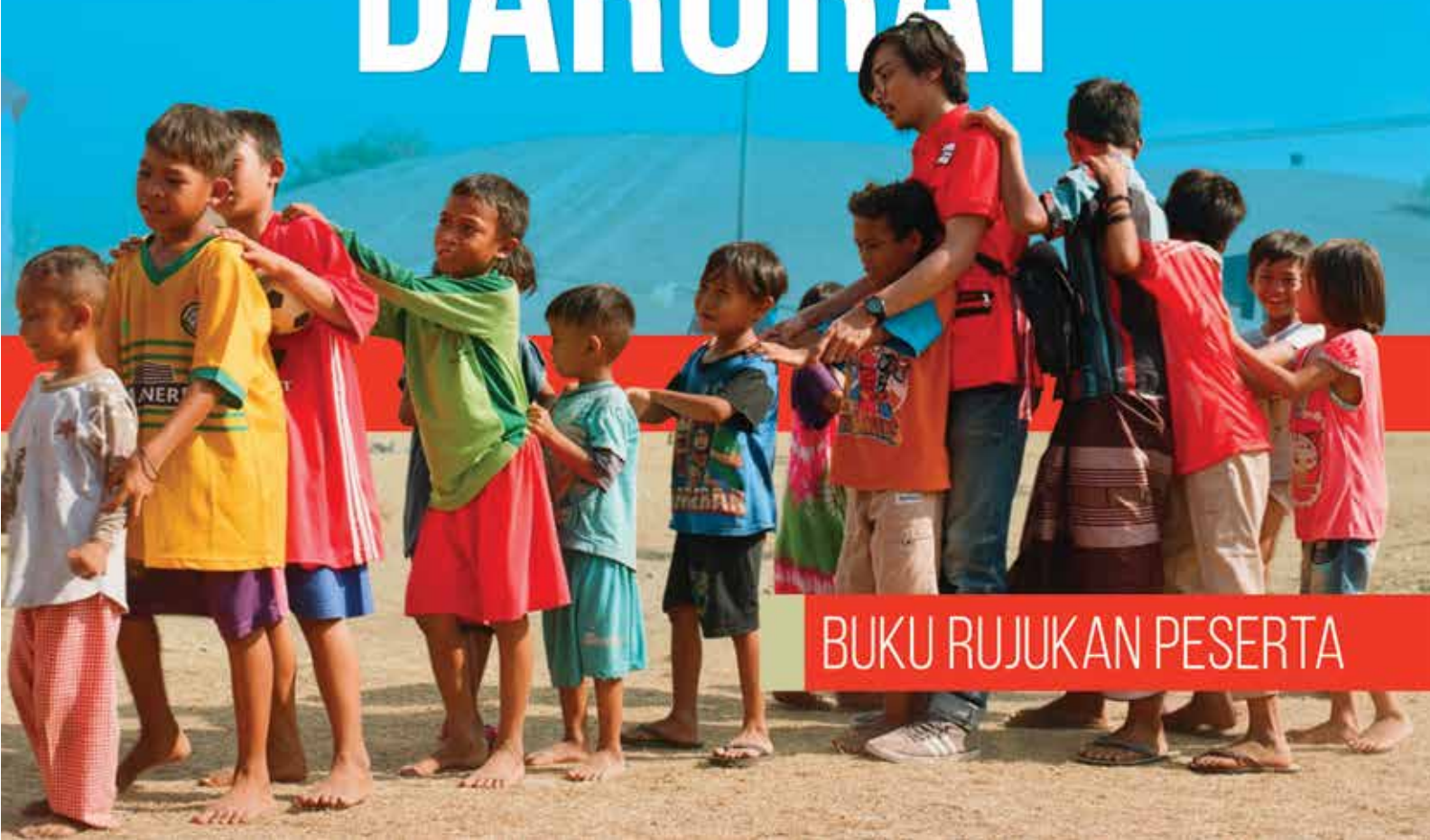


BAHAN BACAAN PELATIHAN

PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT



BUKU RUJUKAN PESERTA

BAHAN BACAAN PELATIHAN

PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

BUKU RUJUKAN PESERTA

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	7
TIM PENYUSUN	8
1 Memahami Kebencanaan Di Indonesia: Terminologi, Konsep Manajemen Penanggulangan Bencana.....	9
2 Aktor,Kerangka Hukum, Prinsip Dan Standar Kemanusiaan.....	15
3 Memahami Isu Lapis Sanding (Cross Cutting Issue)	23
4 Konsep Dasar Perlindungan Anak.....	27
5 Child Safeguarding Policy (Csg)	35
6 Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat Bencana.....	47
7 Konsep Dasar Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial	55
8 Dukungan Psikologis Awal	63
9 Pengembangan Program Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Berbasis Masyarakat	68
10 Manajemen Kasus.....	90
11 Kekerasan Terhadap Anak Dan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Situasi Bencana	97
12 Keterpisahan Anak	102
13 Asesmen, Monitoring, Dan Evaluasi Program Perlindungan Anak	110
14 Koordinasi Dan Kebijakan Perlindungan Anak.....	114



PENGANTAR

Salam Kemanusiaan.

Selamat berpartisipasi dalam pelatihan RedR-Indonesia “Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat” yang didukung oleh dan bekerja sama dengan UNICEF, Indonesia.

Gabungan sesi-sesi teori dan praktik yang dilakukan dalam pelatihan ini diharapkan akan membantu Anda memahami konsep perlindungan anak, khususnya dalam situasi darurat bencana. Informasi yang diberikan dalam buku rujukan pelatihan ini berisi latar belakang tentang banyak konsep yang kita bahas, rangkuman sesi-sesi yang disajikan, dan informasi tentang bahan bacaan lebih lanjut. Seluruh isinya diambil dari wacana, praktik, dan isu-isu, serta pendorong di tingkat global namun disesuaikan dengan konteks, perspektif dan kondisi di Indonesia.

Dalam buku ini juga berisi halaman tempat Anda bisa membuat catatan dari bahan yang Anda baca maupun dari sesi-sesi pelatihan yang Anda ikuti. Dengan demikian buku kerja ini merupakan satu rujukan dan perangkat rujukan untuk Anda. Kami harap Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bersedia berbagi dengan peserta lain dari pelatihan ini serta sekaligus menikmati seluruh rangkaian pelatihan ini.

Direktur RedR Indonesia



Tri Budiardjo



TIM PENYUSUN

Maulinna Utaminingsih
Mulyana Brata Manggala
Wiwit Prasetyono, M.Glob

MEMAHAMI KEBENCANAAN DI INDONESIA: TERMINOLOGI, KONSEP MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

1

Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki aspek risiko bencana, bahkan banyak di antara wilayah-wilayah tersebut yang memiliki lebih dari satu jenis risiko bencana. Beberapa kejadian bencana besar yang tercatat dalam sejarah telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, antara lain adalah erupsi gunung Tambora, Gunung Krakatau, kejadian tsunami di Aceh, serta gempa yang disusul oleh likuifaksi di Palu dan Donggala.

Selain kejadian bencana besar tersebut, wilayah-wilayah di Indonesia juga tidak terlepas dari kejadian bencana yang sifatnya rutin dan periodik, seperti banjir. Tanah longsor dan angin kencang, walaupun tidak termasuk dalam bencana yang sifatnya rutin, namun intensitas kejadian makin lama makin meningkat. Mengacu pada pembahasan di Bab 1, banyak kejadian dan jenis bencana yang semakin sering terjadi terkait dengan krisis perubahan iklim. Dengan semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, maka kelompok yang terdampak bencana juga semakin banyak, dan tersebar di wilayah yang semakin luas. Dibutuhkan upaya khusus untuk dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai risiko bencana tersebut, membangun ketangguhan dan mempertahankan kehidupan mereka.

Kejadian bencana tidak hanya disebabkan oleh kondisi alam, walaupun dapat dikatakan bahwa komposisi terbesar dari kejadian bencana terkait dengan alam. Jenis kejadian bencana yang terkait dengan alam (*natural induced disaster*) diantaranya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Selain itu, dikenal pula istilah bencana yang muncul akibat ulah manusia (*man-made disaster*), seperti bencana yang terkait dengan teknologi, bencana transportasi atau kecelakaan, kebakaran hutan, atau bencana kesehatan seperti pandemic Covid-19. Untuk pandemi Covid-19, perilaku manusia menjadi katalisator yang mempercepat penyebaran virus – yang akhirnya menimbulkan dampak bukan hanya sosial-ekonomi, namun juga korban jiwa dan dampak kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi kondisi kerawanan bencana yang sangat tinggi tersebut, masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana, dan yang termasuk dalam kelompok miskin dan rentan perlu membangun ketangguhan dan daya adaptasi. Ketangguhan masyarakat (*community resilience*) dan adaptasi adalah dua hal yang saling berkaitan erat, dimana masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu beradaptasi dengan baik, dan pulih dari dampak bencana.



Dalam upaya membangun ketangguhan dan kapasitas adaptasi, beberapa konsep terkait perlu dipahami terlebih dahulu. Konsep-konsep tersebut adalah konsep kerentanan, konsep pengurangan risiko bencana, termasuk pemahaman tentang konsep ketangguhan dan kapasitas adaptasi.

Kerentanan mengacu pada kondisi atau situasi yang dialami oleh orang/individu atau sekelompok orang yang jika terkena guncangan (shocks) yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, atau dampak dari perubahan iklim – akan berdampak negatif pada kehidupan mereka. Masyarakat yang rentan terhadap guncangan, adalah masyarakat yang memiliki kapasitas coping dan adaptasi yang terbatas, yang membuat mereka sulit untuk bertahan dan pulih dari dampak bencana.

Berbanding terbalik dengan konsep kerentanan, adalah konsep ketangguhan (*resilience*). Dalam banyak diskusi, ketangguhan dimaknai sebagai sebuah proses, bukan sebuah situasi atau *state of being* – yang mana di dalam proses tersebut ada upaya individu dan masyarakat untuk menyiapkan diri, bertahan, beradaptasi serta pulih dari dampak bencana dengan menggunakan jaringan kapasitas yang mereka miliki (Norris, 2008). Dalam jaringan kapasitas, terdapat kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan/ekonomi, kapasitas sosial, dan ketersediaan infrastruktur.

Dalam membangun ketangguhan masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan (terhadap dampak bencana), dibutuhkan pemahaman mengenai risiko bencana dan aspek pengurangan risiko. Pemahaman terhadap risiko bencana dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat untuk persiapan serta antisipasi. Memahami risiko bencana dapat

dimulai dari pengenalan jenis-jenis bahaya yang ditimbulkan, tanda-tanda kemunculan bencana, karakter dari bencana, daerah yang rawan bencana serta kelompok-kelompok yang rentan terdampak parah dari bencana tersebut. Pengetahuan seperti itu akan membantu pengambilan tindakan yang tepat dalam rangka pengurangan risiko bencana. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan agenda penting bagi banyak pihak, sehingga kolaborasi multi-aktor sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

Dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat, pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Penyediaan program perlindungan sosial yang adaptif dapat mendukung kapasitas adaptasi masyarakat tersebut dalam berbagai aspek; menjaga dan melindungi sumber daya manusia – dari aspek pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kapasitas keuangan masyarakat yaitu dengan melindungi sumber kehidupan berkelanjutan.

PENANGGULANGAN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT)

Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana sebagai sesuatu yang datang diluar kemampuan manusia atau dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi begitu saja secara tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga masyarakat memandang bahwa bencana itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan dipandang sebagai “tulah” di kalangan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini masyarakat dipandang sebagai “korban” sehingga membutuhkan pertolongan dan bantuan dari pihak luar sehingga saat itu

penanggulangan bencana lebih dipandang pada situasi darurat dan membutuhkan bantuan.

Tabel 1
Paradigma Penanggulangan Bencana
Dulu dan Sekarang

Paradigma Terdahulu	Paradigma Baru
Fatalistik	Rasional
Reaktif, bertindak setelah kejadian bencana	Proaktif, melakukan tindakan-tindakan sebelum bencana (pencegahan, pengurangan resiko, kesiapsiagaan)
Terpusat (Diatur dari Pusat)	Terdesentralisasi (Pemerintah Daerah Dapat memegang komando)
Berdiri sendiri	Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat penanggulangan bencana tidak hanya pada situasi darurat (*emergency*) namun berkembang pada bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan. Upaya-upaya untuk pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam program-program pembangunan ini telah dilakukan. Pandangan ini juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memandang bencana merupakan bagian dari proses geologi, hidrometeorologi dan hubungan sebab dan akibat. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan

kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dll) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dll (Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999 dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana; Dr.Rahmawati Husein).

Upaya-upaya ini sering dikenal dengan penanggulangan bencana atau dalam UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan dalam PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Tujuan Penanggulangan Bencana

Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan:

Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



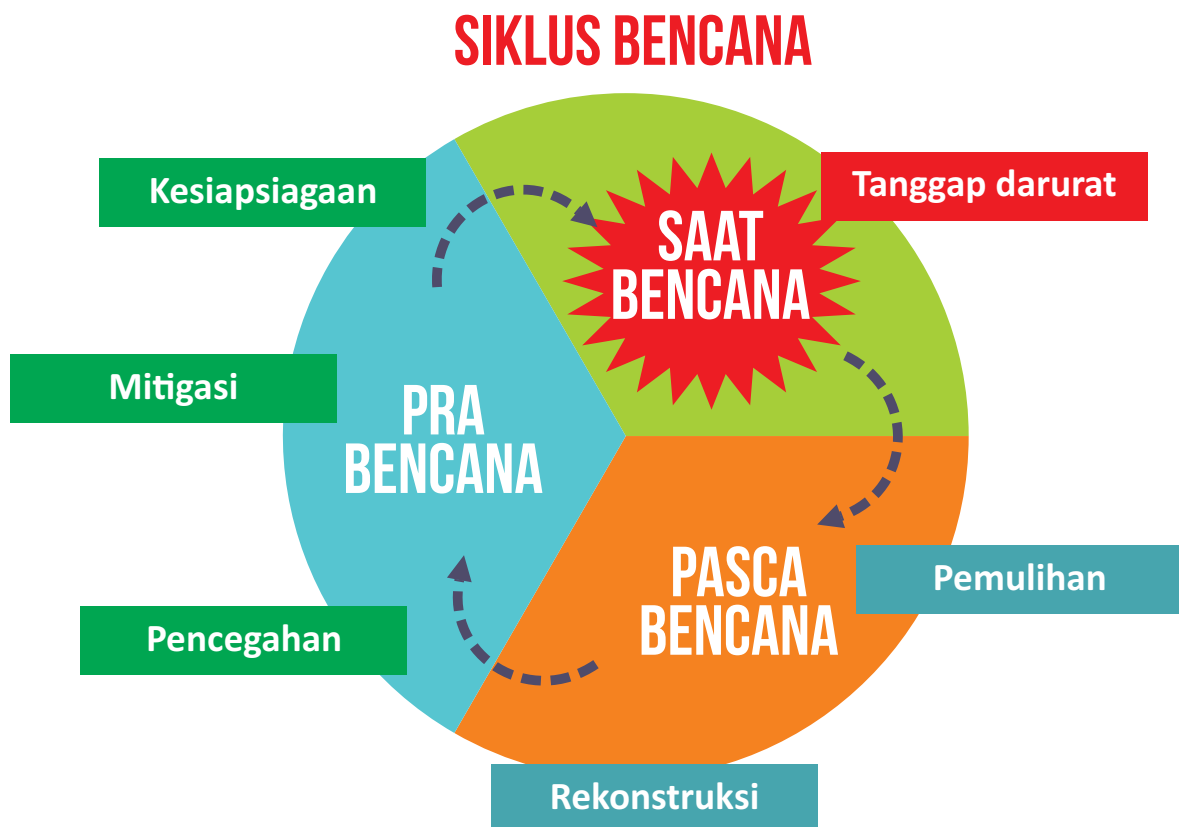
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.”

“Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.”

“Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.”

Tindakan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah siklus, bukan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Terdapat tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi dan setelah terjadinya bencana, sebagaimana ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2
Siklus Penanggulangan Bencana (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)

Penanggulangan bencana yang dalam definisi UNISDR sebagaimana tersebut di atas adalah pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga, merespons dan pulih dari bencana bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan dan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dalam satu bencana di berbagai tingkat. Secara umum penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi konteks sebelum bencana dan setelah (pasca) bencana. Ada tiga tahap utama aktivitas yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.

1. Sebelum bencana (prabencana):

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan hilangnya/kerugian harta benda karena peristiwa bahaya dan untuk memastikan bahwa kerugian-kerugian tersebut juga diminimalkan ketika bencana terjadi. Aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana dilakukan dalam tahap ini adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam rencana pembangunan, analisis risiko bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

2. Selama bencana (kejadian bencana):

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dan penyediaan-penyediaan layanan untuk para terdampak bencana terpenuhi dan dan penderitaan diminimalkan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai aktivitas-aktivitas tanggap darurat.

3. Setelah bencana (pascabencana):

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai pemulihan dini dan membuat mereka yang terdampak bencana tidak terpapar pada kondisi-kondisi kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai aktivitas-aktivitas respons dan pemulihan.

Jadi tugas manajemen bencana tidak saja sewaktu bencana terjadi dan setelahnya, melainkan sebelumnya dalam rangka mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu seperti gempa bumi atau yang dapat diprediksi akan terjadi seperti banjir, karena adanya prakiraan cuaca. Tugas dan aktivitas-aktivitas tersebut seperti suatu siklus. Malah seharusnya menjadi suatu spiral yang terus berkembang ke atas menuju ke keadaan yang terus semakin baik.



CATATAN

AKTOR, KERANGKA HUKUM, PRINSIP DAN STANDAR KEMANUSIAAN

2

Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga yang menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat lokal dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (*humanity*), imparisialitas/ketidakberpihakan (*impartiality*), kemandirian/ketidaktergantungan (*independence*), dan netralitas (*neutrality*). Secara ringkas aktor kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:



Dengan banyaknya kelompok aktor kerja kemanusiaan, maka peran masing-masing dan bagaimana para aktor tersebut melakukan tugas dan berkontribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana dan Penanggulangan Bencana secara umum perlu dikoordinasikan. Di Indonesia PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana menegaskan bahwa bencana merupakan urusan semua orang baik pemerintah masyarakat,



dan dunia usaha. Naskah Akademis Kerangka Nasional Penanggulangan Darurat Bencana (BNPB, tahun 2018) peran dan tanggung jawab para aktor aksi kemanusiaan juga menegaskan peran dari masing-masing aktor tersebut.

Dalam perkembangannya aktor kemanusiaan tersebut tidak hanya mencakup pemerintah, masyarakat, dan akademis namun juga menggandeng media dan dunia usaha juga terlibat dalam penanggulangan bencana yang dikenal sebagai pentahelix.



Peran dari masing-masing unsur yang ada di pentaheliks ini nantinya akan saling berkaitan untuk keberlangsungan penanggulangan bencana yang lebih baik. Peran pemerintah dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan dan aturan yang mampu diimplementasikan sampai ke masyarakat/komunitas. Akademisi akan lebih berperan dalam menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman serta dapat menyumbangkan dalam penguatan kapasitas masyarakat baik pembangunan ketangguhan dan pengurangan risiko bencana. Dunia usaha akan berperan dalam pengetahuan, tukar pengetahuan, pengembangan ekonomi,

dan inovatif pembiayaan yang ada untuk penanggulangan bencana. Hal ini akan sangat baik ketika diimbangi dengan peran media dimana media menjadi mata, telinga, bahkan mulut untuk menyampaikan informasi yang terpercaya baik dalam pra, saat dan pasca bencana. Masyarakat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan dari semua strategi yang dirancang oleh pemerintah akan sangat efektif jika semua berperan hingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dalam peraturan tersebut.

PEMERINTAH

Menurut UU No. 24/2007, tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan bencana meliputi: perlindungan orang-orang dari dampak bencana; pemenuhan hak masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak terhadap distribusi layanan minimum yang adil, pemulihan dari dampak bencana; dan, Alokasi anggaran yang cukup dan dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu oleh Kementrian/Lembaga/Badan yang bergerak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan bencana antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu pemerintah pusat-provinsi dibantu oleh Kementrian/Lembaga/Badan yang juga saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang semakin baik.

Menurut UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Kepala BNPB mempunyai

kedudukan setingkat menteri (Pasal 10). BNPB diberi tugas untuk memberikan panduan dan arahan pengelolaan bencana yang mencakup kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini termasuk menetapkan standarisasi dan persyaratan pengelolaan bencana melalui undang-undang, mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (pra-bencana, tanggap bencana, pascabencana) secara terencana, terpadu, dan komprehensif (Peraturan Presiden No. 8/2008 Pasal 2-3). BNPB dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari dua unsur: Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Ketika bencana berdampak pada lebih dari satu kabupaten/kota di suatu provinsi, pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana di kabupaten/kota yang terdampak. Menurut Undang-undang No. 24/2007, kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan bencana mencakup penyelarasan kebijakan pengelolaan bencana regional dengan kebijakan pembangunan daerah; menerapkan kebijakan bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain; mengatur teknologi yang berpotensi bencana di dalam wilayahnya; dan pemantauan dan distribusi uang dan barang pada skala provinsi dan/atau kabupaten/kota.

MASYARAKAT

UU No. 24/2007 mendorong partisipasi masyarakat di semua tahapan manajemen bencana. Dalam UU No. 24/2007, masyarakat sipil, baik yang diorganisir secara formal maupun informal, diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemeliharaan program

penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran bantuan masyarakat dalam mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

Masyarakat dalam pentahelix ini juga bisa diartikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM nasional dan lokal adalah mitra kunci dalam kegiatan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat. Mereka diakui memainkan peran penting di tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam memberikan layanan penting, termasuk yang terkait dengan kemampuan inti tanggap darurat. LSM termasuk organisasi sukarela, suku dan etnis, berbasis agama, berbasis veteran, dan organisasi nirlaba yang menyediakan tempat penampungan, persediaan makanan darurat, dan layanan pendukung penting lainnya. LSM bersifat independen dan berkomitmen terhadap kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan dan nilai ini mendorong prioritas operasional kelompok dan membentuk sumber daya yang mereka berikan.

LEMBAGA/BADAN USAHA

Lembaga usaha perlu menyampaikan rincian keterampilan, jumlah orang, dan sumber daya yang tersedia kepada BNPB/BNPD saat menawarkan bantuan dalam rangka tanggap bencana. Berdasar kebutuhan dan kualifikasi, BNPB/BPBD dapat menyetujui atau meminta bantuan. Lembaga usaha harus akuntabel, mematuhi kaidah manajemen bencana dasar, mengamati norma kemanusiaan dan hormat kepada masyarakat setempat. Selain itu, mereka harus melakukan kegiatan tanpa maksud politik atau pertahanan/keamanan dan tidak memanfaatkan korban bencana. Lembaga usaha diharapkan berkontribusi untuk kegiatan pemulihan seperti juga kegiatan tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB dan BPBD.



AKADEMISI

Sebagai komunitas ilmiah dimana para pakar kebencanaan, sosiolog, ekonomi, geologi, dokter, pakar rekonstruksi dan lain sebagainya. Pada akhirnya seluruh pakar ini nantinya akan memberikan gambaran berdasarkan penelitian untuk mempertimbangkan kebijakan, sampai ke implementasi kebijakan tersebut. Selain itu pendidikan kebencanaan juga perlu dipertimbangkan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran terhadap bencana. Peran Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana pada dasarnya dapat diintegrasikan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik melalui Program Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan dari akademisi ini antara lain: Kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah; pengabdian masyarakat; dan lain-lain.

MEDIA

Media massa memiliki peran besar dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Pada akhirnya mereka dapat selamat atau mengurangi risiko bencana. Media mampu memberikan Pendidikan, penyebaran informasi baik dalam pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Media juga berperan dalam penyebaran karya ilmiah, penyebaran informasi kebijakan pemerintah yang dapat dipercaya oleh masyarakat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan koordinasi dan efektifitas pemerintah yang ada.

MITRA INTERNATIONAL

Jika dampak suatu kejadian bencana melewati kemampuan negara untuk melakukan penanganan darurat bencana seefektif dan secepat mungkin, suatu

pernyataan dari pemerintah Indonesia yang mengumumkan kesediaan menerima bantuan internasional tersebut. Pernyataan ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu dengan berkonsultasi dengan BNPB. Jika Pemerintah RI menerima bantuan asing, ada dua tipe bantuan yang ditawarkan – *on-shore* dan *off-shore*.

- Sumberdaya “*on-shore*” adalah sumberdaya yang sudah ada di Indonesia dan berada dalam program dari masing-masing mitra internasional terkait.
- Sumberdaya “*off-shore*” adalah sumber daya tambahan yang sebelumnya tidak dilakukan dan dimobilisasi di luar Indonesia. Sumberdaya “*off-shore*” secara khusus diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana dengan level tertentu.

Untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif, bantuan sumberdaya harus diselaraskan dengan tanggung jawab kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan BNPB. Pihak yang menawarkan bantuan harus mengikuti pedoman dari BNPB. Pengaturan koordinasi di antara mitra regional dengan internasional diatur oleh “*ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on Disaster Management (2016-2020)*”. “Plan” ini mengarahkan “*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)*” dan “*UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*” untuk memastikan adanya “*interoperability*” terpadu dalam berhubungan dengan otoritas nasional sewaktu dan jika aset internasional dan regional dibutuhkan.

Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga menghormati

dan mengacu pada instrumen hukum dan kesepakatan global tentang kemanusiaan. Kerangka Hukum Kemanusiaan International yang biasa dirujuk dalam manajemen Penanggulangan Bencana (PB) pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
- Protokol Opsional Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
- Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Konvensi Menentang Penyiksaan
- Konvensi Menentang Genosida
- Konvensi-Konvensi Jenewa
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak
- Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- Piagam PBB

Kerangka hukum tersebut di atas, menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana, yang menjadi prinsip dan standar yang semakin diterima oleh para pelaku Penanggulangan Darurat Bencana. Prinsip dan standar tersebut di antaranya adalah:

1. 1. Resolusi Sidang Umum PBB no 46/182 tahun 1991 tentang Prinsip Bantuan Kemanusiaan, yaitu **Nilai Kemanusiaan, Netralitas, dan Imparsialitas** serta **Independensi**. Standar lain yang bisa menjadi rujukan adalah Standar Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian Standards)
2. 2. Sepuluh Kode Perilaku (*Code of Conduct*) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dikembangkan tahun 1992 dan diadopsi (diterima) oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1994. Sepuluh Kode Perilaku ini sifatnya sukarela, ditegakkan atas dasar kemauan organisasi untuk menerimanya sebagai standar-standar yang dituliskan dalam Kode Etik ini.:

- **Nilai kemanusiaan sebagai yang terutama dan tertinggi.** Hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan, dan untuk menawarkannya, merupakan suatu prinsip kemanusiaan mendasar yang harus dinikmati oleh semua warga negara dari semua Negara;
- **Bantuan kemanusiaan diberikan tanpa diskriminasi dan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan, bukan pertimbangan lain.** Mendasarkan pemberian bantuan darurat pada suatu kajian yang seksama tentang kebutuhan mereka yang terdampak bencana dan kemampuan setempat yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- **Bantuan kemanusiaan tidak digunakan untuk tujuan politik dan keagamaan.** Meskipun lembaga kemanusiaan nonpemerintah (mempunyai hak untuk mempunyai pandangan politik atau keagamaan tertentu, bantuan yang diberikan tidak akan berdasarkan kepada keyakinan penerima bantuan terhadap pandangan-pandangan tersebut ;
- **Mengusahakan diri untuk tidak dijadikan alat kebijakan pemerintah asing.** Pemberi bantuan tidak membiarkan diri mereka untuk dimanfaatkan guna memperoleh informasi yang bersifat peka tentang politik, militer, ekonomi untuk pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang mungkin mempunyai kepentingan di luar tujuan kemanusiaan semata;
- **Menghormati budaya dan adat istiadat setempat.** Pemberi bantuan berupaya untuk menghormati budaya, struktur, dan adat istiadat masyarakat dan negara di mana mereka bekerja;



- **Mengusahakan kegiatan tanggap bencana dilakukan berdasarkan kapasitas lokal.** Semua orang dan masyarakat – dalam situasi bencana sekali pun - memiliki kemampuan selain kerentanan;
- **Mencari jalan melibatkan penerima manfaat program ambil bagian dalam manajemen bantuan kemanusiaan.** Bantuan darurat dan rehabilitasi jangka panjang akan paling efektif dicapai jika penerima manfaat yang menjadi sasaran dilibatkan dalam perancangan, pengelolaan, dan pelaksanaan program bantuan;
- **Bantuan harus diusahakan untuk mengurangi kerentanan untuk bencana yang akan datang dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan dasar.** Pemberi bantuan berusaha keras untuk melaksanakan program-program bantuan darurat yang secara aktif mengurangi kerentanan penerima manfaat terhadap bencana di masa datang dan membantu menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan.;
- **Menjunjung akuntabilitas, baik bagi yang dibantu maupun yang memberi sumber-sumber bantuan.** Semua perundingan dengan penyandang dana dan para penerima manfaat harus mencerminkan suatu sikap keterbukaan dan transparansi;
- **Dalam penyampaian informasi, kegiatan publikasi dan iklan, akan selalu menempatkan penyintas bencana adalah pribadi yang bermartabat dan bukan objek yang tak berdaya.** Tidak akan membiarkan publisitas yang justru dapat merugikan penerima manfaat atau terhadap keamanan pekerja kemanusiaan.

3. Kerangka Acuan dan standar International seperti Sphere, Core Humanitarian Standards, Sphere dengan tambahan elemen Covid serta standar-standar nasional lain seperti SNI dan SPM juga cenderung berkembang dan bertambah seiring dengan terjadinya bencana-bencana baru dengan tantangannya.

Proyek Sphere- atau “Sphere” – diawali pada 1997 oleh sekelompok organisasi nonpemerintah dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kelompok ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan-tindakan mereka selama respons bencana dan untuk bertanggung gugat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mendasarkan falsafah Sphere pada **dua keyakinan utama**: pertama, bahwa mereka yang terdampak bencana atau konflik mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan, oleh karenanya, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan; dan kedua, bahwa sedapat mungkin harus diambil upaya untuk meringankan penderitaan manusia yang diakibatkan bencana atau konflik.

Dalam upaya untuk mendukung dua keyakinan utama tersebut, Proyek Sphere menyusun satu Piagam Kemanusiaan dan mengidentifikasi serangkaian **standar minimum** dalam sektor-sektor penyelamatan nyawa yang sekarang tercermin dalam empat bab teknis Buku Pegangan: pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan; ketahanan pangan dan gizi; hunian, permukiman dan bantuan nonpangan; dan layanan kesehatan. **Standar-Standar Inti** merupakan standar-standar proses dan berlaku untuk semua bab teknis.

Dalam praktiknya, kebutuhan kemanusiaan tidak selalu dapat masuk ke dalam sektor-sektor khusus. Respons kemanusiaan yang efektif harus memenuhi kebutuhan orang-orang secara menyeluruh dan sektor-sektor harus berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain untuk bisa mewujudkannya. Dalam konteks krisis yang berkepanjangan, ini juga bisa diperluas melampaui respons kemanusiaan dengan satu kebutuhan untuk bekerja erat dengan para aktor pembangunan. Buku Pegangan berisi rujukan silang untuk membantu hubungan ini terwujud.

STANDAR KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Standar Nasional Indonesia (SNI) Layanan Kemanusiaan Dalam Bencana

SNI 7937-2013 merupakan standar Nasional Indonesia (SNI) Layanan Kemanusiaan dalam bencana. Merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia dengan merujuk pada beragam standar minimum dalam layanan kemanusiaan yang ada di dunia. SNI ini bertujuan memberikan sumber rujukan minimum kepada para pemangku kepentingan terkait bencana dalam memberikan layanan kemanusiaan secara bermartabat.

Standar ini menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana.

Dalam masa Pandemi Covid-19, Sphere menawarkan suatu pendekatan yang holistik berpusat pada orang (*people-centred*) untuk kerja kemanusiaan dengan tiga bab dasar (*three foundation chapters*) – Piagam Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*), Prinsip-prinsip Perlindungan (*Protection Principles*) dan Standar Kemanusiaan Inti (*Core Humanitarian Standard*) – yang mendukung bab-bab teknis. Untuk penanganan Covid-19, terdapat tiga faktor yang melingkupi semuanya: Pertama, orang hendaknya dilihat dan dihargai sebagai manusia yang bermartabat bukan sekedar kasus. Martabat manusia adalah yang utama. Kedua, keterlibatan komunitas sangat menentukan. Ketiga, dalam fokus mencegah penyebaran Covid-19 kita tidak boleh melupakan kebutuhan-kebutuhan lain dari mereka yang terpapar (ekonomi, sosial, perlindungan), maupun kebutuhan-kebutuhan lebih luas dari masyarakat yang lebih luas.



CATATAN

MEMAHAMI ISU LAPIS SANDING (CROSS CUTTING ISSUE)

3

Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan Manajemen Bencana pada umumnya perlu mempertimbangkan dan memberi prioritas kepada kelompok rentan. Perhatian sedemikian ini disebut sebagai *cross-cutting issues* (isu-isu berlapis sanding). Mereka yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah: anak-anak (mereka yang berusia 18 tahun ke bawah), ibu hamil, kaum perempuan (dalam kaitan isu gender – bukan sekedar jenis kelamin) penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat (*indigenous groups*). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut cenderung terabaikan dalam Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan Manajemen Bencana secara umum.

Tema berlapis sanding merupakan satu pokok bahasan, topik atau topik-topik yang saling berkaitan yang ada di berbagai sektor dan dampak di lebih dari satu bidang. Tema-tema berlapis sanding menuntut tindakan dalam berbagai bidang dan harus diintegrasikan ke semua agenda/program pembangunan. Tema-tema berlapis sanding mengacu kepada bidang-bidang perhatian khusus yang menangani masalah-masalah kerentanan perorangan, kelompok atau umum dan menyentuh semua aspek dalam perancangan dan respons dalam perencanaan dan kesiapsiagaan bencana.

Menurut Standar Sphere 2011, delapan tema berlapis sanding telah

diidentifikasi dalam penanggulangan bencana: Anak-Anak, Gender, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Lingkungan, Pengurangan Risiko Bencana, HIV/ AIDs dan bantuan psikososial. Dari delapan tema tersebut, lima secara langsung menangani kerentanan populasi yang cenderung terpinggirkan dalam berbagai macam penanganan bencana. Penduduk yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan mereka yang hidup dengan HIV menghadapi kesenjangan dan ketidaksetaraan bahkan ketika tidak sedang dalam situasi darurat. Bencana semakin memperburuk kondisi kesenjangan penduduk yang rentan dan terpinggirkan.

Perhatian utama dalam isu-isu berlapis sanding ini adalah identifikasi mereka dalam bentuk data yang terpisah (*segregated data*) setidaknya menurut usia, jenis kelamin (bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi orientasi seksual lain), dan disabilitas (dalam pengertian hambatan-hambatan yang ada). Dengan data yang terpisah tersebut dapat diidentifikasi besaran dan masalah ikutan terkait dengan keterpinggiran mereka. Di sisi lain, isu pelibatan atau inklusi bagi semua kelompok rentan dan terpinggirkan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hambatan-hambatan apa dan kerugian apa yang mereka hadapi dapat dikurangi sehingga mereka bukan saja dapat berpartisipasi melainkan juga berkontribusi dalam setiap fase dan aspek penanggulangan bencana.



ANAK-ANAK DALAM BENCANA

Apa yang membuat anak-anak lebih rentan adalah karena, tidak seperti orang dewasa, mereka tergantung pada sistem bantuan luar untuk kelangsungan hidup dan perlindungan mereka, yang hancur saat bencana. Ada kesenjangan-kesenjangan yang besar dalam pengembangan struktur-struktur bantuan yang bisa menangani kebutuhan-kebutuhan fisik, psikologi, hukum dan pendidikan anak yang terdampak bencana.

Dua prakarsa penting di tahun-tahun belakangan di kawasan ini adalah: (a) keamanan/ keselamatan di sekolah untuk memastikan keselamatan nyawa anak-anak di sekolah dan (b) kurikulum sekolah harus memasukkan pendidikan dan penyadaran tentang pengurangan risiko bencana untuk membangun pemberdayaan keselamatan di antara para generasi muda.

GENDER DALAM BENCANA

Tugas perempuan yang terbentuk berdasarkan peran yang diembankan secara sosial, khususnya fungsi merawat orang sakit dan yang menyandang disabilitas, meningkat tajam setelah setiap bencana; jumlah perempuan kepala keluarga meningkat setelah terjadi bencana; tingkat putus sekolah anak-anak perempuan meningkat; kekerasan terhadap perempuan juga meningkat tajam pascabencana di banyak negara. Dalam berbagai situasi bencana, terdapat laporan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan diperdagangkan. Sistem respons darurat umumnya masih sangat didominasi laki-laki. Protokol-protokol operasional standar untuk peringatan dini, evakuasi, pencarian dan penyelamatan seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan fisik, kesehatan, psikososial dan

kebutuhan-kebutuhan lain yang spesifik, serta kapasitas perempuan dan anak-anak perempuan.

Ideologi patriarki berbasis gender masih menunjukkan perempuan, bahkan di negara-negara maju, sebagai korban yang pasif dalam bencana. Sebaliknya, banyak prakarsa perempuan di tingkat akar rumput telah menunjukkan peran perempuan dalam mengurangi risiko bencana melalui upaya-upaya kesiapsiagaan dan dalam membangun kembali masyarakat yang terdampak bencana.

PENUAAN DAN BENCANA

Banyak negara yang menghadapi penuaan dengan cepat. Jepang, misalnya, mempunyai hampir 23 persen penduduk yang merupakan kaum lanjut usia, yang bisa meningkat menjadi hampir 30 persen dalam 15 tahun mendatang. Mengingat lebih tingginya usia harapan hidup untuk perempuan, *rasio penuaan* akan lebih condong ke perempuan. Perubahan-perubahan demografi ini menimbulkan tantangan-tantangan untuk mendefinisikan kembali risiko-risiko yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah lansia dan lansia perempuan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi penduduk yang rentan tersebut. Fakta bahwa lebih dari 60 persen penduduk tewas karena tsunami di Jepang Timur pada 2011 adalah lansia menunjukkan tantangan-tantangan yang bahkan dihadapi negara-negara maju. Jumlah korban jiwa yang sangat besar tersebut juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan upaya perlindungan sosial yang dapat meredam dampak bencana pada lansia.

DISABILITAS DALAM BENCANA

Orang dengan disabilitas atau difabel, terdampak bencana secara tidak proporsional karena proses evakuasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak diikutsertakan dalam perencanaan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana dikarenakan pandangan negatif yang melekat pada mereka. Perumus kebijakan seperti lembaga legislatif dinilai masih kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai keberadaan dan kebutuhan perlindungan penyandang disabilitas. Advokasi yang dilakukan penyandang disabilitas juga masih banyak yang bertumpu pada masing-masing jenis hambatan tubuh. Negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi seperti kondisi geografis dan kepadatan penduduk sudah seharusnya memperhatikan tingkat keselamatan warga negara dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana

HIV/AIDS DAN BENCANA

Hampir dua pertiga beban global infeksi HIV ada di negara-negara yang terdampak situasi darurat kompleks, baik itu bencana alam dan/atau konflik. Deklarasi Politik PBB tentang HIV pada 2006 mengakui perlunya semua orang “untuk terlibat dalam penyediaan dan penyampaian bantuan ke negara-negara dan kawasan-kawasan yang terdampak situasi darurat kemanusiaan untuk memasukkan elemen-elemen pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV ke dalam rencana dan program mereka.”

Dalam situasi darurat, ada kebutuhan yang lebih dari upaya-upaya penyelamatan nyawa. Landasan-landasan untuk pemulihan berkelanjutan harus direncanakan sejak awal. Pengarusutamaan HIV ke dalam program pemulihan harus dilakukan secara sistematis. Termasuk di dalamnya meningkatkan upaya-upaya pencegahan, perawatan, pengobatan dan layanan mitigasi HIV.

LINGKUNGAN DAN BENCANA

Bencana dan konflik, serta operasi-operasi bantuan dan pemulihan, berdampak pada lingkungan sehingga mengancam nyawa, kesehatan, penghidupan dan keselamatan. Ketidakmampuan untuk mengatasi risiko-risiko ini bisa melemahkan proses bantuan, menambah korban jiwa, ketergantungan kepada bantuan dan meningkatnya kerentanan.

Ancaman akut terhadap nyawa manusia dapat disebabkan oleh adanya bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia industri, asbes dan hidrokarbon dalam lingkungan. Pencemaran berat di udara, tanah dan air bisa timbul karena situasi-situasi tersebut dan dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Ancaman terhadap kesehatan manusia juga disebabkan adanya bahan-bahan berbahaya dan limbah puing dalam lingkungan. Meskipun keterpaparan jangka pendek mungkin tidak mematikan, dalam jangka panjang ini bisa mengancam kesehatan manusia. Ancaman terhadap penghidupan manusia disebabkan oleh rusaknya sumber daya alam dan ekosistem seperti hutan, lahan basah dan terumbu karang. Kerusakan lingkungan seringkali mengakibatkan hilangnya penghidupan sehingga bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Selain itu, kerusakan alam meningkatkan kerentanan terhadap bencana.



PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

PSIKOSOSIAL

Dukungan Psikososial bukanlah sebuah terapi psikologis. Dukungan psikososial merupakan sebuah cara untuk membantu masyarakat membangun kembali hubungan, menggunakan kearifan lokal dan sumberdaya untuk pemulihan kedepan. Dalam dukungan psikososial masyarakat menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapai agar mereka dapat membantu komunitasnya sendiri.

Tujuan utama dari Dukungan Psikososial Berbasis Masyarakat ada dua. Pertama, membantu masyarakat terdampak bencana untuk mengembalikan kehidupan yang stabil dan fungsi yang terintegrasi. Kedua, mengembalikan harapan, martabat, kesejahteraan jiwa dan sosial, dan normalitas masyarakat.

CATATAN

KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK

4

PENGERTIAN ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

Anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah (Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990).

Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun (UNICEF).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa **anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).**

Di Indonesia, anak yang masih dalam kandungan dilindungi sehingga melakukan aborsi dianggap illegal. Sedangkan di beberapa negara ada yang memperbolehkan melakukan aborsi ada alasan medis ataupun yang tanpa ada alasan medis (tergantung kebijakan masing-masing negara).

MENGAPA ANAK DILINDUNGI?

1. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa
2. Anak memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia yang merdeka

3. Anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri
4. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada orang dewasa

Prinsip Dasar untuk Memahami Perkembangan Anak

Setiap anak bersifat unik, berbeda satu sama lain. Mereka memiliki kepribadian, bakat, sifat-sifat, reaksi dan laju perkembangan yang berbeda-beda.

Anak-anak pada umumnya memiliki kesamaan, yakni mereka berkembang mengikuti urutan perkembangan yang sama. Namun demikian, gender dan kondisi kehidupan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak.

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, prasyarat dasar agar anak dapat berkembang sepenuhnya sebagai pribadi adalah adanya lingkungan yang stabil dengan peristiwa yang dapat diperkirakan sebelumnya dan orang dewasa yang mampu menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan anak untuk tumbuh. Tanpa adanya lingkungan tersebut tidak akan terwujud perkembangan yang sepenuhnya.

Kebutuhan social emosional yang penting pada anak adalah: kasih sayang, penerimaan, persetujuan, disiplin dan tuntutan. Kasih sayang dan penerimaan harus dipenuhi tanpa syarat. Dengan kata lain, anak membutuhkan:



1. **Afeksi (kasih sayang)** – adalah kebutuhan anak untuk dicintai.
2. **Penerimaan** – kebutuhan untuk diterima dengan segala kekuatan dan kelemahan/ kekurangan.
3. **Persetujuan** – kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan atau penghargaan terhadap perilaku positif yang ditampilkan anak. Anak harus merasa atau tahu pasti bahwa ia mendapatkan dukungan dari orang dewasa dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam menjalani kehidupannya.
4. **Disiplin** – perilaku yang pantas atau sesuai dengan apa yang bisa diterima masyarakat umum.
5. **Tuntutan** – keinginan yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh sehat, diantaranya adalah keinginan untuk dicintai dan diperhatikan tanpa syarat serta kebutuhan untuk mendapat pengalaman baru.

HAK DASAR ANAK

Hak anak adalah hak asasi manusia yang dimiliki semua anak dimanapun. Hak tersebut mencakup hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk terlindungi dari pengaruh yang berbahaya, perlakuan salah dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi sepenuhnya di dalam keluarga, budaya dan kehidupan sosial.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

Pasal 1

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

Pasal 2

Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.

Pasal 3

Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.

Pasal 4

Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.

Pasal 5

Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.

Pasal 6

Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

Pasal 7

Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan.

Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka.

Pasal 8

Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang.

Pasal 9

Tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak—sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orangtua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya.

Pasal 10

Jika anak tinggal di negara yang berbeda dari negara tempat salah satu atau kedua orangtuanya tinggal, pemerintah dari negara-negara terkait harus mengizinkan anak dan orangtuanya bebas bepergian agar mereka dapat bertemu dan menjaga hubungan.

Pasal 11

Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain.

Pasal 12

Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.

Pasal 13

Tiap anak berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi. Hak ini dapat dibatasi jika pandangan itu merugikan atau menyinggung sang anak atau orang lain.

Pasal 14

Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.

Pasal 15

Tiap anak berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya.

Pasal 16

Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.

Pasal 17

Tiap anak berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari beragam sumber. Informasi ini hendaklah berupa informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak.



Pasal 18

Orangtua atau wali yang sah bersama-sama bertanggung jawab membesarkan anak, dan semua pihak ini perlu selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pemerintah perlu membantu dengan menyediakan layanan untuk mendukung orangtua dan wali, khususnya jika mereka bekerja.

Pasal 19

Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.

Pasal 20

Tiap anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak.

Pasal 21

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuh dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat dipertimbangkan.

Pasal 22

Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu.

Pasal 23

Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh

Pasal 24

Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan.

Pasal 25

Tiap anak yang berada di bawah tanggung jawab negara—dalam hal pengasuhan, perlindungan, atau perawatan—berhak ditelaah kondisinya secara teratur.

Pasal 26

Tiap anak berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. Pemerintah perlu memberikan uang tambahan kepada anak dan keluarga miskin dan yang membutuhkan.

Pasal 27

Anak berhak mendapatkan standar hidup yang cukup baik sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi. Pemerintah perlu membantu keluarga yang tidak mampu memenuhi hal ini dan memastikan bahwa orangtua dan wali memenuhi tanggung jawab keuangannya terhadap anak-anak mereka.

Pasal 28

Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Pasal 29

Pendidikan perlu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak dan mengajarkan mereka pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Pendidikan perlu menyiapkan anak menjadi warga aktif di masyarakat bebas.

Pasal 30

Tiap anak berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya, terlepas dari apakah bahasa, adat istiadat, dan agama itu dipraktikkan oleh masyarakat mayoritas di negara tempatnya tinggal.

Pasal 31

Tiap anak berhak beristirahat dan bermain, dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian.

Pasal 32

Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil.

Pasal 33

Tiap anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya.

Pasal 34

Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

Pasal 35

Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi.

Pasal 36

Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.

Pasal 37

Tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 38

Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus.



Pasal 39

Tiap anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka.

Pasal 40

Tiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya. Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.

Pasal 41

Jika perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan hukum suatu negara melampaui perlindungan yang diberikan di dalam Konvensi ini, maka hukum itulah yang berlaku di negara bersangkutan.

Pasal 42

Tiap anak berhak tahu mengenai haknya. Orang dewasa juga perlu mengetahui hak-hak ini dan membantu anak memahaminya.

Konvensi Hak-Hak Anak memiliki total 54 pasal. Pasal 43-54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi.

32 HAK ANAK MENURUT KEMENPPPA RI.

Anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2. Bermain
3. Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtua kandungannya sendiri
11. Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya

Anak berhak untuk mendapatkan:

1. Nam
2. Identitas
3. Kewarganegaraan
4. Pendidikan dan pengajaran
5. Informasi sesuai usianya
6. Pelayanan kesehatan
7. Jaminan sosial
8. Kebebasan sesuai hukum
9. Bantuan hukum dan bantuan lain

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

1. Perlakuan diskriminasi
2. Eksploitasi ekonomi maupun seksual
3. Penelataran
4. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya
7. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
8. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
9. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
10. Pelibatan dalam peperangan
11. Sasaran penganiayaan dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi

4 PRINSIP HAK ANAK

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk Anak
3. Tumbuh Kembang Anak
4. Partisipasi

KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK Prinsip Perlindungan Anak

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002).
2. Perlindungan Anak adalah segala upaya, baik itu program dan kegiatan, untuk MENCEGAH (prevention) dan MENANGGAPI (response) permasalahan perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap ANAK.
3. Perlindungan anak adalah istilah yang digunakan secara luas, namun kadang tidak dipahami secara jelas. Merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, anak memiliki hak khusus atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

4. Penelantaran

Penelantaran adalah dengan sengaja, atau karena kecerobohan atau kelalaian, gagal memberikan pemenuhan atas, atau mengancam dari tidak terpenuhinya, hak anak atas keamanan fisik dan tumbuh kembang.

RUJUKAN PUSTAKA DAN BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT

Buku Pegangan Sphere: <https://spherestandards.org/handbook/editions/>



CATATAN

CHILD SAFEGUARDING POLICY (CSG)

5

PENGERTIAN CHILD SAFEGUARDING

Child safeguarding mengacu pada semua tindakan yang dilakukan lembaga/instansi untuk menjaga agar semua anak yang mereka hubungi tetap aman - dan mencakup langkah-langkah proaktif yang diterapkan untuk memastikan anak-anak tidak mengalami bahaya sebagai akibat dari kontak langsung atau tidak langsung dengan lembaga/instansi. Child Safeguarding meliputi pencegahan kekerasan fisik, seksual dan emosional, penelantaran dan penganiayaan anak oleh karyawan dan orang lain yang menjadi tanggung jawab lembaga/instansi, termasuk kontraktor, mitra bisnis, pengunjung ke tempat kegiatan dan sukarelawan.

CHILD SAFEGUARDING ADALAH PEDOMAN UNTUK:

1. Memastikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan memiliki kesadaran dan menindaklanjuti dengan tepat terhadap masalah-masalah abuse dan eksploitasi seksual anak.
2. Memastikan bahwa setiap orang yang mewakili pekerja kemanusiaan berperilaku tepat terhadap anak-anak dan tidak pernah memanfaatkan kepercayaan terhadap posisinya sebagai pekerja kemanusiaan.
3. Menilai dan mengurangi risiko-risiko bagi anak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.

Sederhananya Child Safeguarding adalah untuk dapat mengontrol segala sesuatu yang dapat kita kontrol untuk membuat para pekerja kemanusiaan aman bagi anak-anak.

Ini menjadi prioritas karena:

1. Ini adalah landasan bagi keseluruhan kerja kita
2. Ini adalah bagian penting dalam Visi kita, Nilai-nilai Penting yang kita yakini, dan Misi yang kita lakukan
3. Kegagalan menerapkannya akan merusak keseluruhan kerja kita
4. Dapat membahayakan reputasi dan kredibilitas kita
5. Harapan masyarakat dan lingkungan profesional tinggi
6. Banyak contoh tentang individu dan organisasi yang mendapatkan masalah sebagai akibat kegagalan menerapkannya
7. Akibatnya dapat membawa kehancuran anak

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.



JENIS-JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan Fisik

Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka fisik/hukuman yang tidak masuk akal yang menyebabkan luka fisik. Contohnya



Kekerasan Emosional

Jenis kekerasan yang diungkapkan secara verbal maupun ditampakkan secara tidak langsung lewat perilaku manipulative. Tindakan ini dapat merusak fungsi perilaku, intelektual, dan emosi. Contohnya:



Memanggil nama dengan sebutan buruk seperti; “idiot”, “keledai”, “cungkring”.

Penelantaran

Penelantaran/Perlakuan Salah: Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan/atau psikologis anak baik secara sengaja atau karena kelalaian. Perlakuan salah tidak terbatas pada gagal menyediakan makanan yang memadai, pakaian dan/atau tempat berlindung yang memadai sesuai musim; gagal mencegah bahaya; gagal memastikan pengawasan yang memadai; gagal memastikan akses ke perawatan atau perawatan medis yang sesuai atau menyediakan perawatan medis yang tidak sesuai (misal, memberikan obat saat tidak diizinkan); atau gagal menyediakan lingkungan fisik yang aman (misal, paparan kekerasan, lokasi berkegiatan yang tidak aman, praktik tidur yang tidak aman, melepaskan anak ke orang dewasa yang tidak sah, akses ke senjata atau benda berbahaya, gagal memberikan ruang bagi anak-anak dimana anak-anak akan menempati, dll.) Contohnya:

Tidak memiliki pengasuh yang cukup untuk anak-anak di rumah	Tidak mengecek apa yang dilakukan anak saat menggunakan internet	Tidak tertarik membicarakan kegiatan-kegiatan anak
Membuat ruang ramah anak di dekat kolam besar dan tidak ada pelindungnya	Menaruh obat-obatan, racun di tempat yang terjangkau oleh anak-anak	Tidak menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya
Tidak mengobati anak saat sakit	Tidak memberikan vaksin pada usia anak	Tidak memakaikan anak helm saat naik motor

Eksplorasi

Eksplorasi adalah penyalahgunaan atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan untuk kepentingan individu dengan memanfaatkan posisi, kekuasaan, hak istimewa, atau kekayaan mereka (melalui bujukan, manipulasi, tipuan pemaksa) untuk terlibat dalam tenaga kerja, perbudakan rumah tangga, kriminalitas paksa, pengambilan tentara atau pengambilan organ tubuh. Biasanya, orang yang mengeksploitasi anak melakukannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, sosial, atau politik. Ini dapat

terjadi pada satu atau sekelompok anak, di komunitas asal, di luar komunitas, atau internasional. Yang termasuk Eksplorasi anak:

1. perbudakan domestik (misalnya, pembersihan, pengasuhan anak, memasak, dll.)
2. kerja paksa (biasanya di pabrik atau pertanian)
3. kegiatan kriminal paksa seperti mencopet, mengemis, mengangkut obat-obatan, memproduksi obat-obatan, menjual barang bajakan, digunakan untuk penipuan, dipaksa menjadi tentara anak-anak atau bergabung dengan geng.



Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

Eksploitasi & Pelecehan Seksual (SEA): Semua bentuk kekerasan seksual dan pemaksaan, ajakan seksual, manipulasi atau tipu daya termasuk inses, pernikahan dini dan paksa, pemerkosaan, keterlibatan dalam atau paparan gambar/video tidak senonoh (alias pornografi), perbudakan seksual/perdagangan manusia, dan pemerkosaan menurut undang-undang. Pelecehan seksual dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada sentuhan atau paparan yang tidak senonoh, bahasa seksual

eksplisit terhadap atau tentang seorang anak dan perawatan. Pelecehan seksual tidak selalu melibatkan sentuhan.

Eksploitasi Seksual adalah setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi kerentanan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan untuk tujuan seksual termasuk tetapi tidak terbatas pada mengambil untung secara ekonomi, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. Ketahuilah bahwa teknologi adalah alat yang terkadang digunakan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.



Eksploitasi seksual dan pelecehan anak di bawah usia 18 tahun adalah pelecehan anak dan pelanggaran kebijakan. Ini juga bisa merupakan pelanggaran pidana, tergantung pada usia persetujuan, hukum setempat dan adat istiadat.

Grooming adalah proses di mana orang dewasa membangun hubungan dengan anak atau pengasuh anak untuk mendapatkan kepercayaan anak atau pengasuh untuk tujuan pelecehan seksual

dan/atau mengeksploitasi anak. *Grooming* biasanya terjadi secara bertahap, dan itu bisa terjadi secara online atau tatap muka, oleh orang asing atau oleh seseorang yang dikenal anak atau pengasuh. Karena ini adalah proses bertahap, terkadang sulit dideteksi. Berikut adalah beberapa indikator orang mungkin melakukan *grooming* terhadap anak atau pengasuhnya:

1. Memperlakukan anak lebih istimewa dibandingkan anak yang lain.
2. Memberi anak itu hadiah atau hak istimewa

3. Mengisolasi anak dari orang lain
4. Mengungkapkan minat pada anak yang rentan atau membutuhkan dukungan (mis., Pelecehan anak sebelumnya oleh anak lain)
5. Berteman dengan orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab untuk melindungi anak
6. Memberi anak lcohol atau obat-obatan
7. Membangun keintiman (yaitu, bercanda di dalam atau memberi tahu anak itu bahwa tidak ada yang memahaminya seperti yang dilakukan pengasuh)
8. Mengancam, memeras, mengintimidasi, atau menakuti anak dengan mengatakan bahwa pengasuh anak akan melakukan sesuatu pada keluarga atau teman anak tersebut.

Kebijakan Komitmen terhadap Anak

Setiap pekerja kemanusiaan harus berkomitmen untuk menjalankan program dan operasinya dengan cara yang aman bagi anak-anak yang dilayaninya dan untuk membantu melindungi anak-anak. Semua pekerja kemanusiaan secara eksplisit dilarang terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat mengakibatkan segala jenis Kekerasan terhadap Anak. Kebijakan Child Safeguarding untuk menciptakan dan secara proaktif memelihara lingkungan yang bertujuan untuk mencegah segala tindakan dan kelalaian, baik disengaja atau tidak disengaja, yang menempatkan anak-anak pada risiko segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Semua pekerja kemanusiaan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan komitmen dan kewajiban ini. Setiap pelanggaran kebijakan ini akan diperlakukan sebagai pelanggaran serius dan akan mengakibatkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan segala upaya hukum lain yang tersedia.

Sebagai kelanjutan dari Kebijakan ini, diharapkan pekerja kemanusiaan juga dapat mempromosikan:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Berjuang, melalui kesadaran, praktik dan pelatihan yang baik, untuk meminimalkan risiko terhadap anak-anak dan mengambil langkah-langkah positif untuk membantu melindungi anak-anak yang menjadi subjek masalah apa pun.
2. Pelaporan Kekerasan terhadap Anak: Memastikan bahwa semua pekerja kemanusiaan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dan siapa yang harus dihubungi ketika timbul kekhawatiran terkait pengamanan anak-anak.
3. Menanggapi Kekerasan terhadap Anak: Terlibat dalam tindakan yang mendukung dan melindungi anak-anak ketika timbul kekhawatiran mengenai kesejahteraan mereka; mendukung mereka yang menyampaikan kekhawatiran tersebut; menyelidiki, atau bekerja sama dengan penyelidikan selanjutnya; dan mengambil tindakan korektif yang tepat untuk mencegah terulangnya aktivitas tersebut.
4. Pelatihan untuk Mendorong Kesadaran Kewajiban Perlindungan Anak: Memastikan bahwa semua Perwakilan dilatih dan didukung secara memadai dalam mencegah, melaporkan, dan menanggapi masalah perlindungan; dan memastikan bahwa semua Perwakilan diberitahukan dan diberitahu tentang harapan untuk mematuhi Kebijakan ini.

Pekerja kemanusiaan akan mengambil semua langkah yang wajar untuk membuat organisasi aman ketika melakukan operasi rutin, implementasi program (melalui implementasi langsung non-darurat, respon darurat dan kemanusiaan, pekerjaan pemulihan dan pengembangan), upaya kebijakan dan kampanye.



MEMBUAT PROGRAM CHILD SAFEGUARDING

Ada 6 langkah untuk membuat program Child Safeguarding:

1. Lakukan penilaian risiko child safeguarding yang menunjukkan cara staf dan mitra bertindak atas nama lembaga/instansi melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan anak-anak.
2. Melakukan analisis kesenjangan kebijakan, proses dan struktur tata kelola yang ada yang dapat mendukung child safeguarding, dan mengembangkan struktur dan panduan tambahan untuk mengisi kesenjangan yang relevan.
3. Kembangkan komitmen kebijakan yang menguraikan komitmen lembaga/instansi untuk menjaga anak-anak aman dari kekerasan dan perlakuan buruk oleh staf dan mitra yang bertindak atas namanya.
4. Kembangkan rencana implementasi untuk memenuhi komitmen yang diuraikan dalam kebijakan upaya perlindungan.
5. Menetapkan struktur pelaporan untuk kasus-kasus kekerasan yang aktual dan potensial yang pasti akan diterima dan diproses.
6. Memberikan panduan bagi staf tentang cara mengambil tindakan yang relevan saat ada masalah/perlu dilaporkan.

Langkah 1

Melakukan penilaian adalah langkah pertama untuk memahami risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan dengan anak-anak melalui interaksi dengan lembaga/instansi, karyawannya, atau perwakilannya. Penilaian sendiri dapat berupa penilaian yang berdiri sendiri, atau diintegrasikan ke dalam sistem manajemen risiko yang ada atau proses

penilaian dampak. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan semua peluang yang dimiliki oleh karyawan dan perwakilan lembag/instansi yang dapat menempatkan mereka dalam kontak langsung atau tidak langsung dengan anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan mereka, dan untuk menentukan tingkat risiko dari setiap keterikatan.

Contoh kontak langsung dan risiko yang berpotensi terjadi meliputi:

1. Penjualan langsung ke anak-anak (rekanan ritel dalam kisah pakaian menonton pakaian anak di ruang ganti).
2. Kegiatan pemasaran yang memerlukan keterlibatan dengan anak-anak (karyawan perusahaan mainan secara fisik melakukan pelecehan).
3. seorang aktor cilik sambil menghasilkan iklan yang menampilkan produk perusahaan).
4. Bepergian atas nama perusahaan ke tempat-tempat di mana eksploitasi seksual anak menjadi perhatian (karyawan perusahaan meminta anak-anak saat melakukan perjalanan bisnis).
5. Berinteraksi dengan anak-anak yang tinggal di atau di lingkungan perusahaan terdekat (seorang penjaga keamanan di lokasi perkebunan secara fisik dan atau pelecehan seksual anak-anak).
6. Bersukarela dengan amal untuk anak-anak atas nama perusahaan (seorang karyawan melecehkan anak yang rentan selama hari bimbingan sukarela perusahaan untuk kaum muda yang kurang beruntung).
7. Memberikan perawatan untuk seorang anak atau orang muda (seorang pramugari maskapai penerbangan menggunakan kekuatan fisik untuk mengendalikan anak sambil bertanggung jawab atas keselamatan anak).
8. Tempat komersial yang menawarkan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk

anak-anak atau orang muda (karyawan taman bermain membuat komentar rasial berulang-ulang untuk seorang anak).

Kontak tidak langsung dan contoh-contoh risiko termasuk:

1. Berkomunikasi dengan anak-anak atau remaja melalui platform online (karyawan merawat anak-anak melalui pesan langsung di platform video game perusahaan).
2. Memiliki akses ke data anak yang sensitif (perwakilan perusahaan asuransi salah menangani data anak-anak dan membagikan informasi pribadi mereka kepada pihak ketiga tanpa persetujuan).
3. Pemasaran melalui platform media sosial (kerentanan anak-anak dieksploitasi ketika mereka didorong untuk menjadi 'keren' dengan memposting ulang atau berbagi iklan di media sosial, sementara itu tidak secara jelas diidentifikasi sebagai bentuk promosi komersial).
4. Menerima klaim pelecehan anak (seorang anak muda memanggil saluran layanan pelanggan yang melaporkan pelecehan oleh karyawan perusahaan, tetapi operator tidak tahu bagaimana melaporkan insiden itu).
5. Mengumpulkan gambar anak-anak (foto/video digunakan dengan cara yang tidak bermartabat atau dengan mengidentifikasi informasi tentang anak yang gagal menghormati haknya atas privasi atau menyebabkan anak menjadi sasaran pelecehan).

Setelah peluang untuk kontak telah dipetakan, pertanyaan harus diajukan untuk memahami di mana area dengan potensi risiko atau dampak tertinggi ada. Ini termasuk:

1. Kontak apa yang dimiliki perusahaan dengan anak-anak/remaja sebagai bagian dari operasi bisnisnya?
 - Sebuah. Kontak langsung dengan anak-anak:
 - ◊ - Apa jenis kegiatan dan di mana kontak ini terjadi? (Sebutkan semua jenis kegiatan di mana kontak tatap muka dengan anak-anak terjadi.)
 - ◊ - Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? (Sebutkan semua peran yang terlibat dalam kontak ini, dan sertakan detailnya, seperti unit bisnis, posisi/jenis karyawan tertentu, kontraktor, mitra yang bertindak atas nama perusahaan atau sukarelawan.)
 - Kontak tidak langsung dengan anak-anak:
 - ◊ - Apa jenis kegiatannya, dan di mana kontak ini terjadi? (Sebutkan semua jenis aktivitas di mana kontak tidak langsung dengan anak-anak terjadi, mis., Online, menangani data anak-anak, atau gambar/video.)
 - ◊ - Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? (Sebutkan semua peran yang terlibat dalam kontak ini, dan sertakan detailnya, seperti unit bisnis, posisi/jenis karyawan tertentu, kontraktor, mitra yang bertindak atas nama perusahaan atau sukarelawan.)
2. Berapa frekuensi pertunangan ini dengan anak-anak dan/atau remaja?
3. Apakah kontak dengan anak-anak dan/atau remaja memerlukan atau mengizinkan karyawan atau perwakilannya sendirian dengan anak-anak? Jika ya, bagaimana caranya?
4. Apa potensi risiko bagi anak-anak dan/atau remaja akibat kontak itu? (Pertimbangkan masalah kesehatan, keselamatan, dan potensi penyalahgunaan atau penelantaran)



Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi peluang untuk kontak antara karyawan/perwakilannya dan anak-anak, dan menentukan tingkat risiko masing-masing. Templat untuk penilaian risiko disediakan dalam Lampiran I. Penilaian lanjutan harus dilakukan ketika peluang bisnis baru, proyek atau kampanye diluncurkan untuk mengevaluasi potensi risiko baru dan menemukan cara untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.

Langkah 2 analisis kesenjangan

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kesenjangan untuk memetakan kebijakan dan proses yang relevan yang sudah ada. Ini memungkinkan bisnis untuk memahami sejauh mana perlindungan anak telah diintegrasikan ke dalam pendekatan manajemen risikonya. Analisis kesenjangan praktik terbaik mencakup dua fase:

Meninjau undang-undang hukum dan peraturan saat ini, termasuk tolak ukur undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, perlindungan dan pelecehan. Ini akan mencakup penilaian sejauh mana kebijakan dan praktik perusahaan yang ada memenuhi kerangka hukum nasional di setiap negara tempat perusahaan beroperasi.

Penilaian praktik manajemen yang memberikan perlindungan tambahan di luar kepatuhan hukum. Ini harus mencakup ulasan tentang:

1. kebijakan, strategi dan praktik yang ada di seluruh perusahaan untuk menentukan di mana pertimbangan terkait dengan perlindungan anak telah dinyatakan, atau di mana mereka dapat dan harus ditambahkan;
2. panduan untuk posisi berisiko tinggi; dan
3. kebijakan dan kode perilaku yang mengatur mitra yang bertindak untuk

atau atas nama perusahaan, bersama dengan bagaimana kebijakan dan praktik ini dikomunikasikan kepada individu yang berlaku (mis., Karyawan, kontraktor).

Selama fase pertama analisis, pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh perusahaan kepada diri mereka adalah: Apa persyaratan hukum sehubungan dengan perlindungan anak di negara-negara tempat kita beroperasi? Di banyak negara, aspek perlindungan anak dimasukkan ke dalam undang-undang nasional, dan sebagian besar negara memiliki undang-undang yang melarang pelecehan anak dan eksploitasi seksual anak. Namun, di beberapa negara,

undang-undang tidak mencerminkan standar etika dasar yang diakui secara internasional. Jika ada konflik antara undang-undang nasional dan standar internasional, sangat disarankan untuk memprioritaskan standar internasional.

Untuk fase kedua, perusahaan perlu bertanya: Bagaimana kita memastikan bahwa kita memenuhi tanggung jawab perlindungan kita dalam praktik? Secara khusus, perusahaan harus berusaha memahami bagaimana setiap kejadian kontak langsung dan tidak langsung dengan anak-anak muncul selama penilaian risiko saat ini dikelola. Ini harus mencakup

perusahaan serta hubungan bisnisnya. Sebagai contoh:

1. Apakah perusahaan memiliki struktur tata kelola untuk mengelola pendekatannya terhadap perlindungan anak? Bagaimana pengamanan dimiliki dan dipahami di tingkat kepemimpinan senior dalam organisasi?
2. Apakah praktik perlindungan anak dimasukkan dalam kode etik karyawan atau vendor perusahaan atau sebagai kebijakan yang berdiri sendiri?

3. Apakah perusahaan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan praktik perekrutan yang aman, misalnya, melakukan pemeriksaan latar belakang¹⁰ untuk semua karyawan yang akan memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan anak-anak?
4. Apakah pelatihan tentang perlindungan anak diberikan kepada semua karyawan dan konten tambahan untuk karyawan atau mitra diberikan kepada mereka yang memiliki kontak langsung dan tidak langsung dengan anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka yang khas?
5. Apakah ada proses untuk melaporkan dan menanggapi masalah perlindungan anak yang diajukan oleh karyawan dan pihak ketiga?
6. Apakah perusahaan mempromosikan budaya akuntabilitas di mana kekhawatiran yang dilaporkan ditanggapi dengan serius, tindakan segera diambil untuk meminimalkan risiko tambahan, dan pelapor dilindungi?

Jika perusahaan tidak memiliki mekanisme khusus untuk mengelola risiko - misalnya, kebijakan dan proses peluit untuk menentukan bagaimana kekhawatiran yang muncul tentang karyawan harus dikelola dengan cara yang kuat dan transparan - ini harus dikembangkan dan diimplementasikan sebagai prioritas. Ketidakmampuan mitra untuk menerapkan mekanisme tersebut harus dipertimbangkan ketika memasuki atau melanjutkan kemitraan.

Untuk panduan tambahan tentang bagaimana mekanisme ini harus disusun, lihat Langkah 4 dan Lampiran II, yang menyediakan templat sederhana untuk analisis kesenjangan.

Langkah 3 komitmen kebijakan

Kebijakan perlindungan anak menetapkan komitmen perusahaan untuk menjaga anak-anak tetap aman dan mengartikulasikan apa yang akan dilakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan menanggapi kekhawatiran. Komitmen kebijakan bukanlah hasil akhir dari proses pengamanan, tetapi hanya langkah pertama yang menginformasikan jalan menuju implementasi dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan perlindungan anak harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang risiko perusahaan sebagaimana diidentifikasi selama penilaian formal (Langkah 1).

Kebijakan serta pedoman prosedural yang menyertainya harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Komitmen tersebut dapat, misalnya, diintegrasikan ke dalam kebijakan dan kode perusahaan yang ada, atau ditulis ke dalam kebijakan yang berdiri sendiri, dilengkapi dengan dokumen pedoman prosedural yang terpisah - tergantung pada tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak oleh perusahaan. kegiatan. Dalam beberapa kasus, mungkin akan membantu jika pedoman dibuat dalam berbagai format (Q&A dokumen, video, dll.) Atau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Hasil analisis kesenjangan (Langkah 2) akan membantu menentukan format yang paling cocok untuk komitmen kebijakan. NSPCC Inggris menawarkan

panduan bermanfaat tentang bagaimana membuat konsep kebijakan perlindungan.

Ketika mengembangkan kebijakan perlindungan anak, perusahaan harus berupaya memasukkan poin-poin yang diuraikan dalam daftar pemeriksaan di halaman berikutnya.



Langkah 4 Mengembangkan Kebijakan

Child Safeguarding Menentukan ruang lingkup dan format yang paling cocok untuk kebijakan perlindungan anak akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk: hasil penilaian risiko dan analisis kesenjangan; pra-keberadaan dan kesesuaian kebijakan dan praktik lain yang relevan (mis., kebijakan yang meniup peluit, prosedur pengaduan); strategi yang sudah ada untuk mengintegrasikan penghormatan terhadap hak-hak anak dalam bisnis; sifat dari kegiatan, operasi dan struktur perusahaan - dan pragmatisme, apa yang akan bekerja dalam konteks spesifik perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memilih untuk mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang berdiri sendiri, dokumen tersebut harus dengan jelas menyatakan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Untuk memastikannya dibaca dan digunakan oleh karyawan dan manajemen untuk memandu pengambilan keputusan dan perilaku karyawan, kebijakan ini harus singkat, jelas, dan praktis. Tingkat risiko perlindungan anak bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Oleh karena itu, kebutuhan akan panduan yang lebih terperinci tentang bagaimana masalah ini dikelola di seluruh kegiatan bisnis yang relevan dapat berbentuk berbeda. Ada peluang untuk mengintegrasikan pedoman perilaku karyawan ke dalam kode etik perilaku yang ada atau untuk menyusun dokumen pedoman terpisah/kode etik perlindungan anak jika penilaian menunjukkan risiko yang luas untuk keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Untuk beberapa perusahaan, kode mereka sudah mencakup perilaku yang pantas bagi karyawan karena berkaitan dengan kelompok rentan, termasuk anak-anak. Sebagai bagian dari proses pengembangan kebijakan, kode etik asli juga harus

diperbarui untuk memberikan panduan yang lebih baik tentang perilaku yang terkait secara khusus untuk melindungi anak-anak.

Mengembangkan Kebijakan Pengamanan Sendiri Yang Sendiri

Menentukan ruang lingkup dan format yang paling cocok untuk kebijakan perlindungan anak akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk: hasil penilaian risiko dan analisis kesenjangan; pra-keberadaan dan kesesuaian kebijakan dan praktik lain yang relevan (mis., kebijakan yang meniup peluit, prosedur pengaduan); strategi yang sudah ada untuk mengintegrasikan penghormatan terhadap hak-hak anak dalam bisnis; sifat dari kegiatan, operasi dan struktur perusahaan - dan pragmatisme, apa yang akan bekerja dalam konteks spesifik perusahaan.

Ketika sebuah perusahaan memilih untuk mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang berdiri sendiri, dokumen tersebut harus dengan jelas menyatakan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Untuk memastikannya dibaca dan digunakan oleh karyawan dan manajemen untuk memandu pengambilan keputusan dan perilaku karyawan, kebijakan ini harus singkat, jelas, dan praktis.

Tingkat risiko perlindungan anak bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Oleh karena itu, kebutuhan akan panduan yang lebih terperinci tentang bagaimana masalah ini dikelola di seluruh kegiatan bisnis yang relevan dapat berbentuk berbeda. Ada peluang untuk mengintegrasikan pedoman perilaku karyawan ke dalam kode etik perilaku yang ada atau untuk menyusun dokumen pedoman terpisah/kode etik perlindungan anak jika penilaian menunjukkan risiko yang luas untuk keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

Untuk beberapa perusahaan, kode mereka sudah mencakup perilaku yang pantas bagi karyawan karena berkaitan dengan kelompok rentan, termasuk anak-anak. Sebagai bagian dari proses pengembangan kebijakan, kode etik asli juga harus diperbarui untuk memberikan panduan yang lebih baik tentang perilaku yang terkait secara khusus untuk melindungi anak-anak.

Prinsip-Prinsip Berkegiatan Dengan Anak Pada Situasi Darurat Bencana Gempa, Tsunami Dan Likuifaksi Di Sulawesi Tengah

1. Definisi anak dalam dokumen ini adalah merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pengambilan foto, video, dan dokumentasi personal anak harus dengan izin tertulis dari anak dan orang tua atau pengasuh utama atau pendamping.
3. Pengambilan foto atau video anak dengan menghargai derajat dan kehormatan anak yang menunjukkan aspek positif serta keceriaan anak. Tidak memperlihatkan mereka sebagai korban rentan atau lemah.
4. Memastikan bahwa gambar-gambar anak tidak diperlihatkan/dipublikasikan sebagai gambar seksual atau yang menunjukkan situasi kekerasan.
5. Izin pengambilan dokumentasi kelompok (minimal 6 orang anak) dapat melalui ketua, koordinator posko, kepala sekolah atau guru secara tertulis.
6. Melindungi keselamatan dan kerahasiaan anak beserta keluarganya dengan tidak menggunakan foto atau video yang dapat diidentifikasi (membuka informasi lokasi keberadaan anak dan nama lengkap anak) di media atau internet.
7. Ketika berinteraksi dan berkegiatan dengan anak, tidak melakukan kekerasan fisik, emosional, seksual, eksploitasi dan penelantaran dalam bentuk apapun (verbal maupun non-verbal).
8. Interaksi bersama anak yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa anak (misalnya: terkait menggali pengalaman bencana yang dialami oleh anak) mesti dilakukan/ didampingi oleh tenaga profesional: seperti psikolog, psikiater ataupun tenaga terlatih lainnya.
9. Memperlakukan anak dengan hormat dengan tidak memandang suku, warna kulit, agama, ras, bahasa, asal etnis, sosial, jenis kelamin serta kebutuhan khusus dan kebutuhan lainnya.
10. Tidak tidur di ruangan yang sama atau tempat tidur yang sama dengan anak di lokasi pengungsian ataupun tempat sementara lainnya.
11. Tidak mengajak anak keluar area posko atau sekolah tanpa pendamping dan izin orangtua atau pengasuh utamanya.
12. Tidak berinteraksi secara tertutup atau menghabiskan waktu secara berlebih hanya berdua dengan anak dan jauh dari pengawasan orang lain.
13. Jika ingin mengadakan pertemuan tertentu dengan anak, dilakukan atas sepengetahuan relawan lain, dan mendapatkan izin dari orangtua/ pengasuh utama atau pendamping.
14. Mengkoordinasikan segala jenis kegiatan, makanan ataupun hadiah yang akan diberikan untuk anak kepada koordinator/penanggung jawab posko atau sekolah. Pastikan jadwal kegiatan dengan anak-anak tidak tumpang tindih. Jika memberikan makanan kepada anak-anak berikan makanan yang sehat sesuai dengan umur anak.



15. Jumlah sesi berkegiatan dengan anak dibatasi hanya 1 kali dalam sehari dengan durasi tidak lebih dari 120 menit. Apabila kegiatan melebihi waktu yang dianjurkan, harus meminta persetujuan lagi dari orang tua/ pengasuh, koordinator posko, kepala sekolah/guru.
16. Tidak bertindak yang menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan anak ke dalam posisi rentan terhadap terjadinya pelecehan.
17. Tidak merokok di tempat kegiatan, baik di sekretariat, lingkungan posko, sekolah dekat dengan atau terlihat oleh anak.
18. Siapapun yang berkegiatan dengan anak tidak menempatkan diri dalam situasi yang berisiko.
19. Siapapun yang akan melakukan kegiatan dengan anak perlu melakukan kaji risiko dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi adanya bahaya terhadap anak seperti gempa susulan, banjir, longsor, kecelakaan, dll.
20. Tidak memberi janji apapun kepada anak-anak. Jika ada anak yang meminta sesuatu, relawan sebaiknya tidak menjanjikan apa-apa.
21. Selalu menjaga kebersihan lokasi kegiatan, mempromosikan pola hidup bersih dan sehat pada kondisi darurat.
22. Siapapun yang berkegiatan dengan anak termasuk didalamnya staf, relawan, jurnalis, reporter, fotografer, pembuat film, pekerja media wajib mematuhi prinsip-prinsip ini.

Rujukan Pustaka dan Bahan Bacaan lebih lanjut

UNICEF child safeguarding toolkit, 2018.

Save the Children child safeguarding policy 2019.

CATATAN

PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

6

APA ITU PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT?

Perlindungan anak adalah pencegahan dari dan penanganan terhadap perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (definisi yang disepakati Kelompok Kerja Perlindungan Anak).

Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk:

1. Menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah bencana; dan
2. Memperkuat kesiapsiagaan untuk setiap krisis di masa depan.

Krisis kemanusiaan dapat disebabkan oleh manusia, seperti konflik atau kerusakan sipil; mereka bisa diakibatkan oleh bencana, seperti banjir dan gempa bumi; atau bisa juga kombinasi keduanya. Krisis kemanusiaan sering kali memiliki dampak jangka panjang yang menghancurkan kehidupan anak-anak.

Risiko perlindungan anak yang dihadapi anak-anak termasuk pemisahan keluarga, perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, pelecehan fisik atau seksual, tekanan psikososial atau gangguan mental, eksploitasi ekonomi, cedera dan bahkan kematian. Besaran dan cakupan dampak dari suatu krisis kemanusiaan

ditentukan oleh beberapa faktor seperti:

1. Sifat dan skala keadaan darurat;
2. Jumlah anak yang terkena;
3. Jenis masalah perlindungan anak;
4. Norma sosial budaya;
5. Risiko perlindungan anak yang sudah ada sebelumnya;
6. Kesiapsiagaan di tingkat komunitas; dan
7. Stabilitas dan kapasitas Negara sebelum dan selama krisis.

Pekerja kemanusiaan dan intervensi perlindungan anak berusaha untuk mencegah dan menanggapi semua bentuk perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Perlindungan anak yang efektif dibangun di atas kapasitas yang ada dan memperkuat kesiapsiagaan sebelum krisis terjadi. Selama krisis kemanusiaan, intervensi yang tepat waktu akan mendukung kesehatan fisik dan emosional, martabat dan kesejahteraan anak-anak, keluarga dan masyarakat.

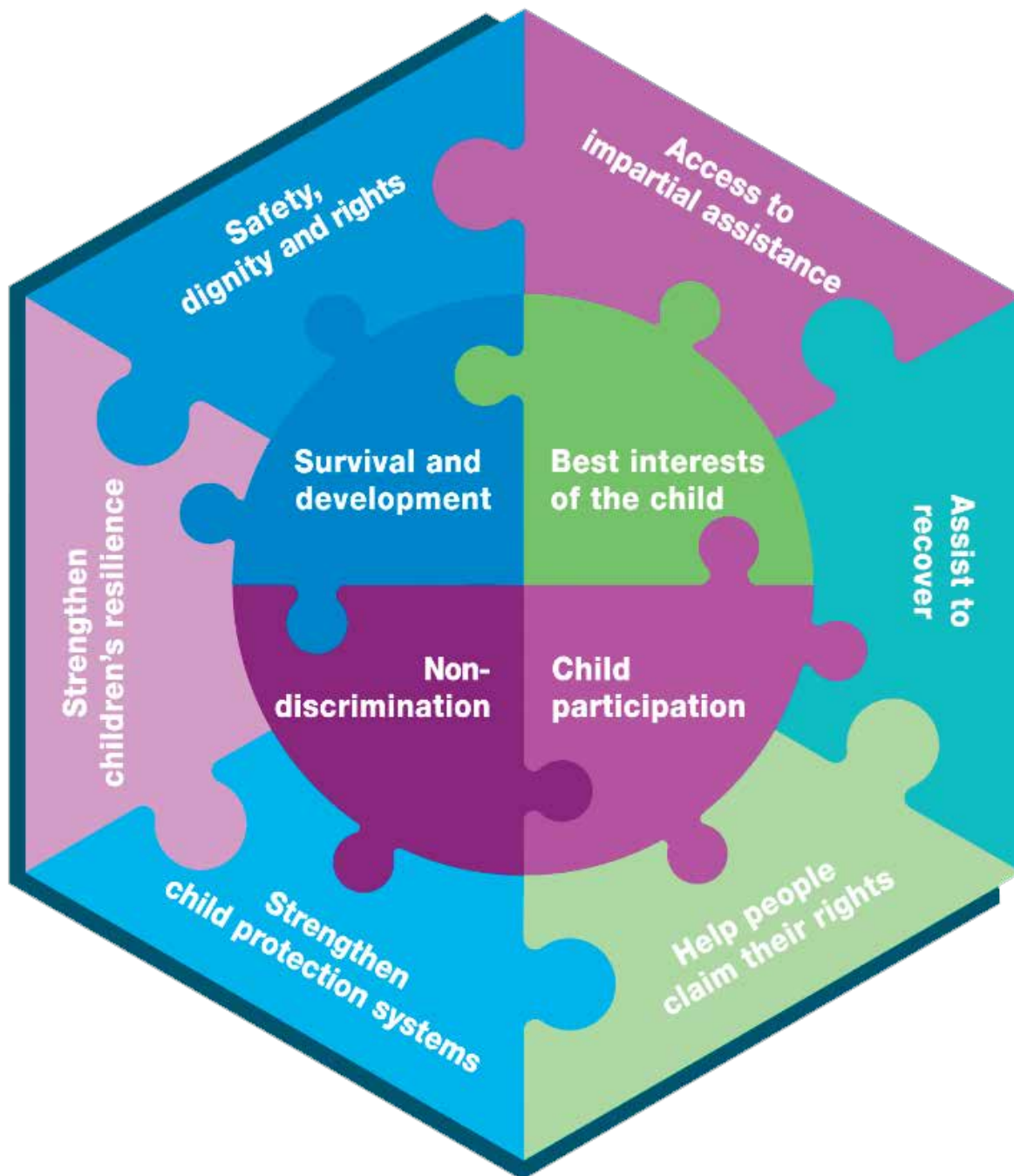
Perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan mencakup kegiatan khusus yang dilakukan oleh para pelaku perlindungan anak lokal, nasional dan internasional. Ini juga mencakup upaya pekerja kemanusiaan lain yang berusaha untuk mencegah dan menangani perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam aksi kemanusiaan, baik melalui program yang diurusutamakan atau terintegrasi.



Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat dari anak-anak dan menyelamatkan nyawa.

Tujuh risiko utama perlindungan anak yang mungkin dihadapi anak-anak dalam situasi tanggap darurat, yakni:

1. Bahaya dan cedera;
2. kekerasan fisik dan emosional;
3. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender;
4. Permasalahan kesehatan mental dan tekanan psikososial;
5. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata;
6. Pekerja anak; dan
7. Anak-anak tanpa pendamping dan anak yang terpisah.



10 PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT BENCANA:

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA)

- 1. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.** Para pekerja kemanusiaan harus mempertimbangkan dampak dari situasi darurat dan respons terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, social dan spiritual anak.
- 2. Non-Diskriminasi dan Inklusi.** Pekerja kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi penyebab dan pola diskriminasi dan eksklusi yang berdampak pada anak dan keluarganya, dan mengadvokasi akses ke sistem perlindungan anak untuk semua anak.
- 3. Partisipasi Anak.** Pekerja kemanusiaan harus memberi anak-anak waktu dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam semua keputusan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta proses pemulihan.
- 4. Kepentingan Terbaik Anak.** Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini harus memandu rancangan, pemantauan, dan penyesuaian semua program dan intervensi kemanusiaan. Ketika pekerja kemanusiaan mengambil keputusan tentang seorang anak, protocol perlindungan anak yang sudah disepakati harus dilaksanakan untuk memastikan prinsip-prinsip ini ditegakkan.

Berdasarkan Prinsip Perlindungan di Buku Sphere Edisi 2018

- 1. Meningkatkan keselamatan, martabat dan hak orang-orang yang terdampak bencana dan menghindari dari bahaya lebih lanjut.** Bantuan kemanusiaan harus diberikan dengan

cara-cara yang mengurangi risiko yang mungkin dihadapi anak-anak dan keluarga mereka sekaligus memenuhi kebutuhan mereka dengan bermartabat.

- 2. Memastikan akses orang ke bantuan yang tidak memihak sesuai dengan kebutuhan dan tanpa diskriminasi,** dimana pekerja kemanusiaan harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang relevan untuk menentang tindakan apa pun yang dengan sengaja merampas kebutuhan dasar anak-anak dan keluarganya.
- 3. Membantu orang untuk pulih dari efek fisik dan psikologis dari kekerasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan,** dimana kegiatan perlindungan dan aksi kemanusiaan harus berusaha untuk membuat anak-anak lebih aman, memfasilitasi upaya anak dan keluarga untuk tetap aman, dan mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak-anak.
- 4. Membantu orang terdampak, termasuk anak untuk mengklaim hak mereka,** yang artinya pekerja kemanusiaan harus mengadvokasi untuk menghormati hak-hak anak dan kepatuhan terhadap hukum internasional dan nasional yang mendukung lingkungan yang melindungi anak.

Berdasarkan Prinsip Standar Minumum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan

- 1. Memperkuat sistem perlindungan anak,** dimana hukum, lembaga, kapasitas dan elemen lain dari sistem perlindungan anak harus diperkuat untuk beradaptasi dengan situasi politik dan krisis yang berkembang.
- 2. Memperkuat ketahanan (resiliensi) anak dalam aksi kemanusiaan,** dimana program dan kegiatan harus dibangun di atas kekuatan anak,



mengurangi risiko dan mendukung hubungan positif antara anak, keluarga dan masyarakat.

Mengapa Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan?

Standar Minimum ini dikembangkan untuk mendukung pekerjaan perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan dengan:

1. Menetapkan prinsip umum antara mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak;
2. Memperkuat koordinasi antar pelaku kemanusiaan;
3. Meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan dampaknya pada anak;
4. Meningkatkan akuntabilitas program perlindungan anak;
5. Mendefinisikan bidang profesional perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan;
6. Memberikan sintesis praktik dan pembelajaran yang baik hingga saat ini; dan
7. Memperkuat advokasi dan komunikasi tentang risiko, kebutuhan dan tanggapan perlindungan anak.

Siapa yang harus menggunakan standar minimum Perlindungan Anak ini?

Standar ini ditujukan untuk semua pekerja kemanusiaan, terutama mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak atau yang bekerja secara langsung dengan anak, keluarga dan masyarakat. Standar minimum ini juga diperuntukkan bagi kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, personel pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi internasional, donor, koordinator, staf sumber daya manusia dan mereka yang bekerja di bidang advokasi, media atau komunikasi. Standar Minimum ini mungkin juga berlaku untuk mereka yang bekerja di sistem peradilan, untuk otoritas perbatasan dan imigrasi dan untuk personel keamanan.

Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan harus digunakan sepanjang setiap fase aksi kemanusiaan, mulai dari kesiapsiagaan dan perencanaan kontingensi hingga respons dan pemulihan dini. Standar Minimum mendukung akuntabilitas antara pekerja kemanusiaan dan komunitas serta orang yang terkena dampak bencana dengan (a) memberikan kesepakatan bersama tentang kualitas bantuan yang harus diberikan dan (b) mempromosikan penerapan umpan balik dan mekanisme pelaporan untuk akuntabilitas bantuan dan program kemanusiaan.

Apa yang dimaksud dengan standar 'minimum'?

Standar-standar ini menetapkan kesepakatan bersama mengenai apa kualitas intervensi perlindungan anak yang memadai dalam aksi kemanusiaan. Sejauh mana standar dapat dipenuhi dalam praktiknya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

1. Aksesibilitas penduduk yang terkena dampak;
2. Tingkat kerjasama dari otoritas terkait;
3. Tingkat ketidakamanan dalam konteks lokal; dan
4. Sistem yang ada sebelum krisis.

Pendekatan bertahap untuk memenuhi standar mungkin diperlukan jika kapasitas dan sumber daya perlindungan anak terbatas dan kebutuhan perlindungan anak yang mendesak dan cepat berubah. Ketika standar tidak dapat dipenuhi, standar tersebut masih berlaku sebagai tolok ukur universal yang disepakati dan dapat digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang lebih baik untuk perlindungan anak.

Standar ini memungkinkan para pekerja kemanusiaan untuk menyoroti kesenjangan dalam cakupan atau kualitas tanggap darurat perlindungan anak dan program atau kondisi yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

Bagaimana cara menggunakan Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan?

Umumnya, Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan dapat digunakan di tingkat lembaga dan antar-lembaga untuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Merencanakan intervensi kemanusiaan;
2. Menetapkan harapan, tujuan, hasil yang ingin dicapai dan terukur untuk ruang lingkup dan
3. kualitas layanan perlindungan anak;
4. Menetapkan prinsip-prinsip umum antara aktor yang berbeda, seperti dalam mekanisme koordinasi perlindungan anak;
5. Memantau dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas program dan kegiatan kemanusiaan
6. Memandu dan mengevaluasi alokasi pendanaan;
7. Melatih dan mengembangkan kapasitas pekerja kemanusiaan atau mitra kerja;
8. Berfungsi sebagai alat belajar mandiri dan teks referensi;
9. Mengembangkan rencana kesiapsiagaan;
10. Melakukan upaya advokasi masalah perlindungan anak;
11. Memberi pengarahan kepada para pembuat keputusan tentang prinsip dan prioritas perlindungan anak; dan
12. Memperkuat kemampuan sektor kemanusiaan lainnya untuk melindungi anak.

Tujuh Standar Minimum untuk Program Pelindungan Anak dalam Tanggap Darurat adalah:

1. **Menerapkan pendekatan sosio-ekologis untuk program perlindungan anak.** Anak-anak, keluarga, komunitas dan masyarakat didukung untuk melindungi dan mengasuh anak-anak. Pendekatan 'sosio-ekologis' untuk perlindungan anak merancang

pendekatan terpadu yang bekerja sama dengan anak, keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka, serta dengan norma-norma sosio-budaya.

2. **Kegiatan kelompok untuk kesejahteraan anak,** dimana anak didukung melalui akses ke kegiatan berbasis kelompok dan terencana yang (a) mempromosikan perlindungan, kesejahteraan dan pembelajaran dan (b) disampaikan dengan pendekatan yang aman, inklusif, kontekstual dan sesuai usia. Keterlibatan rutin dan konsisten anak-anak dalam kegiatan kelompok dapat berdampak positif pada kesejahteraan anak, meningkatkan ketahanan anak, dan mengurangi stres anak. Kegiatan semacam itu mempromosikan perlindungan dengan menyediakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan mengekspresikan diri, mengidentifikasi anak-anak yang rentan atau mengalami bahaya perlindungan anak, dan mendukung tindak lanjut penanganan dan rujukan yang sesuai untuk anak-anak yang rentan atau mengalami masalah perlindungan anak tersebut.
3. **Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan oleh orang tua/ keluarga.** Lingkungan keluarga dan pengasuhan diperkuat untuk mendorong perkembangan anak yang sehat dan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan efek negatif lainnya dari kesulitan. Intervensi sering kali berfokus pada peningkatan kesehatan mental pengasuh dan kesejahteraan psikososial serta memperkuat perilaku pengasuhan dan perlindungan terhadap anak.
4. **Pendekatan di tingkat komunitas,** dimana anak hidup dalam komunitas yang mempromosikan kesejahteraan mereka dan mencegah perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak sebelum, selama dan setelah krisis kemanusiaan. Pendekatan

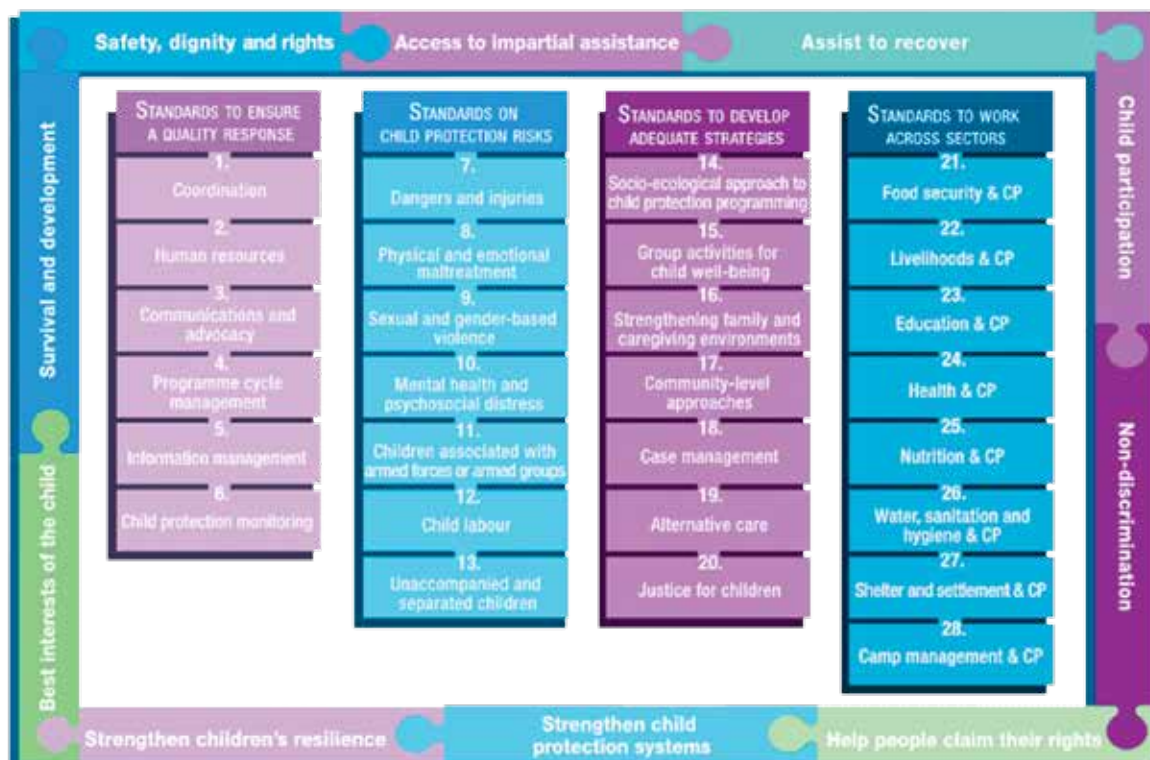


tingkat komunitas mendukung anggota komunitas untuk melindungi anak-anak dan memastikan serta memaksimalkan hak anak atas perkembangan yang sehat. Pekerja kemanusiaan harus berusaha untuk memahami kapasitas komunitas yang mendukung hak-hak anak, melindungi anak, mempromosikan perkembangan, kesejahteraan dan partisipasi anak.

5. **Manajemen kasus.** Anak-anak dan keluarga yang menghadapi masalah perlindungan anak dalam krisis kemanusiaan diidentifikasi dan kebutuhan mereka ditangani melalui proses manajemen kasus individual, termasuk dukungan langsung secara individual dan rujukan ke penyedia layanan yang relevan. Manajemen kasus adalah pendekatan untuk menangani kebutuhan individu anak yang berisiko mengalami kekerasan atau yang telah mengalami bahaya.

6. **Pengasuhan alternatif.** Semua anak yang tanpa orang tua yang mengasuh dan melindungi anak menerima pengasuhan alternatif sesuai dengan hak, kebutuhan khusus, keinginan dan kepentingan terbaik anak, dengan memprioritaskan pengasuhan berbasis keluarga dan mengelola pengasuhan yang stabil. 'Pengasuhan alternatif' adalah pengasuhan yang diberikan kepada anak-anak oleh pengasuh yang bukan orang tua kandung atau pengasuh utama anak.
7. **Keadilan bagi anak-anak.** Semua anak yang berhubungan dengan sistem peradilan formal dan informal selama krisis kemanusiaan diperlakukan dengan cara yang ramah anak, non-diskriminatif sejalan dengan norma dan standar internasional dan menerima layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

MINIMUM STANDARDS FOR CHILD PROTECTION IN HUMANITARIAN ACTION



4 Pilar Standar Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan

1. Standar-standar untuk memastikan respons perlindungan anak yang berkualitas
2. Standar untuk mengatasi kebutuhan perlindungan anak
3. Standar untuk mengembangkan perlindungan anak yang memadai
4. Standar untuk mengarusutamakan perlindungan anak dalam sector kemanusiaan lain

28 Standar

Standar-standar untuk memastikan respons perlindungan anak yang berkualitas

1. Koordinasi
2. Sumber daya manusia
3. Komunikasi, advokasi dan media
4. Manajemen siklus program
5. Manajemen informasi
6. Monitoring perlindungan anak
7. Standar untuk Mengatasi Kebutuhan Perlindungan Anak
8. Bahaya dan cedera
9. Perlakuan salah secara fisik dan emosional
10. Kekerasan seksual berbasis gender
11. Tekanan psikososial dan gangguan jiwa
12. Anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata
13. Pekerja anak
14. Anak-anak terpisah dari orang tua atau tanpa pendamping

15. Standar untuk Mengembangkan Strategi Perlindungan Anak
16. Pendekatan program sosio-ekologi dan perlindungan anak
17. Kegiatan kelompok untuk kesejahteraan anak
18. Penguatan lingkungan keluarga dan pendamping anak
19. Pendekatan berbasis masyarakat
20. Manajemen kasus
21. Perawatan alternatif
22. Peradilan Anak
23. Standar untuk Mengarusutamakan Perlindungan Anak dalam Sektor Kemanusiaan Lain
24. Keamanan Pangan dan perlindungan anak
25. Pemulihan Ekonomi dan perlindungan anak
26. Pendidikan dan perlindungan anak
27. Kesehatan dan perlindungan anak
28. Nutrisi dan perlindungan anak
29. Air bersih, sanitasi dan kebersihan diri dan perlindungan anak
30. Hunian sementara dan perlindungan anak
31. Manajemen kamp dan perlindungan anak

RUJUKAN PUSTAKA DAN BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094

Buku Pegangan Sphere: <https://spherestandards.org/handbook/editions/>



CATATAN

KONSEP DASAR DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL

7

Dalam situasi darurat anak-anak dapat mengalami tekanan. Anak dapat mengalami kesulitan dalam mengatasi pengalaman sulit karena keterbatasan pengalaman hidup, keterampilan penyelesaian masalah, dan kemampuan mengekspresikan perasaan maupun mengutarakan kebutuhannya. Seringkali anak juga mendapatkan perlakuan yang salah dari orangtua maupun orang dewasa yang berada di sekitarnya. Situasi penuh tekanan seperti ini dapat menimbulkan perubahan hidup anak dan memunculkan berbagai reaksi yang tampak pada hubungan social, tingkah laku, fisik dan emosi anak. Untuk itulah anak-anak penting mendapatkan pemenuhan kebutuhan psikososial dan kesehatan jiwanya.

Kurangnya informasi yang akurat cenderung menjadi sumber utama keresahan bagi mereka yang terkena dampak situasi darurat dan menciptakan kebingungan dan perasaan tidak aman pada anak-anak. Dukungan yang diberikan harus dapat memfasilitasi kemampuan penyintas anak laki-laki dan anak perempuan untuk bangkit kembali (resiliensi) dan membantu mereka membangun kemampuan mengatasi masalah serupa di masa mendatang. Dukungan inilah yang disebut dengan dukungan psikososial.

Dukungan psikososial menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman adanya hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan social seseorang, dimana kedua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Oleh karena itu, dukungan psikososial berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi (aspek psikologis) dan relasi sosial anak dengan lingkungannya (aspek sosial).

Kondisi darurat dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan sosial jangka pendek dan jangka panjang bagi anak-anak dan pengasuh mereka. Sumber utama penderitaan meliputi:

1. Paparan peristiwa traumatis;
2. Kematian atau perpisahan dengan anggota keluarga;
3. Kurangnya layanan dasar, informasi yang akurat, keselamatan dan keamanan;
4. Perpindahan; dan
5. Sistem dukungan yang lemah dari keluarga maupun komunitas.

Jika kesulitan tidak dikurangi atau dikelola melalui strategi koping negatif (seperti penggunaan narkoba, masalah perilaku atau melukai diri sendiri), anak-anak dan pengasuh dapat mengembangkan kondisi kesehatan mental yang memerlukan dukungan khusus. 'Dukungan



kesehatan mental dan psikososial' (Metal Health Psychosocial Support/MHPSS) mengacu pada semua jenis dukungan yang melindungi atau mempromosikan kesehatan psikososial dan mencegah atau mengobati kondisi kesehatan mental (Pedoman IASC tentang MHPSS dalam Pengaturan Darurat 2007).

Kemampuan anak-anak untuk berhasil mengatasi penderitaan ('ketahanan' mereka) dipengaruhi oleh:

1. Usia mereka, tahap perkembangan dan status disabilitas;
2. Akses mereka ke kebutuhan hidup dan keamanan dasar;
3. Status kesehatan fisik dan mental yang sudah ada sebelumnya dari diri mereka sendiri dan pengasuh mereka;
4. Dukungan emosional dan sosial yang mereka terima dari pengasuh;
5. Dukungan emosional dan sosial yang diterima oleh pengasuh mereka; dan
6. Keseluruhan lingkungan sosial mereka (seperti dukungan masyarakat dan sumber daya material).

DUKUNGAN BERLAPIS

Pada umumnya dalam sebuah populasi yang terkena bencana tidak semua orang akan mengalami gangguan kejiwaan akibat dampak dari bencana. Sebuah perkiraan tentang jumlah orang yang terdampak oleh suatu peristiwa traumatis dibuat oleh seorang psikolog pakar psikososial, Nancy Baron (dalam Poerwandari, dkk, 2006). Ketika suatu peristiwa traumatis dialami oleh seluruh anggota dalam komunitas, kita dapat memperkirakan bahwa dari 100% jumlah individu yang mengalami kejadian traumatis, maka:

1. sekitar 50 – 60% penyintas hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan dapat pulih seiring dengan berjalannya waktu.
2. sekitar 20 – 25% mengalami gejala stres pasca trauma yang bersifat sementara
3. sekitar 10-15% memerlukan dukungan/ intervensi khusus
4. sekitar satu hingga tiga persen (1 – 3%) akan mengalami gangguan mental yang lebih serius sehingga harus dirujuk ke psikiater



PIRAMIDA INTERVENSI LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

1. oleh karena itulah, kunci untuk menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial adalah dengan membangun sistem dukungan berlapis yang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok berbeda, termasuk anak dengan disabilitas. Semua lapisan yang diilustrasikan dalam bentuk piramida intervensi ini penting dan seharusnya dilaksanakan pada saat yang bersamaan.
2. setelah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (makanan, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular) dipenuhi, dan keselamatan dan keamanan telah kembali, sebagian besar anak dan orang dewasa akan kembali berfungsi normal, tanpa dukungan profesional (level 1).
3. anak-anak yang kehilangan dukungan dari keluarga dan masyarakat akan membutuhkan dukungan khusus untuk memulihkan faktor pelindung yang biasanya disediakan oleh keluarga dan masyarakat tadi (level 2).
4. lapis ketiga mewakili dukungan yang dibutuhkan untuk anak-anak dalam jumlah yang lebih sedikit (contohnya anak penyintas kekerasan berbasis gender atau perekrutan kelompok bersenjata) yang juga membutuhkan tindakan yang lebih fokus dari individu, keluarga, atau dari pekerja kemanusiaan yang telah menerima pelatihan dalam pengasuhan khusus. Dalam lapisan ini juga tercakup layanan dukungan psikologis awal, perawatan kesehatan jiwa dasar oleh relawan sosial, dan kegiatan psikososial terstruktur dengan anak-anak atau orang tua (level 3).

5. lapisan teratas piramida (level 4) adalah sebagian kecil populasi yang membutuhkan dukungan ekstra/lanjutan karena tidak dapat menanggung penderitaan mereka dan memiliki kesulitan besar dalam menjalankan fungsi dasar sehari-hari walaupun telah mendapatkan berbagai bentuk dukungan seperti yang telah diuraikan di atas. Anak-anak ini bisa saja telah mengalami gangguan kesehatan jiwa sebelum terjadinya bencana, dan kondisi mereka semakin memburuk karenanya.

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN ANAK, KELUARGA DAN MASYARAKAT:

1. Pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesejahteraan dan pemulihan psikososial adalah dengan memperkuat kemampuan keluarga dan masyarakat untuk saling mendukung. Seperti telah dijelaskan tentang Dukungan Berlapis, tidak semua membutuhkan penanganan dari profesional kesehatan jiwa.
2. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam upaya mendukung pemulihan psikososial komunitasnya sendiri, termasuk pemulihan psikososial anak merupakan hal penting. Ini sangat relevan karena jumlah profesional kesehatan jiwa maupun fasilitas kesehatan jiwa jumlahnya masih belum memadai.
3. Dalam prosesnya, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan harus menjadi mitra aktif orang dewasa dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka – misalnya, dengan terlibat dalam upaya pemulihan, melakukan inisiatif yang mendorong anak-anak yang lebih tua untuk membantu anak-anak yang lebih muda.



Anak usia dini:

1. Dukungan untuk anak usia dini meliputi sejak sebelum kelahiran (sehingga dukungan juga patut di berikan untuk perempuan hamil) sampai ke anak-anak usia sekolah dasar.
2. Lakukan intervensi yang bisa mendorong peningkatan interaksi ibu-bayi dan meningkatkan kemampuan pengasuh dalam melakukan stimulasi psikososial agar dapat meningkatkan tumbuh-kembang anak, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk, sering sakit, dan kelompok lain yang berisiko.
3. semua upaya tersebut dapat diberikan melalui program yang telah ada di masyarakat, seperti dalam program kesehatan ibu dan anak atau posyandu.
4. program anak usia dini harus mudah diakses dan layak untuk penyandang disabilitas serta memperhatikan juga kebutuhan khusus para orang tua/ pengasuh.

Masyarakat:

Untuk menciptakan kembali rutinitas dalam kehidupan anak-anak, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal dapat melibatkan jejaring/pusat seni dan budaya, kelompok pemuda, kelompok perempuan, jejaring tokoh agama dan tokoh masyarakat, tempat pendidikan agama, ruang ramah disabilitas dan ramah anak, kelompok pemuda dan anak-anak, kelompok dukungan orang tua, serta pendidikan formal dan non-formal.

Dukungan kepada pengasuh:

1. Membantu orang tua, kakek/nenek, dan pengasuh lain untuk mengatasi stress yang mereka alami dan membangun kembali kemampuan mereka dalam mengasuh anak sangatlah penting untuk pemulihan psikologis diri mereka sendiri serta bagi anak-anak mereka.

2. beberapa langkah yang bermanfaat untuk mendukung pemulihan bagi para pengasuh antara lain: memastikan pengasuh dapat mengakses informasi mengenai cara mengatasi masalah yang sesuai secara budaya, membangun kesadaran tentang praktik-praktik berbahaya, dan membantu masyarakat untuk melaksanakan upacara berkabung sesuai dengan tradisi setempat.

PRINSIP-PRINSIP DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PADA SITUASI DARURAT:

1. Non diskriminatif.
2. Untuk kepentingan terbaik anak.
3. Melindungi hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.
4. Penghargaan atas pandangan anak.
5. Tidak menyebabkan masyarakat yang terpapar mengalami kondisi yang lebih buruk.
6. Akses terhadap bantuan yang tidak berpihak.
7. Melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka, perlindungan hukum, dan pulih dari dampak kekerasan.
8. Memperkuat sistem perlindungan anak, dan
9. Memperkuat daya tahan anak terhadap berbagai masalah.

KERANGKA SOSIAL EKOLOGI: TIGA TINGKAT DUKUNGAN



Perkembangan dan kesejahteraan optimal anak-anak bergantung pada sejumlah faktor kontekstual termasuk keluarga, komunitas, pengaruh sosial budaya dan politik, serta layanan dan struktur yang mengelilinginya. Faktor-faktor ini telah diartikulasikan melalui berbagai kerangka kerja - teori perkembangan anak, model ekologi sosial dan studi ketahanan anak dalam menghadapi kesulitan - yang semuanya menekankan bahwa anak-anak dan keluarga adalah agen aktif dalam kesejahteraan mereka sendiri dan membawa keterampilan mereka sendiri, aset dan sumber daya untuk mengatasi keadaan darurat. Model ekologi sosial menggambarkan pentingnya jaringan orang dan struktur yang mengelilingi anak-anak, menjaga kesejahteraan mereka dan mendukung perkembangan optimal mereka.

Berdasarkan model ini, anak berada di pusat bersarang di dalam lingkaran konsentris yang terdiri dari keluarga, komunitas dan budaya/masyarakat (lihat gambar). Keluarga terdiri dari lingkaran yang paling dekat dengan anak. Lingkaran ini terdiri dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak, terutama di tahun-tahun awal; biasanya, anggota keluarga yang tinggal bersama seorang anak (misal, orang tua/pengasuh utama, saudara kandung). Ini adalah sumber daya utama untuk pengasuhan dan perlindungan mereka sementara keluarga besar, teman dekat dan teman sebaya, guru dan anggota masyarakat lainnya membentuk tingkatan dukungan dan pengaruh tambahan dalam perkembangan anak. Lingkaran berikutnya terdiri dari penyedia layanan masyarakat dan struktur yang mengelilingi anak dan keluarga. Ini termasuk struktur layanan politik, ekonomi



dan sosial (misal, Kesehatan dan pendidikan), serta lembaga dan struktur untuk budaya dan rekreasi dan kehidupan spiritual/keagamaan. Lingkaran ketiga dan terakhir yang mengelilingi anak, keluarga dan komunitas adalah budaya dan masyarakat. Lingkaran ini mencakup konteks sosial-budaya dan politik yang membentuk nilai-nilai, ekspektasi perilaku dan norma, dan memediasi akses masyarakat ke layanan dan peluang. Model ini lebih jauh menggambarkan faktor risiko dan perlindungan di luar lingkaran konsentris untuk menunjukkan keberadaan dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak di semua tingkatan.

Perkembangan seorang anak dibentuk oleh interaksi antara orang-orang dan unsur-unsur dalam dinamika ekologi sosial yang kaya ini. Model ini menunjukkan anak-anak sebagai agen aktif dalam ekosistem mereka, dalam menghadapi kesulitan dan, pada gilirannya, mempengaruhi keluarga dan komunitas mereka. Lapisan dan jaringan yang ada di dalam dan di antara lingkaran menyediakan kebutuhan sosial dan praktis anak-anak, perlindungan, pembelajaran, kepemilikan dan identitas, dan pemulihan mereka dari peristiwa-peristiwa kritis. Ini adalah cara untuk secara visual mewakili dan mengadvokasi intervensi MHPSS yang melibatkan anak-anak, keluarga dan komunitas pengasuhan yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan positif bagi anak-anak dan keluarga.

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN ANAK

Kesehatan dan ketahanan anak-anak terkait dengan tahap perkembangan mereka. Intervensi MHPSS dalam keadaan darurat harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menjangkau anak-anak pada setiap usia dan tahap perkembangan

dan menyesuaikan program yang relevan dengan kebutuhan mereka pada tahap itu.

PERKEMBANGAN ANAK

Perkembangan anak adalah proses dimana anak tumbuh dan menjadi anggota masyarakat yang sosial dan fungsional. Ketika mereka dewasa, anak-anak memperoleh keterampilan sosial, kemampuan untuk mencintai dan mengembangkan serta mempertahankan hubungan. Mereka belajar keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh kapasitas dan agensi, penalaran kognitif dan strategi koping.

Anak-anak diharapkan untuk mencapai tonggak perkembangan tertentu pada setiap tahap perkembangan - bayi dan anak usia dini, anak dan remaja. Misalnya, keterikatan yang aman dengan pengasuh primer sangat penting untuk perkembangan emosi bayi. Ini memengaruhi rasa aman pribadi dan kemampuan mereka untuk mengelola emosi di kemudian hari. Pengalaman selama masa bayi dan anak usia dini menetapkan fondasi untuk seluruh perjalanan hidup anak. Kesejahteraan dan perkembangan pada usia ini bergantung pada serangkaian faktor yang berinteraksi, seperti sumber daya ekonomi keluarga dan masyarakat, nutrisi dan perawatan kesehatan, dan kualitas hubungan dengan pengasuh. Di masa kanak-kanak menengah (usia sekolah dasar), akses ke pendidikan sangat penting untuk pembelajaran sosial dan emosional (SEL), pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan hubungan teman sebaya yang positif merupakan tonggak perkembangan yang penting bagi anak-anak yang lebih besar dan remaja. Kondisi darurat memiliki potensi untuk mengganggu salah satu atau semua faktor ini, dan inilah mengapa anak-anak (terutama anak-anak kecil) adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam pengaturan kemanusiaan.

Intervensi untuk anak-anak kecil dalam keadaan darurat ditujukan untuk meminimalkan bahaya yang dapat mengganggu perkembangan optimal. Intervensi semacam itu memanfaatkan jendela peluang penting dalam lima tahun pertama kehidupan ketika anak-anak paling siap untuk memperoleh keterampilan baru dan beradaptasi. Intervensi MHPSS dapat mencakup kelompok-kelompok ibu, program stimulasi dan pemberian makan bayi, dan berbagai kegiatan pengembangan anak usia dini (PAUD).

Dalam situasi darurat, pendidikan berperan penting dalam membangun kembali keselamatan dan struktur dalam kehidupan anak-anak usia sekolah dasar. Kegiatan psikososial terorganisir lebih lanjut memberikan peluang untuk kreativitas, permainan, dan pemulihan dari peristiwa yang membuat stres. Strategi intervensi harus mempertimbangkan cara terbaik untuk memasukkan anak-anak dengan cacat fisik dan perkembangan, seperti dengan mempromosikan akses yang sama ke lingkungan belajar dan menyesuaikan kegiatan psikososial terstruktur (olahraga, permainan dan kegiatan kreatif) untuk memastikan partisipasi mereka.

Anak-anak dan remaja yang lebih tua menghadapi tantangan pematangan seksual dan perubahan hubungan sambil mengambil tanggung jawab baru, terutama dalam keadaan darurat. Mereka memiliki kebutuhan khusus untuk perlindungan (misal, Dari kekerasan berbasis gender [GBV], perekrutan dan penggunaan oleh angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, bentuk-bentuk pekerja anak) dan umumnya dengan masalah yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pendidikan. Kegiatan dukungan sebaya dapat melibatkan anak-anak yang lebih tua dan remaja

dalam diskusi tentang isu-isu yang relevan, memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan dan ide-ide mereka dan membantu mereka merealisasikan agensi mereka sendiri melalui kontribusi mereka terhadap upaya pemulihan di komunitas mereka.

KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN ANAK-ANAK

Kesejahteraan menggambarkan keadaan positif saat seseorang tumbuh subur. Pada anak-anak, itu hasil dari interaksi aspek fisik, psikologis, kognitif, emosional, sosial dan spiritual yang mempengaruhi kemampuan anak untuk tumbuh, belajar dan berkembang hingga potensi penuh mereka. Dalam pekerjaan MHPSS, kesejahteraan umumnya dipahami dalam tiga domain:

1. **KESEHATAN PRIBADI:** Pikiran dan emosi positif seperti harapan, ketenangan, harga diri, dan kepercayaan diri.
2. **SUMBER INTERPERSONAL:** Memupuk hubungan, rasa memiliki, kemampuan untuk menjadi dekat dengan orang lain.
3. **KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN:** Kemampuan untuk belajar, membuat keputusan positif, merespons tantangan hidup secara efektif dan mengekspresikan diri.

Ketahanan adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan beradaptasi setelah mengalami kesulitan. Ketahanan anak-anak dalam keadaan darurat dihasilkan dari kekuatan dan kapasitas bawaan mereka untuk mengatasi dan faktor risiko dan perlindungan di lingkungan sosial dan budaya mereka. Ini mungkin termasuk faktor pribadi (kepribadian, susunan genetik, ada atau tidak adanya cacat fisik atau perkembangan); faktor sosial (lingkungan keluarga positif atau negatif, dukungan guru, pertemanan positif);



dan faktor lingkungan (akses ke layanan dan perlindungan penting, keselamatan lingkungan mereka, inklusi dan menjadi bagian dari masyarakat).

Kerentanan anak-anak meningkat dengan paparan risiko, terutama jika mereka tidak memiliki faktor pelindung, seperti keterampilan pemecahan masalah, pengasuh yang peduli atau akses ke layanan dan keamanan dasar. Strategi intervensi MHPSS yang efektif bekerja untuk mengurangi risiko dan memperkuat faktor pelindung. Ini termasuk membangun kapasitas mengatasi anak-anak secara langsung, serta dukungan sosial dan layanan dalam lingkungan pengasuhan mereka. Ini juga mencakup memberikan mereka keamanan, stabilitas, dan pengasuhan:

1. **KEAMANAN:** Sejauh mana seorang anak aman dan bebas dari rasa takut dan bahaya (baik fisik dan psikologis) dalam hubungan mereka dan lingkungan fisik mereka.

2. **STABILITAS:** Tingkat kepastian dan konsistensi dalam lingkungan sosial, emosional dan fisik mereka.

3. **PENGASUHAN:** Sejauh mana orang tua dan pengasuh tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan remaja secara sensitif dan konsisten.

Dalam situasi darurat, kehadiran pengasuh orang dewasa yang stabil membantu perasaan kesejahteraan anak-anak, dan membangun kembali rutinitas meningkatkan kemampuan dan pemulihan mereka. Namun, pengasuh juga dipengaruhi oleh keadaan darurat, yang dapat mengancam kemampuan mereka untuk menawarkan keamanan, stabilitas, dan pengasuhan. Oleh karena itu intervensi MHPSS mempromosikan kesejahteraan pengasuh sehingga mereka dapat memberikan rasa aman, stabilitas dan normalitas kepada anak-anak, membantu memulihkan atau mempertahankan proses perkembangan.

CATATAN

DUKUNGAN PSIKOLOGIS AWAL

8

DPA – DUKUNGAN PSIKOLOGIS AWAL

Merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam durasi singkat kepada seseorang/anak yang baru saja mengalami bencana, krisis dan keadaan darurat untuk membantu keadaan pada saat itu.

Menurut Sphere (2011) dan IASC (2007), Dukungan Psikososial Awal (DPA) menggambarkan respons manusiawi dan suportif terhadap sesama manusia yang menderita dan yang mungkin membutuhkan dukungan. Dasar-dasar DPA sebagai berikut:

1. Memberikan perawatan dan dukungan praktis, yang tidak mengganggu;
2. Menilai kebutuhan dan masalah;
3. Membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar (misalnya, makanan dan air, informasi);
4. Mendengarkan orang, tetapi tidak menekan mereka untuk berbicara;
5. Menghibur orang dan membantu mereka merasa tenang;
6. Membantu orang terhubung dengan informasi, layanan, dan dukungan sosial;
7. Melindungi orang dari bahaya lebih lanjut.

Penting juga untuk memahami apa yang bukan dimaksud DPA:

1. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para profesional.
2. Ini bukan konseling profesional.
3. Ini bukan “tanya jawab psikologis” karena DPA tidak harus melibatkan

diskusi rinci tentang peristiwa yang menyebabkan kesusahan.

4. Tidak meminta seseorang untuk menganalisis apa yang terjadi pada mereka atau mengatur waktu dan kejadian.
5. Meskipun DPA melibatkan kesediaan untuk mendengarkan cerita orang, ini bukan tentang menekan orang untuk memberi tahu Anda perasaan dan reaksi mereka terhadap suatu peristiwa.

DPA adalah alternatif untuk “tanya jawab psikologis” yang telah ditemukan tidak efektif. Sebaliknya, DPA melibatkan faktor-faktor yang tampaknya paling membantu pemulihan jangka panjang masyarakat (menurut berbagai penelitian dan konsensus dari banyak pekerja kemanusiaan). Ini termasuk:

1. Merasa aman, terhubung dengan orang lain, tenang dan penuh harapan;
2. Memiliki akses ke dukungan sosial, fisik, dan emosional; dan
3. Merasa mampu membantu diri mereka sendiri, sebagai individu dan komunitas.

DPA: SIAPA, KAPAN DAN DI MANA?

Untuk siapa DPA?

DPA adalah untuk orang-orang yang mengalami depresi yang baru-baru ini terpapar pada peristiwa bencana yang serius. Anda dapat memberikan bantuan kepada anak-anak dan orang dewasa. Namun, tidak semua orang yang mengalami peristiwa bencana akan membutuhkan atau



menginginkan DPA. Jangan memaksakan bantuan pada orang yang tidak menginginkannya, tetapi sediakan diri Anda dengan mudah bagi mereka yang mungkin menginginkan dukungan.

Mungkin ada situasi ketika seseorang membutuhkan dukungan lebih lanjut daripada DPA saja. Ketahui batasan Anda dan dapatkan bantuan dari orang lain, seperti tenaga medis (jika tersedia), kolega Anda atau orang lain di daerah itu, otoritas setempat, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam kotak berikut ini kami telah mendaftar orang-orang yang membutuhkan dukungan lanjutan yang lebih cepat. Orang-orang dalam situasi ini memerlukan bantuan medis atau lainnya sebagai prioritas untuk menyelamatkan hidup.

Orang-orang yang membutuhkan lebih banyak dukungan tingkat lanjut:

1. Orang dengan cedera serius yang mengancam jiwa yang membutuhkan perawatan darurat medis
2. Orang-orang yang sangat kesal sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri atau anak-anak mereka
3. Orang yang mungkin melukai dirinya sendiri
4. Orang yang mungkin melukai orang lain

Kapan DPA disediakan?

Meskipun orang mungkin membutuhkan akses untuk membantu dan mendukung untuk waktu yang lama setelah suatu peristiwa, DPA bertujuan untuk membantu orang-orang yang baru saja terkena dampak peristiwa bencana. Anda dapat memberikan DPA saat pertama kali berhubungan dengan orang-orang yang sangat tertekan. Ini biasanya selama atau segera setelah suatu peristiwa. Namun, kadang-kadang mungkin sehari-hari atau berminggu-minggu setelah-

nya, tergantung pada berapa lama peristiwa tersebut berlangsung dan seberapa parah kejadiannya.

Di mana DPA disediakan?

Anda dapat menawarkan DPA di mana pun itu cukup aman bagi Anda untuk melakukannya. Ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti di lokasi kecelakaan, atau tempat-tempat di mana orang-orang yang tertekan dilayani, seperti pusat kesehatan, tempat penampungan atau kamp, sekolah dan tempat distribusi untuk makanan atau jenis bantuan lainnya. Idealnya, cobalah memberikan DPA di mana Anda dapat memiliki privasi untuk berbicara dengan orang tersebut jika perlu. Bagi orang yang telah terpapar pada jenis peristiwa krisis tertentu, seperti kekerasan seksual, privasi sangat penting untuk kerahasiaan dan untuk menghormati martabat orang tersebut.

SIAPA SAJA YANG DAPAT MEMBERIKAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL AWAL?

Dukungan Psikososial Awal dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapa saja, karena bersifat umum dan sederhana, dan bukan merupakan tindakan penanganan profesional.

DPA bertujuan untuk:

1. Mengurangi tingkat stres yang dialami, dan
2. Memperkuat daya adaptasi alami

Sehingga bisa mencegah dampak gangguan yang lebih parah dan membantu proses pemulihan alami.

Ingat DPA bukan:

1. Terapi atau bantuan profesional.
2. Tidak ditujukan untuk menyembuhkan atau menghilangkan gangguan psikologis, trauma.
3. Memaksa anak untuk berbicara atau menceritakan sebuah kejadian.
4. Mendalami reaksi-reaksi yang terjadi.

Mengapa Perlu DPA untuk Anak-Anak ?

1. Anak-anak berpikir dan bereaksi berbeda dengan orang dewasa
2. Memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan umur mereka
3. Rentan terhadap dampak lebih lanjut karena ukuran fisik mereka dan kedekatan mereka secara sosial dan emosional pada pengasuh

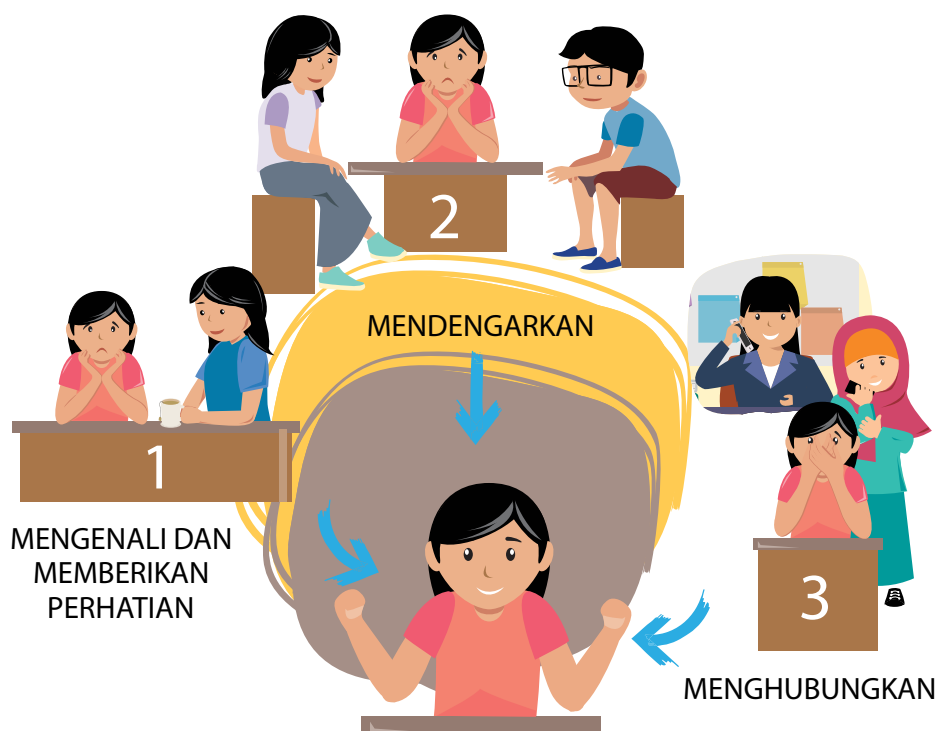
Prinsip-prinsip dalam Memberikan DPA

1. Menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas
2. Mendengarkan pendapat dan perasaan anak – anak untuk ikut terlibat dalam memutuskan.
3. Membangun resiliensi anak.

Langkah-langkah Melakukan Dukungan Psikososial Awal:

1. Penuhi Kebutuhan yang Mendesak
2. **MELIHAT** kondisi keselamatan dan keamanan anak, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus harus diprioritaskan.
3. **MENDENGARKAN**: Perasaan anak, pendapat anak, apa yang diinginkan anak.
4. Terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan anak.
5. **MENGHUBUNGKAN** - Bantu dengan langkah lebih lanjut agar anak mendapat pertolongan yang dibutuhkannya

LANGKAH INTI DPA



MENDENGARKAN

Cara menjadi Pendengar yang Baik:

1. Tidak menyela pembicaraan. Hindari terlalu banyak bicara, beri kesempatan anak untuk bicara
2. Menunda memberikan penilaian, kritik, nasehat
3. Menunjukkan perhatian yang tulus dan penuh, dengarkan dengan kontak mata yang lembut, jangan sibuk sendiri.
4. Bersikap tenang dan berempati
5. Memberikan respon yang memperlihatkan bahwa anda mendengarkan.

Cara mendorong anak untuk berbicara

1. Penting sekali dalam membangun kesan pertama
2. Ciptakan suasana yang hangat
3. Bersikaplah jujur, tulus dan tidak dibuat-buat
4. Tatap wajah lawan bicara dengan lembut dan tatap matanya sesekali
5. Selalu berusaha untuk memahami anak baik verbal maupun nonverbal
6. Mendengarkan aktif

Terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan anak

Pahami konsep ini:

Tidak pernah ada perasaan yang salah. Perasaan tidak mengikuti alur logika, sehingga tidak pernah bisa salah atau benar.

HUBUNGKAN – MEMBANTU ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERTOLONGAN

1. Bantu anak dan keluarga untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan.
2. Memberikan informasi
3. Memastikan anak dan keluarga dalam kondisi aman dan tenang
4. Mengarahkan anak atau keluarga untuk memperoleh akses layanan sesuai kebutuhan.
5. Apabila menemui anak yang di luar kapasitas untuk dibantu, segera hubungi tenaga kesehatan profesional.

Dukungan Psikologi Awal menggambarkan respons pertama yang manusiawi dan suportif yang cocok untuk anak-anak dan orang dewasa yang mengalami krisis. Ini mendukung pemulihan jangka panjang dengan membantu individu untuk:

1. Merasa aman, terhubung, tenang dan penuh harapan;
2. Akses dukungan sosial, fisik, dan emosional; dan
3. Merasa mampu membantu diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

Dukungan Psikologi Awal dapat dipelajari dan disediakan oleh semua anak, anggota masyarakat, peksos dan relawan kemanusiaan.

Do's (Yang Harus Dilakukan)	Don't (Tidak Boleh Dilakukan)
1. Jujurlah dan dapat dipercaya. 2. Hormati hak orang untuk membuat keputusan sendiri. 3. Waspada dan sisihkan bias dan prasangka Anda sendiri. 4. Jelaskan kepada orang-orang bahwa bahkan jika mereka menolak bantuan sekarang, mereka masih dapat mengakses bantuan di masa depan. 5. Hormati privasi dan jaga kerahasiaan cerita orang tersebut, jika ini sesuai. 6. Berperilaku semestinya dengan mempertimbangkan budaya, usia, dan jenis kelamin orang tersebut.	1. Jangan memanfaatkan hubungan Anda sebagai penolong. 2. Jangan meminta uang atau hadiah kepada orang yang membutuhkan untuk membantu mereka. 3. Jangan membuat janji palsu atau memberikan informasi palsu. 4. Jangan melebih-lebihkan keterampilan Anda. 5. Jangan paksakan bantuan pada orang, dan jangan mengganggu atau memaksa. 6. Jangan menekan orang untuk menceritakan kisah mereka kepada Anda. 7. Jangan berbagi cerita orang tersebut dengan orang lain. 8. Jangan menilai orang tersebut atas tindakan atau perasaan mereka.

CATATAN



9

PENGEMBANGAN PROGRAM DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

OPERASIONALISASI DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL BERBASIS MASYARAKAT:

Kerangka kerja intervensi MHPSS membantu untuk mengaktifkan dan memulihkan dukungan alami dalam sistem perawatan masyarakat dan keluarga; sesuatu yang penting dalam masa darurat maupun ketika masyarakat transisi dari darurat ke pemulihan. Berdasarkan model ekologi sosial, kerangka kerja MHPSS berbasis komunitas menggunakan pendekatan tiga tingkat yang melibatkan keluarga/pengasuh, komunitas dan masyarakat. Pendekatan ini menguraikan cara-cara praktis bagi para praktisi untuk mengimplementasikan intervensi MHPSS dari masing-masing tingkatan, yang sesuai, melintasi empat lapisan piramida MHPSS IASC. Intervensi untuk setiap tingkatan harus lebih lanjut tertanam dalam konteks budaya dan sosial yang unik dari beragam situasi darurat.

Intervensi dapat secara luas menggabungkan pendekatan untuk kesejahteraan anak dan keluarga di berbagai tingkatan dan lapisan piramida. Atau, mereka dapat menekankan bidang tertentu, seperti peluang untuk pengasuhan terfokus oleh dan untuk guru, atau untuk memperkuat jaringan dukungan keluarga/pengasuh. Beta-papun luas atau terfokusnya program MHPSS,

penting untuk diingat bahwa lapisan dan tingkatan kerangka kerja operasional adalah dinamis dan saling terkait.

Mengatasi berbagai kebutuhan secara efektif membutuhkan perhatian pada semua tingkatan dan lapisan piramida, dan memadukannya. Sebagai contoh, suatu intervensi yang dirancang untuk bekerja terutama pada lapisan piramida 2 juga harus mempertimbangkan bagaimana mengidentifikasi dan merujuk anak-anak dan keluarga yang rentan untuk perawatan terfokus (layer 3) atau perawatan khusus (layer 4). Demikian pula, intervensi yang menawarkan dukungan terfokus kepada anak-anak yang tertekan di sekolah dapat meningkatkan dampaknya dengan memperkuat kapasitas guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan perawatan yang mendukung di sekolah dan di rumah.

SEMBILAN LINGKARAN DUKUNGAN

Intervensi ditargetkan di tiga tingkatan dukungan (anak, keluarga/pengasuh dan komunitas). Pendekatan ini memperkuat kapasitas bawaan anak-anak, pengasuh dan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan mereka. Tingkat lebih lanjut dioperasionalkan melalui sembilan lingkaran dukungan untuk menciptakan kondisi untuk kesejahteraan anak dan keluarga.

Dukungan terpadu di seluruh lapisan piramida diwakili dalam sembilan lingkaran dukungan. Ini menangani kebutuhan anak-anak dan keluarga untuk kesejahteraan dan keselamatan dalam konteks mereka - mulai dari pemberian layanan dasar dengan cara yang sesuai dengan budaya, hingga penguatan jaringan sosial keluarga dan masyarakat, hingga perawatan terfokus atau khusus bila diperlukan.

CONTOH INTERVENSI DALAM LINGKARAN SEMBILAN DUKUNGAN TERMASUK:

1. Lingkungan Pengasuhan yang Aman di rumah, sekolah dan di masyarakat memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari bahaya, pelecehan, penelantaran dan kekerasan, dan bahwa mereka menerima perhatian penuh kasih untuk pemulihan mereka dan dalam memahami dan mengatasi berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka. Intervensi dapat meliputi:
 - Menyiapkan ruang aman, termasuk ruang ramah anak dan bayi (BFS, Baby Friendly Space).
 - Membuat program untuk lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.
 - Mempromosikan kehidupan keluarga yang bebas dari kekerasan dan memberikan dukungan kepada keluarga yang rentan.
2. HUBUNGAN POSITIF dengan pengasuh, teman, guru dan orang lain di masyarakat sangat penting untuk harga diri anak-anak dan rasa berpartisipasi, mendukung perkembangan optimal mereka. Hubungan positif juga memberi anak kesempatan untuk mengekspresikan diri dan rasa memiliki dalam kehidupan mereka. Intervensi dapat meliputi:
 - Kelompok peer-to-peer untuk remaja, klub pemuda untuk kegiatan budaya dan rekreasi.
 - Kegiatan budaya dan ekspresif kelompok untuk anak-anak.
 - Kelompok ibu-bayi.
3. PELUANG UNTUK STIMULASI, PEMBELAJARAN, DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN yang sesuai dengan usia anak dan tahap perkembangan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional seumur hidup. Ini termasuk keterampilan pemecahan masalah, regulasi emosional dan kapasitas untuk membentuk dan memelihara hubungan. Intervensi dapat meliputi:
 - Kegiatan ECD untuk anak-anak yang sangat muda.
 - Membangun kapasitas untuk guru dalam pembelajaran sosial dan emosional.
 - Program untuk membantu remaja mengembangkan keterampilan dan mengakses pelatihan kejuruan.
4. DUKUNGAN UNTUK KESEHATAN ORANG TUA/PENGASUH, COPING DAN PEMULIHAN dalam keadaan sulit termasuk membantu pengasuh di dalam dan di luar sistem keluarga (seperti keluarga besar, guru) untuk memberikan dukungan terbaik bagi anak-anak dalam perawatan mereka. Intervensi dapat meliputi:
 - Perawatan terfokus untuk orang tua/pengasuh yang tertekan, termasuk PFA.
 - Layanan sosial khusus dan/atau perawatan kesehatan jiwa untuk orang tua dengan gangguan MNS.
 - Dukungan untuk kesejahteraan guru dan kemampuan mengatasi masalah.
5. PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UNTUK PENGASUHAN ANAK DAN MENDUKUNG ANAK DI KABUPATEN membantu meningkatkan kualitas pengasuh anak berinteraksi di rumah, sekolah dan di masyarakat. Ini juga membantu pengasuh untuk mengetahui



kan seorang anak mungkin memerlukan rujukan untuk dukungan yang lebih khusus. Intervensi dapat meliputi:

- Meningkatkan kesadaran reaksi tertekan anak-anak dalam keadaan darurat, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan.
 - Mempromosikan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang positif di antara pengasuh.
 - Melatih orang tua dan pengasuh lain dalam mendukung anak-anak dengan gangguan MNS.
6. AKSES KE JARINGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT membantu mengembangkan atau membangun kembali jaringan dukungan. Ini membantu memperkuat kepercayaan, saling peduli dan membantu diri sendiri untuk mendukung anak-anak dan keluarga, termasuk keluarga yang rentan. Intervensi dapat meliputi:
- Mengadakan kelompok dukungan untuk orang tua dan untuk wanita dan pria secara terpisah.
 - Memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi keluarga rentan dalam kegiatan bersama.
7. KEBUTUHAN KESEHATAN ANAK DAN PERLUASAN KELUARGA DAN KEBUTUHAN PERLINDUNGAN membantu memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan positif dengan memberikan informasi yang jelas tentang kebutuhan anak-anak dan cara memenuhinya. Intervensi dapat meliputi:
- Kampanye pengurangan stigma untuk orang dengan gangguan MNS.
 - Olah pesan perlindungan anak.
8. AKTIVASI DUKUNGAN MASYARAKAT SECARA ALAMI untuk kesejahteraan anak dan keluarga serta memperkuat sumber daya masyarakat untuk mendukung anak-anak dan keluarga. Intervensi dapat meliputi:

- Keterlibatan dan dukungan untuk organisasi masyarakat melalui komunikasi untuk kegiatan pembangunan, seperti kelompok perempuan, untuk membangun kapasitas dan menjangkau keluarga rentan.
- Dukungan kepada tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, dalam mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

9. MEMPERKUAT SISTEM PENGASUHAN UNTUK ANAK-ANAK DAN KELUARGA termasuk pengembangan kapasitas dalam pelayanan sosial, pendidikan, perlindungan dan sistem kesehatan, yang melindungi anak-anak dan keluarga mempromosikan kesejahteraan mereka. Intervensi dapat meliputi:

- Melatih staf profesional dan awam serta sukarelawan dalam perawatan MHPSS terkoordinasi untuk anak-anak dan keluarga.
- Mendukung pengembangan sistem rujukan fungsional untuk anak-anak dengan risiko perlindungan atau gangguan MNS.

PSIKOSOSIAL

Istilah psikososial seringkali disebut-sebut untuk menjelaskan bahwa tidak hanya faktor psikologis saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemulihan. Faktor sosial yang berubah akibat bencana atau konflik pun menjadi fokus yang sangat penting untuk dapat menjelaskan secara utuh bagaimana bencana atau konflik dapat berdampak pada setiap tingkatan (dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat).

Pengertian psikososial itu secara harafiah terdiri atas kata **psiko** dan **sosial** adalah:

1. **Psiko** berarti keadaan pikiran dan jiwa seseorang. Keadaan ini mencakup berbagai aspek seperti perasaan,

pemikiran, keyakinan dan kepercayaan, sikap dan nilai-nilai yang dimilikinya.

2. **Sosial** berarti hubungan seseorang dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Hubungan ini mencakup interaksi (hubungan) dia dengan orang lain, sikap dan nilai-nilai sosial yang dimiliki (budaya) dan pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, sekolah dan komunitas

Kata “**psikososial**” juga menerangkan hubungan yang dinamis antara efek-efek psikologis dan sosial, di mana masing-masing terus-menerus saling mempengaruhi. Sementara itu “**efek-efek psikologis**” adalah dampak-dampak yang terlihat dalam perubahan emosi (perasaan), kemampuan untuk belajar, persepsi, pemahaman, cara berpikir, dan cara bertindak laku.

Secara operasional, kegiatan-kegiatan dukungan psikososial adalah kegiatan yang menjawab kebutuhan psikologis dan sosial dari individu dan masyarakat.

Kegiatan dukungan psikososial berusaha memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan yang dapat mendorong interaksi aspek psikologis (pikiran, perasaan dan perilaku) dengan lingkungan sosial (budaya, nilai norma dsb) secara lebih positif.

Dukungan psikososial dapat diberikan dalam berbagai bentuk kegiatan dan program, namun perlu diingat bahwa segala bentuk interaksi positif dengan anak berpotensi untuk memulihkan anak/ penyintas bencana secara psikologis.

Hal ini penting untuk dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam respons

bencana, baik yang bekerja langsung dengan anak maupun tidak langsung. Sebagai contoh, walaupun sedang tidak melakukan pekerjaannya sebagai pendamping anak, bersikap ramah, bersahabat, menghargai, menunjukkan sikap yang positif, dan memberikan perhatian kecil pada anak adalah berbagai hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dan harga diri anak.

Dukungan psikososial tidak hanya berarti bekerja dengan anak, tetapi juga dengan orang tua, warga sekitar, dan organisasi lain untuk membantu anak memperoleh akses terhadap pelayanan dasar yang perlu mereka dapatkan, seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, sanitasi yang baik, dll.

MENGAPA DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PENTING

Bentuk bantuan yang diberikan pada masa darurat bencana umumnya adalah bantuan kebutuhan fisik dan praktis (makanan, minuman, pakaian, mainan, buku, dan lain-lain). Bantuan semacam itu memang sangat penting, karena kebutuhan fisik dan praktis haruslah dipenuhi pada masa darurat bencana. Tetapi tidak hanya makanan dan pakaian yang dibutuhkan anak. Kebutuhan psikologis anak seperti kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian, memiliki harapan, percaya diri dan perasaan berharga juga penting untuk dapat terpenuhi.

Kebutuhan-kebutuhan ini sangat tergantung pada hubungan yang dimiliki seorang anak dengan keluarga, teman, dan orang lain. Kadang-kadang keterkaitan kebutuhan psikologis dan sosial anak ini disebut juga sebagai kebutuhan emosional.



MEMFASILITASI PERMAINAN, PENGASUHAN DAN DUKUNGAN SOSIAL

Variasi aktivitas bagi ECD harus disediakan dalam situasi darurat. Aktivitas-aktivitas ini dapat meliputi pemberian pendidikan bagi orangtua, kunjungan ke rumah, aktivitas kelompok yang dapat berbagi mengenai pengasuhan dan permainan untuk anak, penyediaan 'tempat yang aman' (*'safe spaces'*), perpustakaan mainan dan kegiatan perkumpulan informal bagi orangtua di tempat yang aman.

1. Mengatur kesempatan yang tepat bagi penduduk setempat untuk terlibat aktif dalam permainan, stimulasi dan sosialisasi. Hal ini mungkin dapat membantu untuk meringankan dampak psikososial yang negatif dari situasi kritis.
2. Mengatur aktivitas-aktivitas berdasarkan umur, jenis kelamin dan budaya anak. Untuk meminimalkan distress, aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan rutinitas mereka atau kehidupan sehari-hari mereka (contoh: anak yang berasal dari latar belakang nomaden (tempat tinggal berpindah-pindah) mungkin akan merasakan bahwa pendidikan formal tidak biasa dan tidak membuat mereka merasa nyaman). Pada perencanaan dan implementasi program, gunakan pendekatan yang relevan dengan budaya, seperti ritual pembacaan cerita, yang mungkin lebih tepat dila dibanding dengan model pengembangan barat (*western*).
3. Melakukan aktivitas di tempat yang aman, khususnya untuk anak yang masih sangat kecil. Jika kondisinya memungkinkan, buat aktivitas kelompok berdasarkan usia atau tahap perkembangan anak: 0-12/18 bulan (pre-verbal, belum dapat berjalan), 12/18-3 tahun, dan 3-6 tahun (aktivitas untuk anak 6-8 tahun). Latih orangtua, kakek dan nenek serta kakak/adik untuk bekerja bersama dengan staf yang ada dan mempelajari apa yang dapat dilakukan di rumah yang dapat mendukung perkembangan yang sehat dari anak. Pertimbangkan untuk mengajak wanita yang sudah lebih tua dan wanita muda yang dapat dipercaya untuk menjadi sukarelawan di tempat yang aman (*safe spaces*).
4. Mempertimbangkan untuk menggunakan permainan, lagu dan tarian yang sudah diketahui serta mainan buatan rumah (*home-made toys*), karena hal-hal ini lah yang paling mungkin untuk dilakukan dalam situasi darurat.
5. Menyiapkan area bagi pengasuh dan anak untuk dapat bermain dan berinteraksi pada setiap pelayanan yang diberikan untuk anak, seperti pada program pemberian makan secara *terapeutik*, pada rumah sakit dan klinik, dan juga pada area distribusi makanan dan barang yang bukan makanan.
6. Memfasilitasi aktivitas untuk anak dengan mengutamakan pembangunan komunitas sosial dan aksi tanpa kekerasan pada komunitas yang terkena dampak kekerasan.
7. Melibatkan anak dengan kebutuhan khusus pada aktivitas perawatan, dengan permainan dan dukungan sosial pada tingkat komunitas.
8. Untuk panduan spesifik dalam menstimulasi anak yang masih kecil dalam situasi krisis makanan, lihat WHO (2005) yang direferensikan didalam Bahan rujukan.

PERAWATAN UNTUK PARA PENGASUH

Pada situasi darurat, penting untuk membuat pertemuan di mana para pengasuh bagi anak-anak yang masih sangat kecil dapat mendiskusikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, dapat berbagi cara penyelesaian masalah dan dapat saling mendukung satu sama lain dalam memberikan cara pengasuhan yang efektif untuk anak mereka.

1. Pada tempat yang aman buat kelompok dukungan di mana orangtua/ibu dapat berbicara tentang penderitaan mereka sendiri.
2. Berikan masukan pada orangtua untuk tidak membicarakan hal-hal detil dari kejadian yang menakutkan di depan anak mereka atau bahkan membicarakan kejadian tersebut dengan anak mereka.
3. Selama aktivitas kelompok kecil yang melibatkan keluarga dan anaknya, orangtua memiliki kesempatan untuk belajar dari interaksi orangtua lain dengan anak mereka. Saat interaksi yang positif antara orangtua dan anak terjadi, angkat hal ini, kemudian dorong orangtua yang lain untuk berinteraksi dengan anak mereka menggunakan sikap yang serupa.
4. Bantu orangtua dan pengasuh untuk memahami perbedaan yang mungkin mereka lihat pada anak mereka setelah krisis terjadi. Jelaskan bahwa tingkah laku tersebut, misalnya sangat ketakutan dengan orang lain, menarik diri, atau menjadi lebih sering terlibat perkelahian dengan anak lain, adalah reaksi yang umum terjadi terhadap stres dan bukan merupakan kesalahan dari pengasuh.
5. Berikan informasi pada orangtua dan pengasuh mengenai bagaimana caranya mengidentifikasi masalah dan memberikan dukungan kesehatan

psikososial untuk anak mereka, termasuk bagaimana caranya untuk mengontrol, mengurangi, dan mengubah tingkah laku agresif anak lewat cara pendisiplinan yang konsisten dan waktu yang terbatas.

6. Identifikasi sejumlah respon terhadap stres anak yang mungkin menyakiti, seperti memukul, mengacuhkan atau memberikan stigma, selanjutnya berikan saran alternatif strategi kepada orangtua dan pemimpin masyarakat.
7. Orangtua yang mengalami kesulitan dalam merawat anaknya karena adanya masalah kesehatan jiwa yang berat harus dirujuk untuk mendapatkan bantuan yang tepat dari staf pelayanan kesehatan (yang sudah terlatih dalam perawatan kesehatan jiwa; lihat Lembar Aksi 6.2). Khususnya, depresi yang parah sehingga dapat mempengaruhi kemampuan orangtua untuk merawat anaknya.

CONTOH LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL SAAT BENCANA

Tujuan:

1. Penyelamatan dan penciptaan rasa aman bagi para penyintas
2. Pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan khusus dan hal-hal mendesak yang harus segera dipenuhi
3. Pengurangan reaksi-reaksi emosional yang tidak menyenangkan [cemas, takut, sedih, khawatir dan sejenisnya]
4. Pengkondisian untuk mengembalikan ke situasi normal dan rutinitas

Bentuk Kegiatan:

1. penjajakan kebutuhan psikososial
2. pertolongan pertama psikologis [*psychological first aid* atau PFA]
3. percakapan yang menenangkan
4. kegiatan rekreasional
5. kelompok dukungan



CONTOH LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PASCA BENCANA

Tujuan:

1. Keberlanjutan dari empat tujuan di fase saat bencana
2. Pengkondisian untuk *resettlement* [penempatan kembali] di lokasi asal atau di lokasi yang baru

Bentuk Kegiatan:

1. konseling
2. kegiatan keagamaan
3. kegiatan rekreasi
4. kegiatan olah raga
5. kelompok dukungan

PRINSIP PERMAINAN DAN PEMBELAJARAN SEBAGAI DUKUNGAN PSIKOSOSIAL:

1. Tidak ada benar atau salah dalam cara anak-anak tampil dalam permainan dan kegiatan.
2. Proses menemukan dan mengenal berbagai hal harus ditekankan.
3. Hasilnya tidak penting. Proses, aktivitas itu sendiri adalah yang terpenting.
4. Anak perlu didengarkan dan diamati dengan cermat, dan kita perlu menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan dan perilaku anak.
5. Anak-anak harus diberi kesempatan, tetapi TIDAK dipaksa, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.
6. Perbedaan individu diidentifikasi dan dihormati.
7. Orang dewasa mendukung, mendorong dan membuat suasana kepercayaan; dia tidak mendesak atau membuat saran tentang bagaimana permainan harus dilakukan.
8. Orang dewasa menunjukkan kegembiraan ketika anak mencapai sesuatu.

9. Orang dewasa menghargai perasaan negatif dan positif anak.
10. Sangat Penting: Silakan tinjau pedoman dasar untuk permainan kooperatif di halaman

MANFAAT INTERVENSI MELALUI BERMAIN DAN AKTIVITAS SENI:

1. Banyak anak yang bisa dihubungi
2. Anak-anak mendapatkan saluran untuk berekspresi
3. Anak-anak mendapat dukungan emosional
4. Anak-anak mendapat kesempatan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok
5. Anak-anak mendapatkan bantuan untuk mendapatkan kembali dan memperkuat rasa identitasnya
6. Permainan berasal dari kehidupan sehari-hari dan dapat dimainkan di mana-mana
7. Permainan menghambat perilaku yang tidak pantas
8. Permainan itu bersifat mendidik
9. Anak belajar dari pengalaman orang lain
10. Anak belajar lebih baik untuk memahami masa sekarang, masa lalu, dan masa depan
11. Anak belajar mengekspresikan emosi yang sulit
12. Anak belajar keterampilan sosial dan komunikasi yang lebih baik
13. Membantu pengasuh mengenali sinyal dan reaksi yang melaluinya anak-anak meminta bantuan.

Ketika memulai proses membangun area bermain yang aman untuk anak-anak dan remaja, ada baiknya untuk menetapkan yang berikut:

1. Pastikan ada ruang khusus yang ditunjuk untuk area bermain. Ini perlu disetujui oleh masyarakat dan harus diberikan

secara bebas, jelas, dan diberikan tanpa batas. Ini akan memastikan bahwa kegiatan sehari-hari dapat terjadi di lokasi yang sama dan Anda dapat mengatur ruang yang didekorasi oleh anak-anak dan remaja, dll

2. Buat Jadwal harian pada kertas dan ditampilkan dengan jelas, memungkinkan anak-anak dan pengasuh mereka untuk melihat kegiatan apa yang ada di berbagai waktu dalam sehari. Ini juga memastikan aspek terstruktur dari kegiatan dan harus dikembangkan dan disesuaikan dengan peningkatan jumlah mata pelajaran sekolah formal di minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang. Mulailah dengan satu minggu penuh kegiatan ketika kegiatan bersekolah belum aktif.
3. Berbagai aktivitas berjalan pada waktu yang bersamaan. Ini memungkinkan Anda menjangkau lebih banyak anak dan usia yang berbeda.
4. Identifikasi individu-individu kunci dalam komunitas yang dapat bertindak sebagai sukarelawan resmi di ruang tersebut. Ini dapat mencakup berbagai individu dengan keterampilan misalnya: ibu, nenek, guru, petugas kesehatan, dll. Mereka harus diberi peran yang jelas (permainan dan kegiatan untuk memimpin) dalam jadwal harian.
5. Sedapat mungkin, gunakan anak-anak dan remaja untuk memimpin beberapa kegiatan sesuai jadwal.
6. Gunakan buku latihan Anda untuk mendokumentasikan berapa banyak anak, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia, yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan setiap hari.
7. Semua barang-barang kegiatan harus dikemas dan diamankan setiap selesai kegiatan.

BEBERAPA KEGIATAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK ADALAH DENGAN:

1. Mendorong anak untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari

Pada keadaan bencana, berbagai peristiwa tidak terduga terjadi yang dapat menakutkan bagi anak. Mendukung anak untuk kembali pada kegiatan rutinnnya sehari-hari sangat membantu untuk mengembalikan keadaan normal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian. Cara umum untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan mengembalikan anak ke sekolah secepat mungkin, karena sekolah merupakan salah satu tempat yang dikenal anak dan karenanya memberikan suasana normal dan rutin bagi anak.

2. Mengembalikan hubungan anak dengan orang lain

Bencana menyebabkan orang tua kurang dapat memusatkan perhatian mereka pada anak dan lebih berfokus pada kegiatan rekonstruksi serta pemenuhan kebutuhan dasar. Anak pun sering kali menjadi enggan bergaul dengan teman-teman karena takut dan atau tidak mau jauh dari orang tua atau juga sebaliknya orang tua takut jauh dari anaknya dan karenanya tidak mau mengirim anak mereka ke sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembalikan interaksi anak dengan orang lain dalam komunitas masyarakat dapat menciptakan rasa kebersamaan, harga diri dan rasa percaya diri anak.



3. Memfasilitasi kegiatan yang mendukung pemulihan yang sesuai dengan budaya

Penting bagi anak untuk dapat memahami apa yang terjadi pada mereka, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, dan mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang masa depan mereka.

Sangatlah penting untuk melakukan hal itu yang sesuai dengan budaya mereka, sehingga dapat diterima atau 'masuk akal' bagi mereka karena pada dasarnya budaya menentukan nilai-nilai apa yang dipegang, dihormati, dan dijunjung bersama.

Budaya berperan penting dalam membentuk identitas dan perasaan memiliki terhadap komunitas. Kegiatan psikososial yang sesuai dengan nilai dan budaya anak diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai tersebut. Para pekerja kemanusiaan yang bekerja dengan anak memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya mereka. 6

Penting bagi pekerja kemanusiaan yang berasal dari luar wilayah untuk menghargai nilai-nilai setempat dan menjaga agar tidak melunturkan nilai budaya yang ada. Bahkan di Indonesia terdapat berbagai macam norma dan praktek-praktek budaya.

4. Meningkatkan Resiliensi (Ketangguhan)

Resiliensi merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk berjuang menghadapi kesulitan yang dihadapi. Resiliensi merupakan sumber kekuatan anak untuk mengatasi kesulitan.

Resiliensi membuat seorang anak mampu bangkit kembali walaupun telah jatuh tertimpa musibah dan mengalami

situasi sulit. Karakteristik anak yang resilien (tangguh) adalah percaya diri, percaya akan kemampuannya membuat perubahan, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah.

Kegiatan untuk meningkatkan hal-hal itu akan mengurangi kerentanan anak akibat situasi sulit dampak dari bencana.

Contoh:

Pertunjukan wayang sudah merupakan tradisi di Jawa. Pasca gempa bumi di Yogyakarta, pertunjukan wayang bermanfaat untuk menyampaikan pesan-pesan dan menjadi sarana ekspresi diri anak.

Sebaliknya, di Aceh sebagai bagian dari respon pasca tsunami, kesenian Aceh seperti tari Saman, seni dongeng PMTOH lebih sesuai untuk ekspresi diri anak di Aceh.

KEGIATAN PENANGANAN PEMULIHAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan psikososial disebut dengan istilah **Intervensi Psikososial**.

Intervensi Psikososial secara umum adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan individu untuk secara efektif dan memuaskan memenuhi tuntutan-tuntutan dalam hidup mereka melalui interaksi dan relasi sosial yang sehat, dan Individu secara efektif menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam permasalahan-permasalahan yang mereka alami dalam hidup, terus berkembang secara psikologis maupun sosial disepanjang rentang kehidupan mereka (*Palestinian Code of Conduct for Psychosocial Interventions, 2001*)

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

1. **Membuat kegiatan-kegiatan rekreasional/bermain:** Adalah penting untuk menciptakan kesempatan untuk kegiatan bermain yang tidak menggunakan kekerasan, berolah raga dan bentuk-bentuk lainnya dari rekreasi. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah usaha membangun area bermain yang aman bagi anak untuk mereka juga berinteraksi dengan teman-temannya yang bebas dari tindak kekerasan dan konflik.
2. **Memfungsikan lagi kegiatan sekolah:** Kegiatan sekolah yang teratur dan bersifat informal akan menjadi prioritas dari tahap pertama dalam keadaan darurat meskipun pada kenyataannya fasilitas dan perlengkapan tidak memadai. Hal ini merupakan salah satu cara yang dipandang penting sekali untuk mengembalikan anak-anak secepatnya ke “situasi normal” dan juga untuk memberikan mereka kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat dengan teman-teman sebaya, yang menuntut pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan hidup yang penting, dan juga membangun kepercayaan diri yang harus terus dipertahankan.
3. **Mempraktekkan kembali kegiatan-kegiatan budaya dan tradisi-tradisi:** Praktek-praktek agama dan kegiatan budaya, termasuk di dalamnya ritual penyembuhan/pemulihan dan segala macam bentuk peringatan/perayaan, membantu komunitas untuk mengembalikan aspek-aspek dan bentuk-bentuk kehidupan yang normal seperti sediakala. Untuk mereka yang harus mengungsi atau menjadi pengungsi, hal ini penting untuk dipertimbangkan, manakala aktivitas-aktivitas dan tradisi-tradisi yang biasa dipraktekkan tidak dimungkinkan lagi oleh kondisi pengungsian. Mempraktekkan kegiatan budaya dan tradisi bisa diumpamakan seperti membuang jangkar ke air supaya

kapal tidak hanyut terbawa ombak, di tengah-ditengah kehidupan yang asing dan mengancam.

4. **Memberikan kesempatan untuk pengungkapan diri:** Memberikan anak-anak kesempatan dan sarana bagi anak dalam menceritakan kisah mereka, didengarkan oleh orang lain dan dihargai perasaannya, merupakan hal yang sangat penting untuk proses pemulihan. Membuat anak-anak tahu bahwa mereka tidak sendirian di dalam ketakutan dan pengalaman buruk mereka, akan membantu mereka untuk mengakui bahwa mereka memiliki rasa takut dan bahwa hal itu wajar sebagai bagian dari diri mereka sebagai manusia biasa. Mengadakan sarana yang baik dan benar untuk anak mengungkapkan rasa dukanya dan masa berkabung bagi mereka yang kehilangan anggota keluarganya, teman, harta milik, kebudayaan, rumah bahkan negara (untuk para pengungsi lintas negara).

Kita sebaiknya berhati-hati, bahwa anak-anak yang mengalami stres/trauma semestinya tidak dipaksa untuk berbicara, menulis atau mengungkapkan melebihi kemampuan atau kesiapan mereka pada saat itu. Seorang anak butuh mengendalikan waktu untuk dirinya sendiri untuk memberikan informasi-informasi mengenai dirinya, dengan tidak mengalami tekanan atau paksaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Para fasilitator juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap hasil-hasil gambar dan tulisan yang dibuat anak. Anak mungkin sekali akan merasa tambah tertekan bila ungkapan mereka yang sifatnya pribadi diperlihatkan ke orang-orang lain tanpa ijin dari anak tersebut.

Salah satu bentuk dari kegiatan penanganan dan pemulihan psikososial dapat



berupa kegiatan yang terstruktur. Kegiatan terstruktur, sistematis dan terjadwal merupakan kegiatan yang terencana dan diperuntukkan bagi sekelompok anak dengan karakteristik tertentu serta dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran pembelajaran tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbasiskan kelas (dilakukan di sekolah) atau berbasiskan kamp (dilakukan di komunitas).

Struktur dalam pengertian ini adalah suatu bagian-bagian yang teratur dalam kegiatan tersebut. Seperti sebuah rumah maka kegiatan ini pun memiliki pondasi yang berupa tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan dari beberapa kegiatan psikososial kemudian membentuk sasaran besar berupa upaya pemulihan kondisi psikososial anak. Sistematis dalam artian tidak tumpang tindih namun ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara berurutan dan teratur. Terjadwal menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah direncanakan dan disusun sebelum kegiatan tersebut dilakukan, bukan merupakan kegiatan yang spontan dan tanpa persiapan. Kegiatan ini merupakan sesuatu yang rutin dan bukan sesekali saja dilakukan.

Meskipun kegiatan ini memiliki struktur, sistematis dan terjadwal namun tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan yang bermuatan psikososial ini bersifat fleksibel, terbuka terhadap kondisi yang ada di lapangan. Kegiatan ini juga memfasilitasi terbinanya kedekatan dan keterbukaan antara anak dan pendamping, bahkan bisa juga dengan lingkungan anak.

KEGIATAN PSIKOSOSIAL TERSTRUKTUR

Pengalaman traumatic dapat mempengaruhi pandangan dasar anak-anak tentang dirinya dan dunia. Kebutuhan dasar anak

adalah rasa aman, harga diri, control, kepercayaan dan kedekatan. Kebutuhan dasar tersebut terganggu karena pengalaman yang menakutkan seperti gempa atau bencana alam lainnya. Berbagai hal penting lainnya

Dalam pendekatan Kegiatan Psikososial Terstruktur, suatu **struktur** (dapat diprediksi dan teratur, yang memakai pembukaan, kegiatan utama, permainan kooperatif dan penutupan) dan **berurutan** (mengikuti urutan 5 fase dari kelima belas sesi yang telah dirancang) adalah yang paling penting. Ada 5 fase (di masing-masing fase terdiri dari 3 sesi) dengan karakteristik kegiatan sebagai berikut:

1. **Fase 1: Membangun rasa aman** dalam kelompok.
2. **Fase 2: Membangun kepercayaan dan rasa diri mampu pada anak.**
3. **Fase 3: Narasi personal** melalui kegiatan menggambar, drama dan bermain eksplorasi perasaan seperti marah, takut, senang, puas, dan bagaimana perasaan-perasaan tersebut dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang dialami anak.
4. **Fase 4: Keterampilan penyesuaian diri (coping skills)**, misalnya: apa yang dilakukan untuk mengatasi atau menghindari dari masalah, siapa yang dimintai pertolongan ketika mengalami kesulitan, dll.
5. **Fase 5: Perencanaan masa depan.** Fase-fase ini dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang ada. Misalnya supaya dapat mempertajam ketrampilan penyesuaian diri, maka di fase 4 diperpanjang lebih dari 3 sesi dari yang sebelumnya direncanakan. Atau bila bekerja dengan anak yang sebelumnya tidak punya hubungan dengan pendamping, maka mungkin perlu waktu yang lebih panjang di fase 1 supaya kita yakin bahwa rasa percaya dan aman sudah terbangun dengan baik dalam diri anak-anak dampingan kita.

Dalam fase-fase aktivitas tersebut, masing-masing memiliki tujuannya yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Fase	Karakteristik dari Aktivitas utama (<i>central activities</i>)
Membangun rasa aman dalam kelompok	1. Menciptakan suatu pengalaman bahwa kelompok adalah tempat yang aman. Bahwa peraturan dan prosedur dipahami bersama, dihargai dan dijalankan. 2. Memaparkan aspek-aspek positif dari rasa takut. 3. Menciptakan lingkungan yang terbuka dan hangat, dan bukannya yang mengkritik atau menjatuhkan penilaian. 4. Membangun rasa saling menghargai dan partisipasi yang berkualitas dan nilai-nilai dalam diri anak.
Membangun kepercayaan dan penghargaan terhadap diri sendiri	1. Menangani masalah-masalah yang berhadapan dengan rasa takut, kekuatan, kecemasan dalam artian anak-anak memahami bahwa perasaan-perasaan tersebut adalah hal yang wajar, biasa dan dialami oleh banyak orang. Sehingga jika kita mengalami perasaan-perasaan tersebut, hal itu adalah wajar dan bukan sesuatu yang buruk dan harus dipersalahkan. 2. Fokus pada kekuatan dan kemampuan positif dari anak, yang diterima dan dihargai oleh kelompok.
Narasi Pribadi	1. Menggali lebih dalam ketakutan, kecemasan dan pengalaman sulit individu dan perasaan-perasaan dengan penekanan pada perbedaan individu dan perbedaan pengalamannya yang memberikan kesempatan untuk menggali pengalaman-pengalaman pribadi. 2. Menolong anak-anak mencari pemahaman melalui visualisasi. (sekunder: membantu menciptakan makna dan penghayatan dari pengalaman traumatis)
Memperbaiki ketrampilan penyesuaian diri	1. Menggali perasaan kehilangan dan perubahan-perubahan yang dialami individu 2. Membangun pemahaman mengenai bagaimana orang menolong satu sama lain dalam keadaan sulit. 3. Mengidentifikasi sistem dukungan untuk anak.
Membuat perencanaan masa depan	1. Apa yang telah saya pelajari dari pengalaman-pengalaman itu? Apa yang telah saya lakukan dalam kelompok supaya dapat menyesuaikan diri pada keadaan (suatu perencanaan untuk komunitas jika ada serangan lagi, atau suatu perencanaan pengembangan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dalam proses stabilisasi). 2. Membangun kedekatan dalam kelompok dan hubungan yang positif.



MEMFASILITASI PERMAINAN, PENGASUHAN DAN DUKUNGAN SOSIAL

Variasi aktivitas bagi ECD harus disediakan dalam situasi darurat. Aktivitas-aktivitas ini dapat meliputi pemberian pendidikan bagi orangtua, kunjungan ke rumah, aktivitas kelompok yang dapat berbagi mengenai perawatan dan permainan untuk anak, penyediaan 'tempat yang aman' (*'safe spaces'*), perpustakaan mainan dan kegiatan perkumpulan informal bagi orangtua di tempat yang aman.

Mengatur kesempatan yang tepat bagi penduduk setempat untuk terlibat aktif dalam permainan, stimulasi dan sosialisasi. Hal ini mungkin dapat membantu untuk meringankan dampak psikososial yang negatif dari situasi kritis.

Mengatur aktivitas-aktivitas berdasarkan umur, jenis kelamin dan budaya anak. Untuk meminimalkan distres, aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan rutinitas mereka atau kehidupan sehari-hari mereka (contoh: anak yang berasal dari latar belakang nomaden (tempat tinggal berpindah-pindah) mungkin akan merasakan bahwa pendidikan formal tidak biasa dan tidak membuat mereka merasa nyaman). Pada perencanaan dan implementasi program, gunakan pendekatan yang relevan dengan budaya, seperti ritual pembacaan cerita, yang mungkin lebih tepat bila dibanding dengan model pengembangan barat (*western*).

Melakukan aktivitas di tempat yang aman, khususnya untuk anak yang masih sangat kecil (lihat Lembar Aksi 5.1. dan 7.1). Jika kondisinya memungkinkan, buat aktivitas kelompok berdasarkan usia atau

tahap perkembangan anak: 0-12/18 bulan (pre-verbal, belum dapat berjalan), 12/18-3 tahun, dan 3-6 tahun (aktivitas untuk anak 6-8 tahun ada di Lembar Aksi 7.1). Latih orangtua, kakek dan nenek serta kakak/adik untuk bekerja bersama dengan staf yang ada dan mempelajari apa yang dapat dilakukan di rumah yang dapat mendukung perkembangan yang sehat dari anak. Pertimbangkan untuk mengajak wanita yang sudah lebih tua dan wanita muda yang dapat dipercaya untuk menjadi sukarelawan di tempat yang aman (*safe spaces*).

Mempertimbangkan untuk menggunakan permainan, lagu dan tarian yang sudah diketahui serta mainan buatan rumah (*home-made toys*), karena hal-hal ini lah yang paling mungkin untuk dilakukan dalam situasi darurat.

Menyiapkan area bagi pengasuh dan anak untuk dapat bermain dan berinteraksi pada setiap pelayanan yang diberikan untuk anak, seperti pada program pemberian makan secara *terapeutik*, pada rumah sakit dan klinik, dan juga pada area distribusi makanan dan barang yang bukan makanan.

Memfasilitasi aktivitas untuk anak dengan mengutamakan pembangunan komunitas sosial dan aksi tanpa kekerasan pada komunitas yang terkena dampak kekerasan.

Melibatkan anak dengan kebutuhan khusus pada aktivitas perawatan, dengan permainan dan dukungan sosial pada tingkat komunitas.

Untuk panduan spesifik dalam menstimulasi anak yang masih kecil dalam situasi krisis makanan, lihat WHO (2005) yang direferensikan didalam Bahan rujukan.

PERAWATAN UNTUK PARA PENGASUH

Pada situasi darurat, penting untuk membuat pertemuan di mana para pengasuh bagi anak-anak yang masih sangat kecil dapat mendiskusikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, dapat berbagi cara penyelesaian masalah dan dapat saling mendukung satu sama lain dalam memberikan cara pengasuhan yang efektif untuk anak mereka.

1. Pada tempat yang aman, buat kelompok dukungan di mana orangtua/ibu dapat berbicara tentang penderitaan mereka sendiri.
2. Berikan masukan pada orangtua untuk tidak membicarakan hal-hal detil dari kejadian yang menakutkan di depan anak mereka atau bahkan membicarakan kejadian tersebut dengan anak mereka.
3. Selama aktivitas kelompok kecil yang melibatkan keluarga dan anaknya, orangtua memiliki kesempatan untuk belajar dari interaksi orangtua lain dengan anak mereka. Saat interaksi yang positif antara orangtua dan anak terjadi, angkat hal ini, kemudian dorong orangtua yang lain untuk berinteraksi dengan anak mereka menggunakan sikap yang serupa.
4. Bantu orangtua dan pengasuh untuk memahami perbedaan yang mungkin mereka lihat pada anak mereka setelah krisis terjadi. Jelaskan bahwa tingkah laku tersebut, misalnya sangat ketakutan dengan orang lain, menarik diri, atau menjadi lebih sering terlibat perkelahian dengan anak lain, adalah reaksi yang umum terjadi terhadap stres dan bukan merupakan kesalahan dari pengasuh.
5. Berikan informasi pada orangtua dan pengasuh mengenai bagaimana caranya mengidentifikasi masalah dan memberikan dukungan kesehatan

psikososial untuk anak mereka, termasuk bagaimana caranya untuk mengontrol, mengurangi, dan mengubah tingkah laku agresif anak lewat cara pendisiplinan yang konsisten dan waktu yang terbatas.

6. Identifikasi sejumlah respon terhadap stres anak yang mungkin menyakiti, seperti memukul, mengacuhkan atau memberikan stigma, selanjutnya berikan saran alternatif strategi kepada orangtua dan pemimpin masyarakat.
7. Orangtua yang mengalami kesulitan dalam merawat anaknya karena adanya masalah kesehatan jiwa yang berat harus dirujuk untuk mendapatkan bantuan yang tepat dari staf pelayanan kesehatan (yang sudah terlatih dalam perawatan kesehatan jiwa; lihat Lembar Aksi 6.2). Khususnya, depresi yang parah sehingga dapat mempengaruhi kemampuan orangtua untuk merawat anaknya.

CONTOH LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL SAAT BENCANA

Tujuan:

1. Penyelamatan dan penciptaan rasa aman bagi para penyintas
2. Pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan khusus dan hal-hal mendesak yang harus segera dipenuhi
3. Pengurangan reaksi-reaksi emosional yang tidak menyenangkan [cemas, takut, sedih, khawatir dan sejenisnya]
4. Pengkondisian untuk mengembalikan ke situasi normal dan rutinitas

Bentuk Kegiatan:

1. penjajakan kebutuhan psikososial
2. pertolongan pertama psikologis [*psychological first aid* atau PFA]
3. percakapan yang menenangkan
4. kegiatan rekreasi
5. kelompok dukungan



CONTOH LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PASCA BENCANA

Tujuan:

1. Keberlanjutan dari empat tujuan di fase saat bencana
2. Pengkondisian untuk *resettlement* [penempatan kembali] di lokasi asal atau di lokasi yang baru

Bentuk Kegiatan:

1. Konseling
2. kegiatan keagamaan
3. kegiatan rekreasional
4. kegiatan olah raga
5. kelompok dukungan

LAMPIRAN

KEGIATAN PSIKOSOSIAL UNTUK ANAK

Kegiatan untuk Membangun RASA AMAN

TUJUAN UMUM FASE RASA AMAN:

1. Anak merasa nyaman dan aman berada dan terlibat dalam kegiatan kelompok
2. Anak mengutarakan kebutuhannya akan rasa aman dan percaya dalam kelompoknya
3. Anak dapat mengenali hal-hal yang membuatnya merasa takut dan merasa aman baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain

Nama Kegiatan: Permainan “Bola Pelindung”

TUJUAN:

Menetralisir hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (ketangguhan) dan melatih kerjasama dalam kelompok.

- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 15 menit
- **Peralatan:** Bola karet /tidak keras
- **Tempat:** Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Minta 2 orang anak menjadi sukarelawan, 1 menjadi pelindung dan 1 lagi menjadi yang dilindungi, dan diminta berdiri di tengah lingkaran.
2. Peserta yang membentuk lingkaran berusaha untuk melempar bola dan mengenai orang yang dilindungi dengan melemparkan bola ke arah orang tersebut, yang melindungi berusaha

menghalangi lemparan bola dari peserta mengenai orang yang dilindungi

3. Pelempar bola dapat mengoper bola terlebih dahulu kepada pelempar lain yang posisinya lebih dekat atau memungkinkan untuk mengenai sasaran
4. Sementara orang yang melindungi berusaha menghalangi dengan berbagai cara kecuali mendekat dan merebut bola dari tangan pelempar
5. Jika waktu masih cukup, dapat meminta sukarelawan lain menjadi pelindung dan yang dilindungi

VARIASI/ALTERNATIF:

1. Jika dirasa perlu maka peserta yang menjadi pelindung dapat ditambah
2. Agar lebih seru bisa diberlakukan aturan dimana pelindung hanya dapat menghalangi bola dengan badan dan kakinya (tidak diperkenankan menggunakan tangan)
3. Bola bisa ditambah menjadi 2

Nama Kegiatan: “Menggambar peristiwa yang menyenangkan”

- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 35 menit
- **Peralatan:** Kertas gambar dan alat tulis pewarna
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Bagikan peralatan menggambar pada peserta
2. Peserta diminta membuat sebuah gambar peristiwa yang menyenangkan menurut pengalaman Anak
3. Peristiwa yang digambar anak di batasi hanya ketika mereka berada di sekolah atau di kampung atau di lingkungan sekitar rumah
4. Setelah selesai menggambar minta peserta mengumpulkan peralatan menggambar dan kembali duduk dalam lingkaran
5. Kemudian tawarkan pada peserta untuk berbagi cerita dengan peserta lain tentang gambarnya.

Nama Kegiatan: Permainan “Kucing dan Tikus”

TUJUAN:

- Menetralkan hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/ perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.
- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 25 menit
- **Peralatan:** Tali
- **Tempat:** Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Minta peserta untuk berdiri dalam lingkaran bergandengan tangan satu sama lain.
2. Siapkan 2 utas tali yang berbeda warna dan sudah diikat ujung masing-masing

tali dengan ujung lainnya hingga membentuk lingkaran yang cukup besar (dapat dilalui tubuh manusia)

3. Salah satu lingkaran tali dikalungkan pada salah satu peserta dan tali yang lain dikalungkan pada peserta disebaliknya
4. Tali dipindahkan dari peserta yang satu ke peserta sebaliknya secara bergantian tanpa melepaskan pegangan tangan mereka
5. Karena ada dua tali, maka diusahakan agar kedua tali tersebut tidak bertemu
6. Apabila kedua tali bertemu pada salah seorang peserta maka akan ada sanksi bagi dirinya dan permainan dimulai lagi

Nama Kegiatan: Permainan “Halang rintang”

TUJUAN:

- Menetralkan hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.
- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 25 menit
- **Peralatan:** Penutup mata, tali
- **Tempat:** Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok yang berjumlah genap
2. Dalam tiap kelompok fasilitator meminta peserta untuk menjadi beberapa pasangan si Buta dan si Pemandu (si Buta akan ditutup matanya dan si Pemandu akan memandu si Buta melewati halang rintang)
3. Setiap pasangan pada tiap kelompok akan melewati halang rintang 1 putaran yaitu dari start sampai dengan garis finish dan kembali lagi dari garis finish ke start.
4. Sesampainya di garis finish Si Buta berganti peran menjadi Pemandu (dan



- sebaliknya) serta berjalan kembali menuju garis start
5. Bila satu pasangan menyelesaikan 1 putaran pasangan berikutnya di kelompok tersebut dapat mulai kembali menuju halang rintang.
 6. Bila semua pasangan telah selesai menyelesaikan 1 putaran fasilitator mengajak peserta untuk duduk kembali.

VARIASI/ALTERNATIF:

1. Peserta tidak diminta berkelompok, melainkan hanya berpasangan melewati halang rintang.
2. Halang rintang dapat divariasikan dengan meminta beberapa orang diluar peserta untuk menjadi pengacau, misalnya dengan berteriak atau mengacaukan panduan yang diberikan pemandu pada si Buta.

Nama Kegiatan: “Lingkaran Aman”

- **Usia:** 5 – 18 tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** Benang wol, lem, gunting, spidol, kertas HVS
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Fasilitator menanyakan/mengingatkan kembali aturan main PSSA
2. Bagikan peralatan pada peserta dan intruksikan untuk membuat beberapa lingkaran didalam lingkaran dengan benang wol dan di tempel di kertas HVS.
3. Minta peserta menuliskan nama orang terdekat yang membuat mereka merasa aman dan menempelkannya dalam lingkaran benang wol berlapis.
4. Tempelkan menurut orang yang terdekat di lingkaran terdalam
5. Setelah selesai tawarkan pada peserta untuk berbagi cerita tentang gambarnya.
6. Tawarkan pada peserta lain untuk memberikan pendapat dan penguatan pada peserta yang bercerita

KEGIATAN UNTUK MEMBANGUN RASA PENGHARGAAN TERHADAP DIRI

TUJUAN UMUM FASE PENGHARGAAN DIRI:

1. Anak dapat menghargai diri sendiri dan orang lain dan mengungkapkan penghargaanannya tersebut dalam perilaku nyata
2. Anak dapat mengenali diri sendiri dan dapat menggambarkan tentang dirinya pada orang lain
3. Anak dapat mengenali emosi-emosi dasar yang dimilikinya

Nama Kegiatan: Permainan Kerjasama “Terobos Tali”

TUJUAN:

1. Membuat anak merasa nyaman dalam kegiatan, mengembalikan emosi/ perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.
2. **Usia:** 5 – 18 Tahun
3. **Waktu:** 25 menit
4. **Peralatan:** Tali rapia
5. **Tempat:** Dalam/ luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berdiri bergandengan membentuk satu barisan.
2. Ikatkan dua ujung tali sehingga membentuk lingkaran dan berikan 1 pada masing – masing kelompok.
3. Tali dipegang oleh peserta paling ujung dalam setiap kelompok. Selanjutnya, ia menerobos melewati tali itu dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu baru diikuti dengan tubuh dan kaki.

4. Kemudian, peserta selanjutnya juga menerobos tali dengan kedua tangannya masih bergandengan tangan dengan peserta lainnya. Demikian seterusnya hingga peserta terakhir.

VARIASI/ALTERNATIF:

1. Tali dapat diganti dengan Hula hoop atau benda lain yang berbentuk lingkaran
2. Dapat pula ditambahkan satu tali atau hula hoop dan diusahakan agar dua tali atau hula hoop tersebut tidak jatuh pada orang yang sama
3. Kegiatan ini bisa dilakukan pada kelompok besar denganiringi musik yang bersemangat

Nama Kegiatan: “Siapa Diriku?”

- **Usia:** 5 – 18 tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** kertas HVS, spidol, crayon, cat air, gunting, origami
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Peserta berada dalam lingkaran besar
2. Bagikan peralatan pada peserta.
3. Menggambar Tokoh Pahlawan/benda/hewan/tumbuhan/ yang menurut anggapan peserta memiliki kesamaan dengan dirinya (menggambarkan tentang dirinya)
4. Setelah selesai tawarkan pada peserta untuk berbagi cerita tentang gambarnya terutama mengenai gambaran mereka mengenai diri mereka sendiri (sifat-sifat, kelebihan dan kekurangan dll).
5. Tawarkan pada peserta lain untuk memberikan pendapat dan penguatan pada peserta yang bercerita

Nama Kegiatan: Permainan Kerjasama “Jaring ikan”

TUJUAN:

- Menetralisir hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/perasaan yang larut

berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.

- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 25 menit
- **Peralatan:** Tidak memerlukan alat
- **Tempat:** Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Jelaskan bahwa peserta akan menjadi ikan yang dijaring oleh fasilitator
2. Peserta diminta menghindari fasilitator yang akan mencoba menepuknya
3. Peserta yang tertepuk akan menjadi teman jaring dan bersama-sama menangkap peserta yang lain.
4. Demikian seterusnya sampai seluruh peserta tertangkap

Nama Kegiatan: “Lingkaran Dalam-Luar”

- **Usia:** 10 – 18 Tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** Kertas dan alat tulis
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Peserta diminta untuk membuat 2 lingkaran (1 lingkaran luar dan 1 lingkaran di dalam)
2. Peserta dalam kedua lingkaran itu berdiri saling berhadapan (1 peserta di lingkaran dalam berdiri berhadapan dengan 1 peserta di lingkaran luar untuk memastikan bahwa masing-masing peserta mempunyai pasangan),
3. Kemudian peserta yang berada di lingkaran dalam diminta membalikan tubuhnya membelakangi peserta yang berada di lingkaran luar, dan jika dibutuhkan dapat menutup matanya dengan peralatan yang ada, selanjutnya berputar ke kanan sebanyak 4 langkah (agar tidak tau siapa orang yang berada di belakangnya)
4. Setiap peserta yang berada di lingkaran luar diminta untuk memberikan penilaian yang



- positif terhadap peserta di hadapannya (yang berada dilingkar dalam) dan memberikan hasil penilaiannya kepada yang dinilai secara tertutup (kertas tertutup yang baru akan dibuka setelah selesai permainan /saat diskusi).
5. Perputaran dilakukan sebanyak 3 kali sehingga setiap orang yang berada di lingkaran dalam mendapatkan 3 penilaian dari peserta yang berada dilingkar luar
 6. Setelah lingkaran dalam sudah 3 kali mendapatkan penilaian, selanjutnya bergantian peserta lingkaran dalam yang memberikan penilaian kepada peserta lingkaran luar sebanyak 3 kali penilaian dengan urutan aktivitas sama .
 7. Masing-masing peserta sebisa mungkin tidak mengetahui orang yang menilai dirinya
 8. Jika sudah selesai minta peserta duduk dalam 1 lingkaran, dan masing-masing peserta membacakan apa saja penilaian terhadap dirinya yang telah diberikan dari kawannya.

KEGIATAN UNTUK MEMBANGUN KETERAMPILAN MENYESUAIKAN DIRI

TUJUAN UMUM FASE KETRAMPILAN MENYESUAIKAN DIRI:

1. Anak dapat mengenali masalah dirinya dan orang disekitarnya
2. Anak dapat mengembangkan kemampuan empati pada orang lain
3. Anak dapat mengembangkan ketrampilan menguatkan orang lain yang mengalami masalah dan emosi/perasaan negatif
4. Anak dapat bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan satu permasalahan
5. Anak dapat mengembangkan ketrampilan menganalisa masalah dan mencari jalan keluar permasalahan tersebut
6. Anak dapat bernegosiasi dalam memenuhi kebutuhannya dengan orang lain
7. Anak dapat mengembangkan kemampuan merencanakan pemecahan masalah
8. Anak dapat belajar mengembangkan ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain sebagai bagian dari pemecahan masalah

Nama Kegiatan: Permainan Kerjasama “Meniru gerakan”

TUJUAN:

- Menetralkan hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.
- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 25 Menit
- **Peralatan:** Tidak ada
- **Tempat:** Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Peserta diminta untuk berdiri membuat

lingkaran

2. Fasilitator masuk dalam lingkaran dan membuat satu gerakan, peserta disampingnya diminta meniru gerakan fasilitator dan membuat gerakan sendiri, selanjutnya peserta disampingnya meniru gerakan fasilitator dan gerakan peserta disamping fasilitator dan kemudian membuat gerakan sendiri untuk ditiru peserta disampingnya lagi dan seterusnya.
3. apabila peserta lupa mencontohkan gerakan peserta lain peserta yang membuat gerakan dapat membantu dengan mengulangi gerakannya.
4. Apabila jumlah peserta terlalu

banyak peniruan gerakan bisa saja dilakukan hanya setengah lingkaran saja dan dibuat gerakan dari awal lagi, melanjutkan yang sudah terlewati setengah lingkaran tadi.

Nama Kegiatan: Permainan “Puzzle berputar”

- **Usia:** 5 – 18 Tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** *Puzzle atau kertas Origami*
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Sebelum kegiatan fasilitator membuat potongan-potongan puzzle dari gambar atau karton sebanyak 3-4 set puzzle
2. Keempat set puzzle ini kemudian saling diacak (dicampur) dan dibagi menjadi 3-4 kelompok (sesuai banyaknya kelompok) dengan jumlah potongan yang sama tiap kelompoknya
3. Fasilitator membagi peserta dalam 3-4 kelompok (5-6 Orang tiap kelompok), setiap kelompok akan mendapatkan beberapa potongan puzzle yang merupakan campuran dari potongan-potongan 4 set puzzle
4. Fasilitator menanyakan/mengingatkan kembali aturan main PSSA
5. Tugas setiap kelompok adalah mengumpulkan dan menyusun potongan puzzle tersebut hingga menjadi puzzle yang utuh
6. Setiap kelompok mengumpulkan potongan puzzle miliknya dari kelompok-kelompok lain melalui wakil kelompoknya
7. Wakil inilah yang akan berhadapan dengan kelompok lain untuk tukar menukar potongan puzzle yang mereka miliki **tanpa berbicara** dengan kelompok tersebut

Nama Kegiatan: “Telur sakti”

- **Usia:** 5 – 18 tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** Telur, koran bekas
- **Tempat:** Luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok (3-4 kelompok @ 4-5 orang)
2. Setiap kelompok mendapatkan 1 buah telur dan peralatan lain (koran bekas, gunting, lem, sedotan dll)
3. Fasilitator menjelaskan bahwa tugas tiap kelompok adalah melindungi telur yang ada dengan peralatan yang ada sehingga telur tidak akan pecah jika dilempar
4. Fasilitator kemudian memberikan waktu beberapa menit pada kelompok untuk membungkus telur mereka masing-masing
5. Setelah waktu yang ditentukan selesai maka fasilitator membuat garis batas untuk melakukan lemparan
6. Setiap kelompok diminta untuk melemparkan telurnya secara bergantian dan jarak lemparan kemudian dibandingkan dengan kelompok lain
7. Setelah semua melempar telur maka telur-telur tersebut kemudian dibuka bungkusnya untuk melihat apakah telur tersebut tetap utuh atau sudah pecah
8. Setelah permainan selesai maka peserta kembali duduk dalam lingkaran dan berdiskusi bersama tentang perasaan dan pengalaman mereka serta nilai yang terkandung dalam permainan



KEGIATAN UNTUK MEMBANGUN HARAPAN AKAN MASA DEPAN

TUJUAN UMUM FASE PERENCANAAN MASA DEPAN:

1. Anak dapat menemukan kebutuhan dalam dirinya untuk melakukan perubahan (pengembangan) diri
2. Anak dapat membuat prioritas harapan dan sasaran yang ingin dicapai dari rencana pengembangan dirinya
3. Anak dapat membuat rencana berjangka akan perubahan yang ingin dilakukannya
4. Anak dapat membuat komitmen yang berkaitan dengan pengembangan diri
5. Anak belajar bertanggung jawab terhadap komitmen rencana yang telah dibuatnya
6. Anak dapat membuat rencana berjangka ke depan yang akan dilakukannya bersama orang lain

Nama Kegiatan: “Jam Pribadi ku”

- **Usia:** 5 –9 Tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** kertas gambar, alat mewarnai
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Masih duduk dalam lingkaran fasilitator membagikan 7 buah kertas HVS dan alat menggambar lainnya
2. Peserta diminta menggambarkan/ menuliskan aktivitas sehari-harinya disertai waktu/jamnya yang biasa dilakukan selama 1 hari dalam 1 minggu
3. Setelah selesai menggambar peserta diminta berbagi cerita dengan yang lain
4. Fasilitator dapat menanyakan kepada anak kegiatan apa saja yang bermanfaat dan kurang bermanfaat bagi anak. Kenapa bermanfaat dan kurang bermanfaat
5. Selanjutnya fasilitator dapat menanyakan apakah ada yang ingin diubah dari kegiatan sehari-hari tersebut.

Nama Kegiatan: “Kalender Harapanku “

- **Usia:** 10 – 18 Tahun
- **Waktu:** 45 menit
- **Peralatan:** kertas gambar, alat mewarnai
- **Tempat:** Dalam ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Peserta diminta untuk membuat satu rangkuman kisah hidupnya selama beberapa waktu terakhir
2. Bagikan pada peserta masing-masing 4 lembar kertas HVS A4, alat tulis, majalah bekas, spidol/pensil warna
3. Minta peserta untuk melipat dan membagi kertas tersebut menjadi 4 bagian setiap lembarnya (bisa juga peserta sudah dibagikan kertas seukuran ¼ bagian HVS)
4. Kertas tersebut disusun seperti buku dan dikaitkan dengan staples (penyatu kertas/jegrekan)
5. Untuk mengisi halaman pertama (sampul depan) peserta diminta untuk menggambarkan wajahnya
6. Pada halaman kedua peserta diminta untuk menuliskan namanya sendiri dan ditambahkan keterangan pribadi lain seperti tempat-tanggal lahir, hobi, dll
7. Pada halaman ke-3 hingga 14 dituliskan nama bulan ataupun tahun
8. Minta peserta untuk menuliskan/ menggambarkan harapan-harapan atau cita-citanya yang diinginkan terjadi dalam bulan/tahun di sertai dengan alasannya kenapa ?
9. Pada 2 halaman terakhir peserta dapat menuliskan daftar orang-orang yang berarti (dekat, disayang) yang dapat

membantu mewujudkan cita-cita/harapan, dan menuliskan hal-hal yang akan dilakukan bagi mereka sebagai perwujudan ras terima kasih, rasa sayang, rasa cinta dan kedekatan.

10. Minta kesediaan beberapa peserta (jika waktu memungkinkan seluruh peserta) untuk menceritakan perihal yang dituliskannya, tidak perlu semua mungkin hanya satu atau dua kisah.

Nama Kegiatan: Permainan Kerjasama “*Ulur sepanjang-panjangnya*”

TUJUAN:

- Menetralsir hal yang bisa merugikan dalam kegiatan utama, mengembalikan emosi/perasaan yang larut berlebihan, membangun resilience (Ketangguhan) dan Melatih kerjasama dalam kelompok.
- **Usia:** 5 – 18 Tahun

- Waktu: 25 Menit
- Peralatan: Tubuh dan barang yang ada ditubuh peserta
- Tempat: Dalam dan luar ruangan

DESKRIPSI KEGIATAN:

1. Peserta dibagi dalam 2 kelompok dan kemudian diminta untuk berbaris
2. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa kali ini setiap kelompok diminta untuk membuat satu garis dengan menggunakan peralatan yang ada dalam tubuh mereka sendiri (misal menggunakan ikat pinggang, sandal, tangan, kaki, tubuh dll)
3. Kelompok yang berhasil membuat garis paling panjang adalah yang menang dalam permainan ini
4. Seusai permainan peserta diajak mendiskusikan pengalaman mereka dan nilai yang dikandung permainan tersebut

CATATAN



10 MANAJEMEN KASUS

DEFINISI MANAJEMEN KASUS

Manajemen kasus dalam perlindungan anak merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan anak dan keluarganya secara tepat, sistematis dan tepat waktu melalui dukungan langsung, sistem dukungan lokal, dan/atau rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan (Save the Children, 2017, Common Approach Steps to Protect)

TUJUAN MANAJEMEN KASUS

Tujuan manajemen kasus sebagai berikut:

1. Memastikan anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasar-dasarnya sesuai dengan hak-hak mereka
2. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga
3. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dialami
4. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan perlindungan anak guna memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya
5. Memberikan input bagi perumusan kebijakan perlindungan anak

KOMPONEN UTAMA MANAJEMEN KASUS

Komponen utama dalam manajemen kasus yaitu: a) *Komponen proses* adalah komponen terkait pada aktivitas langsung penanganan kasus, b) *Komponen sistem* adalah komponen yang dapat mendukung praktik manajemen kasus itu sendiri

Komponen sistem sangat bervariasi seperti:

1. Kebijakan, hukum, regulasi, dan/atau standar sebagai landasan digunakannya pendekatan manajemen kasus;
2. Struktur dan tugas tim manajemen kasus;
3. Sumber daya manusia yang terampil;
4. Praktik supervisi;
5. Sumber finansial dan material yang memadai;
6. Keterlibatan anak dan keluarga
7. Manajemen data dan proses monitoring evaluasi.

PERAN-PERAN DALAM MANAJEMEN KASUS

Terdapat tiga tingkatan peran dalam manajemen kasus yakni manajer kasus, *supervisor*, dan *case worker*/pendamping. Berikut penjelasan masing-masing peran:

1. Manajer Kasus. Kewenangan utama dari manajer kasus adalah menerima rujukan dan menetapkan kasus yang akan ditangani, serta mendistribusikannya pada *case worker*/pendamping. Tugas manajer kasus yaitu:

- Mengecek kelayakan dari kasus yang dirujuk dari beberapa pihak (Dinas Sosial, Dinas
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Kepolisian, Rumah Sakit, sekolah, LKSA, LSM, lembaga lainnya, dan komunitas) untuk ditangani; mendelegasikan penanganan kasus kepada kelompok jabatan fungsional/pelaksana.
 - Melakukan rujukan ke lembaga lain dan memastikan agar anak atau keluarga yang
 - dirujuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya.
 - Memonitor proses penanganan kasus sejak tahap awal sampai dengan tindak lanjut.
 - Mempraktikkan pembahasan kasus.
 - Mempraktikkan pertemuan koordinatif untuk meningkatkan pemahaman terhadap
 - masalah anak dan memadukan penggunaan berbagai sumber.
 - Melakukan advokasi terkait perumusan etika bekerja dengan anak, identifikasi sumber dan distribusi sumber.
2. Supervisor. Dilapangan supervisor turut menangani kasus, akan tetapi kewenangan utama supervisor adalah melakukan supervisi kepada case worker/pendamping. Tiga fungsi supervisor:
- *Fungsi edukatif* dilakukan supervisor untuk meningkatkan kompetensi case worker/ pendamping dengan memberikan umpan balik konstruktif terhadap kinerja case worker/ pendamping secara teratur; mendiskusikan hal-hal yang menghambat pelaksanaan tugas karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai case worker; serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kompetensi case worker/ pendamping
 - *Fungsi suportif* dilakukan supervisor dengan mendukung case worker/ pendamping mengatasi masalah atau keterbatasan termasuk masalah pribadi yang kemungkinan menghambat pelaksanaan tugasnya
 - *Fungsi administratif* dilakukan supervisor dengan membantu case worker/pendamping agar memahami tanggung jawab dan tugasnya; mereview seluruh tugas yang dilakukan dalam bentuk jurnal, catatan kasus, dan laporan kasus; serta mendukung dokumentasi proses dan hasil pelaksanaan tugas
3. Case worker. Case worker/pendamping merupakan seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi kasus dengan intensif mulai dari penerimaan kasus hingga pengakhiran.
- Menerima rujukan kasus dari manajer kasus.
 - Menemui lembaga perujuk untuk memahami latar belakang kasus dan menjelaskan penugasan sebagai case worker/pendamping yang mendapat mandat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 - Melakukan penanganan kasus dengan prosedur yang dimulai dari kontak awal, kontrak, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi sampai dengan terminasi dan tindak lanjut. Pada situasi darurat, penanganan kasus tidak selalu dilakukan berdasarkan tahapan tetapi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus.
 - Mengikuti pertemuan supervisi dengan supervisor. Supervisi dilakukan sesuai kebutuhan case worker/pendamping agar penanganan kasus klien dapat berkualitas.
 - Mengikuti pertemuan reguler untuk evaluasi pelayanan.



- Mengikuti pertemuan koordinatif dengan pemangku kepentingan perlindungan anak untuk mengintensifkan pemahaman terhadap masalah anak dan memadukan penggunaan berbagai sumber.

TAHAPAN-TAHAPAN DALAM MANAJEMEN KASUS

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah/proses awal merupakan kesempatan bagi pendamping/case worker untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap calon klien dan melakukan kontrak layanan secara profesional. Pada proses ini pun case worker telah memperoleh informasi awal mengenai permasalahan klien.

2. Asesmen

Asesmen bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki klien guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Asesmen tidak hanya berupa kegiatan pengumpulan informasi, melainkan mencakup kegiatan analisis dan penilaian motivasi, kapasitas, dan peluang yang dimiliki oleh klien dan keluarga, hingga pengambilan keputusan.

3. Rencana intervensi

Rencana intervensi adalah proses kognitif untuk menentukan sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah.

4. Pelaksanaan intervensi

Pelaksanaan intervensi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya.

5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan intervensi.

6. Terminasi

Terminasi adalah proses pengakhiran

seluruh rangkaian proses manajemen kasus. Terminasi pun dapat diartikan sebagai keputusan relasi pertolongan antara pendamping/case worker dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses manajemen kasus.

PRINSIP-PRINSIP PEKERJAAN SOSIAL

1. Penerimaan

Setiap individu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya tanpa membedakan suku, agama, latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya. Case worker harus menerima kondisi klien apa adanya dengan latar belakang suku, agama, budaya, status sosial, ekonomi, disabilitas, orientasi seksual atau latar belakang masalah, sikap dan kepribadian yang berbeda-beda.

Contoh praktek: Case worker/Pendamping menunjukkan penerimaan dengan mengekspresikan perhatian yang tulus, mau mendengarkan ungkapan klien, mengakui pandangan yang berbeda, menciptakan suasana responsif terhadap klien.

2. Individualisasi

Setiap individu itu unik dan berbeda satu sama lain. Demikian pula setiap klien memiliki keunikan, harga diri, martabat, pengalaman, kepribadian, kemampuan serta lingkungan hidup yang tidak sama. Contoh praktek: a) Case worker/Pendamping harus menghargai hak klien untuk menjadi dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial. b) Penanganan kasus klien tidak bisa disamakan untuk semua klien akan tetapi perlu memperhatikan keunikan dan karakteristik individu.

3. Ekspresi emosional

Setiap individu dalam hal ini klien memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan dan menampilkan

perasaannya. Contoh praktek: a) Case worker/Pendamping memberi kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan dan emosinya sepanjang tidak berlebihan atau berlarutlarut dan membahayakan. Hal ini dapat mengurangi beban atau tekanan yang dirasakan klien, b) Case worker/Pendamping mendengarkan dengan seksama, bertanya dengan pertanyaan yang relevan dan menunjukkan toleransi,

4. Sikap tidak menilai

Sikap tidak menilai merupakan dasar dari hubungan yang efektif. Setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapinya tanpa memperoleh tanggapan negatif atau penilaian tanpa bukti akurat. Contoh praktek: Case worker/Pendamping tidak boleh memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku klien, memberikan asumsi, menghakimi perilaku klien sebagai baik atau buruk ataupun bermartabat atau tidak bermartabat. Tim penanganan kasus anak multidisiplin harus lebih fokus memikirkan alternatif pendekatan atau solusi yang tepat untuk mengatasi masalah klien.

5. Keterlibatan emosional secara terkendali

Kemampuan mengendalikan emosi sangat bermanfaat agar klien merasa nyaman dan belajar untuk tidak larut dalam perasaannya (sedih, senang, marah dan emosi lainnya) karena menghadapi masalah. Contoh praktek: Case worker/Pendamping harus dapat merasakan kondisi klien, menunjukkan sikap empati tetapi sekaligus harus dapat mengontrol keterlibatan emosi terhadap klien. Artinya, tim penanganan kasus anak multidisiplin tidak boleh larut dalam perasaan dan emosi klien, dan tetap dapat menjaga sikap dan orisinalitas sebagai profesional.

6. Menentukan diri sendiri

Klien memiliki hak dan kebutuhan untuk membuat pilihan dan memutuskan sendiri. Klien juga memiliki hak untuk menerima atau menolak usul/nasehat yang diberikan. Contoh praktek: a) Case worker/Pendamping bertanggung jawab untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada klien agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya, b) Case worker/Pendamping memfasilitasi dan memberdayakan klien untuk mampu mengambil keputusan dengan tepat, bukan mendominasi keputusan klien.

7. Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan klien selalu menjadi prioritas sesuai kesepakatan pada proses kontrak. Hal ini dapat membangun hubungan baik dan saling percaya dengan klien, yang membantu penanganan kasus menjadi efektif. Namun demikian bila dibutuhkan, dengan seizin klien dan keluarganya, case worker/pendamping dapat mendiskusikan masalah klien dengan kolega atau supervisor, untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin pada klien, yang dalam hal ini artinya mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Satu hal penting dalam menjaga kerahasiaan klien adalah menyampaikan sejak kontak awal kepada klien bahwa, kerahasiaannya akan selalu dijaga. Kecuali apabila ada hal-hal yang dapat mengancam dirinya (anak) dan orang lain, maka case worker/pendamping akan membagi informasi pada pihak lain yang dapat membantunya. Contoh praktek Case worker/Pendamping tidak akan selalu berpatokan pada kerahasiaan apabila klien berada dalam kondisi kritis. Kerahasiaan juga akan dikesampingkan apabila hal tersebut dapat mencelakakan klien anak atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.



ETIKA BERKEGIATAN DENGAN ANAK

Semua case worker, mitra, dan perwakilan lain DILARANG:

1. Melakukan kekerasan fisik terhadap anak/klien
2. Memakai bahasa yang tidak pantas, menghina atau kasar.
3. Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan anak/klien pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan.
4. Terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan anak/klien.
5. Menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual.
6. Mengajak anak/klien untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari Supervisor.
7. Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak/klien.
8. Tidur di kamar yang sama dengan anak/klien kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari Supervisor.
9. Mengeksplotasi anak/klien.
10. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri oleh anak/klien.
11. Membiarkan atau ikut serta dalam perilaku anak/klien yang sifatnya ilegal, tidak aman, dan mengarah pada kekerasan.
12. Mempermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina anak/klien.
13. Menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan anak/klien tertentu dibanding anak lainnya.
14. Menghabiskan waktu berlebih dengan anak/klien di tempat yang jauh dari peserta didik lainnya.
15. Menunjukkan anak/klien gambar, film, dan website yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan eskstrim.
16. Menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Semua case worker, mitra, dan perwakilan lain HARUS:

1. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan resiko serta mengendalikan situasi tersebut. Apabila situasi dinilai sudah diluar kendali, case worker/pendamping wajib sesegera mungkin dalam kurang waktu maksimal 1x24 jam melaporkan kepada Supervisor atau sesuai dengan prosedur internal yang berlaku.
2. Merencanakan dan mengatur pekerjaan, waktu dan tempat kerja untuk mengurangi resiko.
3. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan anak-anak.
4. Memastikan adanya suasana sehingga keterbukaan setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan .
5. Memastikan dijaganya akuntabilitas antar staf sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat segera tertangani.
6. Memberikan informasi kepada anak-anak dan keluarga bagaimana prosedur untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh staf atau pihak lain.
7. Memberdayakan anak-anak - diskusikan dengan mereka mengenai hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan apa yang dapat mereka lakukan jika mengalami masalah.

ETIKA BEKERJA DENGAN MEDIA

Case worker/pendamping harus berpedoman pada etika bekerja dengan publik dan media dengan memperhatikan potensi manfaat dan potensi risiko bagi kepentingan klien dan keluarga.

1. Potensi manfaat sebagai berikut:
 - Pengungkapan kasus secara proporsional kepada publik dapat

- meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ancaman masalah sosial klien.
- Pengungkapan informasi situasi penanganan kasus secara proporsional dapat memancing keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penanganan kasus.
2. Potensi risiko bagi kepentingan klien dan keluarga berikut ini:
 - Pengungkapan detil kasus kepada publik yang tidak terkendali dapat menghambat banyak tahap/kegiatan dalam pelayanan terhadap klien.
 - Pengungkapan informasi mengenai identitas dan latar belakang klien dan keluarga dapat merugikan kepentingan klien, termasuk menyulitkan proses pemulihan dan reintegrasi yang diupayakan oleh manajemen kasus, atau menempatkan klien dan keluarganya dalam situasi yang tidak aman.
 3. Kesalahan penyampaian informasi dan kecenderungan mengedepankan unsur sensasi dari sebuah kasus yang kadang menyebabkan salah persepsi terhadap korban dan keluarganya.

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN SISTEM RUJUKAN

langkah-langkah dalam membangun sistem rujukan sebagai berikut:

1. Identifikasi lembaga atau pihak potensial menjadi pendukung penanganan kasus.
2. Lakukan pemetaan dan analisis lembaga atau pihak tersebut
3. Lakukan kontak konsultasi dan koordinasi dengan masing-masing lembaga atau pihak tersebut
4. Menginisiasi pertemuan dengan seluruh lembaga atau pihak tersebut untuk menyamakan persepsi dan

mempertajam visi bersama.

5. Membangun komitmen bersama untuk berbagai layanan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki masing-masing lembaga. Perkuat dengan mendorong adanya MoU, Surat Keputusan, dan peraturan lainnya.
6. Menghimpun seluruh lembaga atau pihak dalam suatu wadah seperti tim kerja, dan sebagainya dengan jadwal pertemuan rutin bulanan untuk membahas kasus.
7. Membuat mekanisme koordinasi antar lembaga atau pihak yang dilibatkan. Tuangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus yang disepakati Bersama.
8. Mulailah bekerja sesuai rencana secara sistematis, konsisten dan bertahap.

Setelah sistem rujukan dibangun, langkah selanjutnya yakni mengembangkan sistem rujukan. Pengembangan sistem rujukan ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja sistem rujukan itu sendiri. Langkah-langkah dalam mengembangkan sistem rujukan antara lain sebagai berikut:

1. Menambah jumlah lembaga atau pihak potensial pendukung penanganan kasus.
2. Penataan sistem rujukan seperti penyelenggaraan pelatihan bersama, penguatan administrasi, manajemen, dan kepercayaan diantara pihak atau lembaga yang dilibatkan.

Rujukan Pustaka dan Bahan Bacaan lebih lanjut

Modul pelatihan manajemen kasus, bagi Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, Kemenppa: 2019

Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, Global Protection Cluste



CATATAN

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM SITUASI BENCANA

11

BENTUK-BENTUK KEKERASAN PADA ANAK

1. Abuse

Definisi *abuse* atau kekerasan adalah segala tindakan atau kegagalan melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan bahaya kepada anak atau merugikan potensi perkembangan yang aman dan sehat sampai menuju kedewasaan, baik dilakukan oleh individu, institusi, atau proses. Bentuk-bentuk *abuse* yaitu:

1. Kekerasan fisik: mencakup penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka nyata ataupun potensi luka atau penderitaan fisik (misalnya: memukul, mengguncang, membakar, menyiksa, memotong)
2. Kekerasan psikologis atau emosional: termasuk mempermalukan dan merendahkan seperti memberikan julukan, terus-menerus mengkritik, mencemooh, mempermalukan secara terus menerus, mengucilkan, dan mengisolasi
3. Kekerasan seksual: termasuk segala jenis kejahatan seksual seperti inses, pernikahan di bawah umur, memperkosa, atau mengikutsertakan anak di dalam pornografi dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual termasuk memberikan sentuhan tidak pantas atau menunjukkan kegiatan seksual kepada anak, menggunakan kata-kata cabul kepada anak, dan menunjukkan konten pornografi kepada anak

2. Penelantaran

Kesengajaan, atau karena kecerobohan atau kelalaian menyebabkan kegagalan untuk memberikan keamanan untuk anak, hak anak terhadap keamanan fisik dan perkembangan. Bentuk penelantaran atau kelalaian:

1. Kelalaian pengawasan: ditandai dengan tidak adanya atau kurangnya perhatian dan dapat menyebabkan kerusakan fisik atau cedera, kekerasan seksual atau, pada anak yang lebih tua, yang memungkinkan perilaku kriminal;
2. Kelalaian fisik: tandanya adalah kegagalan pengasuh untuk menyediakan kebutuhan fisik dasar, seperti pakaian, perumahan, makanan dan perawatan kesehatan yang aman, bersih dan memadai;
3. Kelalaian medis: tandanya adalah kegagalan pengasuh untuk memberikan perawatan medis yang tepat. Hal ini dapat terjadi karena kegagalan untuk mengakui keseriusan suatu penyakit atau kondisi, atau dengan sengaja tidak melakukan perawatan yang tepat;
4. Kelalaian emosional: ditandai dengan kurangnya kehangatan, kesehatan, dorongan dan dukungan dari pengasuh.
5. Kelalaian pendidikan: dicirikan oleh kegagalan pengasuh untuk memberikan pendidikan dan alat yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan;



6. Ditinggalkan (abandonment): ketika orang tua atau pengasuh meninggalkan seorang anak sendirian melebihi dari jangka waktu yang wajar dan tidak menyediakan kehadiran perawatan alternatif yang sesuai usia dan perkembangan anak.

3. Eksploitasi

Merujuk kepada mempergunakan anak untuk keuntungan pihak lain. Dapat berupa gratifikasi atau keuntungan yang menyebabkan ketidakadilan, kekejaman dan perlakuan membahayakan bagi anak. Eksploitasi membahayakan terhadap perkembangan fisik dan mental anak, pendidikan, moral, dan perkembangan sosialnya. Bentuk-bentuk eksploitasi:

1. Eksploitasi seksual: Penyalahgunaan posisi kerentanan, ketidakberdayaan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk untuk mendapat keuntungan ekonomi, sosial, politik dari eksploitasi yang dilakukan kepada orang lain termasuk kepuasan seksual pelaku. Contoh: prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seks, pornografi anak, turisme seks
2. Eksploitasi ekonomi: Memanfaatkan anak dalam pekerjaan atau aktivitas ekonomi lainnya untuk kepentingan orang lain dan membahayakan tumbuh kembang fisik anak, membahayakan perkembangan mental, kesehatan, pendidikan, moral sosial dan emosional anak. Contoh: pekerja anak, anak bekerja di tambang pasir

4. Kejahatan

Kesengajaan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan untuk mengancam atau langsung menyakiti anak, baik oleh perseorangan atau grup, baik berpotensi ataupun telah memberikan akibat berupa bahaya kepada kesehatan, keselamatan, perkembangan atau kehormatan anak. (WHO dalam the World Report on Violence and Health (2002))

PERLIDUNGAN YANG DIBUTUHKAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Tujuh jenis perlindungan yang dibutuhkan anak dalam situasi darurat, yakni:

1. Perlindungan dari bahaya dan cedera;
2. Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan berbasis gender;
3. Perlindungan dari tekanan psikososial;
4. Perlindungan dari perekrutan kelompok bersenjata;
5. Perlindungan dari keterpisahan dengan keluarga;
6. Perlindungan dari kekerasan akibat mengungsi;
7. Perlindungan dari pengabaian anak mengakses pendidikan berkualitas

DAMPAK JANGKA PANJANG KEKERASAN PADA ANAK

Korban atau kasus anak yang mengalami kekerasan akan mengalami dampak, baik dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjang. Beberapa penelitian menemukan dampak jangka panjang yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Adanya distorsi kognitif, seperti merasa salah, malu, menyalahkan diri sendiri.
2. Gangguan perasaan (mood disturbance), seperti ansietas atau depresi.
3. Kehilangan minat untuk bersekolah seperti sering melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos, tidak peduli terhadap hasil ulangan atau ujian,
4. Stres pasca trauma seperti terus menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas menghadapi lingkungan yang agak berubah.
5. Masalah /problem diri sendiri (interpersonal), seperti melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam, takut terhadap sikap ramah/kehangatan/kemesraan dari orang lain.

6. Perilaku membahayakan atau menyakiti diri sendiri, seperti percobaan bunuh diri, mutilasi/membuat cacat diri sendiri.
7. Perilaku regresif seperti mengompol, menempel atau melekatkan diri pada orang dewasa, menarik diri dari pergaulan, menjadi hiperaktif dan menunjukkan aktivitas berlebihan, menunjukkan perilaku tantrum contohnya mengamuk, menangis berlebihan atau berguling guling.
8. Menggunakan narkotik dan zat adiktif lainnya.
9. Gangguan personalitas.
10. Gangguan tidur dan mimpi buruk.
11. Masalah psikosomatik seperti nyeri daerah pelvis.
12. Problem/gangguan makan.
13. Lebih lanjut korban dapat menjadi psikosis.
14. Adanya gangguan personalitas multipel.
15. Dampak kecacatan pada fisik yang dapat mengganggu fungsi tubuh atau anggota tubuh tersebut.
16. Anak yang mengalami abuse dapat menjadi abuser nantinya bila dewasa.

JENIS KELAMIN VERSUS GENDER

Kita dilahirkan dengan seks; ini menggambarkan perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Gender adalah apa yang masyarakat dan budaya ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus berperilaku berdasarkan jenis kelamin kita. Gender berkaitan dengan apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan, perempuan atau laki-laki, dalam masyarakat atau budaya tertentu. Gender menentukan peran, tanggung jawab, hak istimewa, harapan dan batasan laki-laki dan perempuan di setiap budaya. Ini mencakup cara pria memandang diri mereka sendiri sebagai pria, dan cara pria memandang wanita sebagai

wanita. Persepsi dan kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti sejarah, tradisi, agama dan norma sosial.

DEFINISI KEKERASAN BERBASIS GENDER

Kekerasan berbasis gender adalah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik, dan tidak semua orang yang memiliki kekuasaan menyalahgunakannya, kekuasaan dapat digunakan untuk mendominasi, meminggirkan, memaksa orang lain untuk bertindak bertentangan dengan keinginan mereka dan untuk memaksakan pembatasan dalam kehidupan orang lain. Kekuasaan terkait langsung dengan pilihan, sehingga orang-orang dengan sedikit kekuasaan - seperti anak-anak dan banyak perempuan - memiliki lebih sedikit pilihan dan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Meskipun perempuan dan laki-laki memiliki hak asasi manusia yang sama, norma-norma gender biasanya memberlakukan pembatasan pada perempuan dan anak perempuan pada khususnya, yang berkembang/diberikan ekspektasi rendah terhadap hak-hak mereka.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENINGKATKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Berikut adalah faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan kekerasan berbasis gender:

1. Perpindahan paksa
2. Kemiskinan
3. Praktik Budaya
4. Bencana
5. Konflik/ Perang



NORMAL SOSIAL DAN PRAKTIK BERBAHAYA

Norma sosial adalah ketentuan-ketentuan yang ada di suatu masyarakat yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku di dalam konteks tertentu. Dalam banyak konteks, praktik-praktik berbahaya adalah norma sosial. Banyak bentuk kekerasan yang mungkin didukung norma sosial, seperti “hak” orang tua untuk memukul anak-anak mereka. Beberapa norma ini adalah bagian dari warisan budaya.

Situasi darurat dapat menyediakan kesempatan untuk mendiskusikan norma-norma sosial yang menimbulkan kekerasan, terutama jika kekerasan dialami selama situasi darurat dan ada keinginan kuat untuk mempromosikan penyelesaian konflik dan perselisihan secara damai.

Cara sederhana untuk mengetahui apakah sebuah praktik berbahaya terhadap anak termasuk norma sosial adalah dengan menanyakan:

1. Apakah semua orang melakukan praktik yang sama terhadap anaknya?
2. Jika ya, apakah mereka percaya bahwa anaknya berpikir bahwa mereka memang harus terlibat atau menerima praktik-praktik berbahaya atau kekerasan fisik itu?
3. Jika ya, maka tingkah laku itu memang disepakati bersama, sehingga memang merupakan sebuah norma sosial.

MONITORING PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK

Ketika mempersiapkan sistem monitoring perlindungan anak atau melakukan asesmen awal, pertimbangkan untuk mengumpulkan informasi yang ada mengenai:

1. Risiko yang berhubungan dengan kekerasan bagi anak perempuan dan anak laki-laki

2. Risiko khusus untuk anak perempuan dan anak laki-laki dengan disabilitas
3. Risiko khusus untuk anak laki-laki dan risiko khusus untuk anak perempuan
4. Risiko khusus untuk remaja perempuan dan remaja laki-laki
5. Tempat yang paling berisiko bagi anak perempuan dan anak laki-laki, orang yang dianggap berbahaya bagi anak perempuan dan anak laki-laki
6. Kapasitas anak perempuan dan anak laki-laki untuk menghadapi beragam risiko ini
7. Mekanisme pencegahan dan penanganan yang telah tersedia
8. Layanan dukungan dan program kesehatan, psikososial, penegakan hukum, dan bantuan hukum lain apa yang sudah ada untuk korban, dan ke mana anak perempuan dan anak laki-laki dapat mencari bantuan.

DAFTAR KEGIATAN KESIAPSIAGAAN KEKERASAN PADA ANAK

1. Petakan praktik-praktik berbahaya yang mungkin meningkat selama situasi darurat
2. Lakukan pelatihan perlindungan anak kepada pekerja kemanusiaan, aparat penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan
3. Petakan dan buat daftar kontak lembaga-lembaga penyedia layanan sebagai tempat rujukan (P2TP2A, psikolog, kepolisian, NGO yang bergerak di bidang perlindungan anak, dsb;
4. Sebarkan daftar rujukan penyedia layanan
5. Siapkan materi dan media kampanye tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang sederhana dan mudah dimengerti untuk anak, orangtua, dan masyarakat dalam konteks situasi darurat

DAFTAR KEGIATAN RESPON KEKERASAN PADA ANAK

1. Identifikasi pola kekerasan terhadap anak yang terjadi atau mungkin terjadi di masyarakat yang terdampak situasi darurat
2. Tingkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak dan orang dewasa mengenai gejala tekanan psikososial
3. Libatkan anak-anak dan tokoh masyarakat di lokasi tersebut dalam memproduksi dan menyebarkan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak dan layanan dukungan
4. Memfasilitasi diskusi dan mencari jalan keluar untuk mengakhiri praktik-praktik atau menekan potensi risiko kekerasan yang terjadi

5. Membangun mekanisme monitoring melalui pertemuan rutin bersama anak dan para tokoh masyarakat
6. Fasilitasi pendirian ruang ramah anak dan memastikan ruangan ini menghindarkan anak dari kekerasan
7. Memastikan semua pekerja kemanusiaan yang bekerja di lokasi kamp tersebut menandatangani kode etik berkegiatan bersama anak dan disiplin positif

RUJUKAN PUSTAKA DAN BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT

Child protection implementation guidelines international programs, Save the Children

CATATAN



12 KETERPISAHAN ANAK

ISTILAH SEPUTAR ISU KETERPISAHAN PADA ANAK DAN KELUARGA

1. **Anak-anak yang terpisah:** adalah mereka yang terpisah dari kedua orang tuanya, atau dari pengasuh utama mereka yang sah atau biasa, tetapi tidak harus dari kerabat lain. Oleh karena itu, ini mungkin termasuk anak-anak yang ditemani oleh anggota keluarga dewasa lainnya.
2. **Anak tanpa pendamping:** adalah anak-anak yang telah dipisahkan dari kedua orang tua dan kerabat lainnya dan tidak diasuh oleh orang dewasa yang, menurut hukum atau adat, bertanggung jawab untuk itu.
3. **Yatim piatu:** adalah anak-anak yang kedua orang tuanya diketahui telah meninggal. Akan tetapi, di beberapa negara, seorang anak yang kehilangan salah satu orang tuanya disebut yatim piatu. Indonesia memiliki istilah Yatim (ayah meninggal), Piatu (ibu meninggal), atau Yatim Piatu (kedua orang tuanya meninggal). Dalam situasi tertentu, anak disebut anak dengan kepala keluarga.
4. **Anak hilang:** adalah anak yang orang tua/walinya menyampaikan laporan kehilangan anaknya pada saat acara berlangsung dan memerlukan dukungan untuk melakukan penelusuran. Anak-anak yang hilang tersebut mungkin telah terdaftar sebagai anak yang terpisah/tidak ditemani di tempat lain.

PENYEBAB ANAK TERPISAH

1. **Keterpisahan secara terpaksa/tidak disengaja:** Anak terpisah karena situasi yang memaksa dan tanpa persetujuan keluarga misalnya, pengungsian, kematian, atau penculikan
2. **Keterpisahan secara disengaja:** Anak ditinggalkan atau ditiptikan untuk dirawat orang lain atau di panti asuhan (mungkin karena percaya bahwa anak akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup atau mengakses layanan) atau saat anak memutuskan untuk pergi sendiri

Penyebab keterpisahan:

1. Kematian orang tua
2. Penculikan
3. Keterpisahan dari keluarga saat terjadi penyerangan di desa atau kota
4. Dipaksa bergabung atau memutuskan bergabung dengan angkatan bersenjata
5. Upaya menyelamatkan diri dari kekerasan atau kurangnya perawatan dan perhatian di rumah
6. Keluarga meninggalkan anak
7. Anak ingin mendapat peluang belajar lebih baik
8. Anak ingin mendapat peluang kerja lebih baik
9. Anak pergi untuk menghindari kawin paksa/pernikahan dini/adopsi paksa

Risiko kekerasan yang dialami anak yang terpisah

Anak-anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuh biasanya menghadapi banyak risiko. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dipisahkan, anak-anak ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk:

1. Mengalami kekerasan, khususnya anak perempuan yang mungkin mengalami kekerasan seksual
2. Dipaksa menjadi pekerja seks komersial
3. Direkrut oleh kelompok bersenjata
4. Menikah muda (terutama anak perempuan)
5. Melakukan pekerjaan berat dan berbahaya serta tidak mendapat bayaran yang pantas
6. Kelaparan
7. Diteriaki dan tidak dihargai
8. Tidak mendapatkan warisan
9. Dipaksa menikah
10. Menyalahgunakan obat-obatan
11. Tidak mendapat layanan kesehatan layak
12. Tidak mendapat pendidikan layak
13. Tidak memiliki waktu untuk bermain dengan teman
14. Merasa kesepian
15. Merasa tidak dikasihi
16. Merasa tertekan
17. Merasa takut

DAMPAK ANAK YANG TERPISAH

Pemisahan dapat berdampak berikut pada anak:

1. Kehilangan identitas, terutama bagi anak di bawah 5 tahun
2. Pemisahan permanen (kebetulan Identitas, perubahan wajah, tidak pernah tahu asal usul)
3. Kematian, cedera fisik dan kesehatan yang buruk, termasuk risiko penularan HIV/AIDS

4. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi
5. Penangkapan dan penahanan (tidak ada dokumentasi yang tepat...)
6. Penculikan, misalnya, untuk perdagangan atau perburuan
7. Perekrutan atau penggunaan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata
8. Pelecehan dan eksploitasi seksual
9. Tekanan emosional dan/atau psikososial yang parah
10. Pernikahan dini/awal kehamilan
11. Pekerja anak, termasuk untuk anak-anak dalam pengasuhan berbasis keluarga
12. Pelembagaan, potensi dampak negatif pada perkembangan anak, pelecehan dan penelantaran
13. Hidup dan/atau bekerja di jalanan
14. Kurangnya dukungan perkembangan yang sesuai; kesulitan mengakses, diskriminasi mengenai atau penolakan akses ke dukungan dan layanan dasar, termasuk jatah makanan, bantuan kemanusiaan, perawatan kesehatan, dukungan psikososial dan Pendidikan

PENCEGAHAN KETERPISAHAN ANAK

1. Lakukan kampanye penyampaian pesan dan informasi yang sesuai kontekstual, ramah anak, dan berbasis komunitas
2. Identifikasi dan pantau lokasi di mana pemisahan dapat terjadi dan upayakan untuk memfasilitasi reunifikasi cepat bagi mereka yang terpisah hanya dalam hitungan jam.
3. Identifikasi focal point dalam komunitas atau buat 'pos anak hilang',
4. Bekerja dengan polisi, petugas perbatasan, kedutaan dll. Untuk mencegah pergerakan ilegal atau tidak pantas UASC ke luar negeri.



PRINSIP PENANGANAN ANAK YANG TERPISAH DAN ANAK TANPA PENDAMPING UASC (INTER-AGENCY GUIDING PRINCIPLES ON UASC OF 2004:

1. **Prinsip Do No Harm:** adalah prinsip Lembaga-lembaga yang melakukan penanganan anak terpisah untuk memastikan keamanan fisik dan kesejahteraan psikologis anak selama proses penyatuan kembali dengan keluarganya. Langkah terpenting untuk memastikan tidak ada tindakan membahayakan dalam kegiatan FTR adalah verifikasi informasi yang diberikan oleh anak, dan informasi yang diberikan oleh keluarga. Apabila penyatuan kembali dapat menyebabkan trauma atau dampak negatif kepada anak, ini yang perlu dipertimbangkan apakah anak dan keluarga secara fisik dipersatukan atau cukup dengan komunikasi. Selain itu, jangan selalu diasumsikan bahwa penyatuan keluarga adalah terbaik bagi anak (best interest of the child).
2. **Kepentingan terbaik anak:** Merupakan standar dasar untuk memandu keputusan dan tindakan yang diambil untuk membantu anak, baik oleh organisasi nasional atau internasional, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif. Prinsip Panduan Antar Lembaga ini harus dipertimbangkan saat menentukan kepentingan terbaik anak dalam situasi tertentu
3. **Asas persatuan keluarga:** Menyatakan bahwa semua anak berhak atas keluarga, dan keluarga berhak mengasuh anak-anak mereka. Anak-anak tanpa pendamping dan terpisah harus diberikan layanan yang bertujuan untuk menyatukan mereka kembali dengan orang tua atau pengasuh hukum atau adat mereka secepat mungkin. Jika sejumlah besar anak dipisahkan dari orang tua atau kerabat lain dalam keadaan darurat, prioritas harus diberikan kepada mereka yang paling rentan, baik ditemani atau tidak ditemani, dengan mempertimbangkan bahwa mereka cenderung lebih rentan.
4. **Membangun dukungan berbasis masyarakat:** Dukungan masyarakat menjadi penting menimbang dukungan lembaga kemanusiaan yang terbatas dan bersifat sementara. Dukungan berbasis masyarakat untuk penyatuan keluarga sangat tergantung dari sumber daya yang ada dan aktivasi para “penggerak” di masyarakat. Para penggerak ini membantu mengidentifikasi anak, memberikan pengasuhan sementara, menelusuri dan memverifikasi kerabat.
5. **Kerahasiaan:** Kerahasiaan dalam FTR mencakup pembatasan dalam distribusi informasi. Proses identifikasi informasi personal anak dan keluarga harus menjamin keamanan mereka. Nama anak (misalnya nama yang berbeda dari kelompok minoritas atau tidak disukai) dapat menyebabkan kekerasan pada anak tersebut. Keamanan data dan pembagian informasi antar Lembaga yang aman menjadi prioritas dalam kesuksesan kegiatan FTR.
6. **Non-diskriminasi:** salah satu prinsip dasar hukum humaniter internasional adalah bahwa perlindungan dan jaminan yang diberikan harus diberikan kepada semua tanpa diskriminasi. Jadi keempat Konvensi Jenewa dan kedua Protokol Tambahan menyatakan bahwa “kategori orang tertentu yang mereka lindungi harus diperlakukan secara manusiawi (...) tanpa perbedaan yang merugikan berdasarkan jenis kelamin ...”. Konvensi Hak Anak memperkuat prinsip utama ini dan menyatakan bahwa anak perempuan memiliki kebutuhan tambahan dan spesifik yang harus

dipertimbangkan dalam program untuk perawatan dan perlindungan mereka.

7. **Partisipasi anak:** Pendapat seorang anak harus didengarkan dan dipertimbangkan sehubungan dengan usia dan kedewasaan anak tersebut. Anak-anak harus terus diberi informasi tentang rencana yang dibuat untuk mereka. Ini termasuk keputusan tentang penempatan dan perawatan, penelusuran dan reunifikasi. Program harus secara aktif melibatkan anak-anak dalam pencegahan dan tanggapan terhadap perpisahan.
8. **Koordinasi lintas Lembaga:** Kegiatan FTR adalah sebuah kegiatan kolaboratif yang tidak bisa dilakukan oleh 1 lembaga. Dengan demikian, membangun kelompok kerja lintas lembaga menjadi komponen vital, bukan sekedar memenuhi standar kepatutan. Dalam setiap pertemuannya, antar lembaga kemanusiaan biasanya berbagi informasi, tantangan di lapangan, update pengungsian, kebutuhan dukungan, peningkatan kapasitas staf, dan berbagi pembelajaran. Perlu diingat untuk melibatkan aktor pemerintah yang memiliki tupoksi di bidang perlindungan anak
9. **Manajemen kasus:** Pendekatan manajemen kasus digunakan pada anak dan keluarga yang mengalami kasus perlindungan anak. FTR adalah salah satu kegiatan yang memberikan layanan dengan pendekatan manajemen kasus yang holistic. Melalui pendekatan manajemen kasus, kebutuhan perlindungan yang spesifik akan teridentifikasi. Kemudian intervensi akan dilakukan melalui dukungan langsung (direct support) atau rujukan.

TAHAPAN PENELUSURAN DAN REUNIFIKASI KELUARGA:

Mobilisasi Masyarakat

1. Menjangkau dan membangun sensitivitas masyarakat
 - Pesan Pencegahan Keterpisahan
 - Anak-anak yang menjadi sasaran program (Definisi)
 - Lembaga yang bekerja di wilayah (Jalur Rujukan)
 - Proses dalam FTR
2. Jika ada, pemanfaatan dukungan berbasis masyarakat atau dikenal Jaringan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (JPABM) menjadi aspek penting dalam kegiatan FTR. Apakah peran dari jaringan ini:
 - Membantu mengidentifikasi anak yang terpisah dari orang tua dan melengkapi pendaftaran anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping serta mengisi formulir penelusuran
 - Membantu mengasuh anak selama penelusuran dilakukan/menemukan keluarga asuh dari masyarakat
 - Membantu menelusuri kerabat anak
 - Membantu memverifikasi kerabat (memastikan anak bertemu kerabatnya)
 - Membantu memutuskan apakah anak memang ingin bertemu kembali dengan keluarganya (apakah ada bahaya yang mungkin mengancam anak di rumah. Misalnya, kekerasan seksual, verbal, atau fisik)
 - Membantu mempersiapkan anak dan kerabat untuk reunifikasi – memberi mereka informasi mengenai keadaan dan hal yang dialami masing-masing pihak selama terpisah
 - Membantu mencari alternatif perawatan anak jika kerabat tidak ditemukan atau jika tinggal bersama kerabat bukanlah hal terbaik bagi anak



Bagaimana mengidentifikasi anak yang terpisah dari keluarga:

1. Saat ada anak baru yang tidak Anda kenali di desa
2. Saat anak sendirian, tanpa pendampingan orang dewasa
3. Saat anak tidur di pasar atau tempat lainnya setiap malam
4. Saat anak terlihat lusuh dan tidak terawat
5. Saat anak kurang gizi atau sakit
6. Saat anak perempuan memiliki anak
7. Saat Anda merasa anak mungkin terlibat dalam eksploitasi seks komersial anak

Penyebab anak terpisah dari keluarga:

1. *Keterpisahan secara terpaksa/tidak disengaja:* Anak terpisah karena situasi yang memaksa dan tanpa persetujuan keluarga misalnya, pengungsian, kematian, atau penculikan
2. *Keterpisahan secara disengaja:* Anak ditinggalkan atau dititipkan untuk dirawat orang lain atau di panti asuhan (mungkin karena percaya bahwa anak akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup atau mengakses layanan) atau saat anak memutuskan untuk pergi sendiri

Identifikasi

Proses identifikasi menentukan anak yang mana yang terpisah dari keluarga/pengasuh mereka dan di mana mereka ditemukan. Informasi yang didapatkan pada saat identifikasi harus memadai untuk menghubungkan kembali pihak pendokumentasian dengan anak.

Dimana menemukan anak yang perlu didaftarkan:

1. Pengasuhan spontan oleh masyarakat
2. Hidup mandiri
3. Tinggal di jalanan

4. Rumah sakit rujukan, puskesmas, kamp darurat, atau klinik medis
5. Pusat layanan gizi/markas kelompok militan
6. Penjara atau tempat penahanan
7. Bangunan ibadah
8. Angkatan atau kelompok bersenjata
9. Lingkungan kerja – pabrik, rumah (sebagai pembantu rumah tangga), pasar

Dokumentasi

Kebutuhan formulir penelusuran dan sistem pengelolaan informasi perlindungan anak antar lembaga.

Penelusuran

Penelusuran adalah upaya menelusuri orang tua atau anggota keluarga besar seorang anak; Panggilan ke lembaga-lembaga di kota asal anak; Berbagi foto dan atau daftar penelusuran; Mengumumkan berita anak hilang di kamp; Membuat saluran telepon; Penelusuran individu/ penelusuran kelompok; Kebutuhan akan alat penelusuran

Tidak semua petugas layanan perlindungan akan melakukan penelusuran—hanya beberapa lembaga, seringkali hanya satu, yang bertugas melakukan “penelusuran” secara resmi. Hal ini disebabkan karena program penelusuran membutuhkan banyak sumber daya, termasuk jumlah staf yang besar, kendaraan, dan sistem komunikasi yang baik.

Baik terlibat dalam program penelusuran maupun tidak, Anda harus mendukung kegiatan penelusuran untuk semua anak yang terpisah dari orang tuanya. Bagian ini memberikan informasi tentang metode penelusuran.

PRINSIP PENELITIAN:

1. *Penelitian Awal*: penelitian dimulai segera setelah terjadinya perpisahan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan.
2. *Koordinasi yang Kuat*: Koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan semua lembaga terkait.
3. *Hak Anak*: Anak berhak untuk ditanyai: Selalu beritahukan perkembangan informasi dan libatkan anak dalam penelitian, karena mereka adalah sumber informasi berharga.
4. *Hak dan Kebutuhan Emosional*: Hak dan kebutuhan emosional anak dan orang tua untuk mengetahui apakah orang tua atau anaknya masih hidup: Kecuali jika berpotensi tidak aman, coba jalin komunikasi antara anak dengan keluarga sesegera mungkin, bahkan jika reunifikasi belum mungkin dilakukan karena alasan keamanan atau lainnya.
5. *Bagian Penting dari Penelitian*: Bagian penting dari penelitian yang dapat dilakukan penduduk setempat: Penduduk setempat lebih akrab dengan medan dan lokasi populasi. Manfaatkan pengetahuan mereka! Anggota masyarakat tempat anak tinggal adalah informan terbaik; Jika mereka dapat diakses, tanyakan tentang kemungkinan keberadaan keluarga anak tersebut. Penelitian adalah kegiatan padat karya: libatkan asosiasi atau kelompok setempat seperti kelompok wanita, kelompok pemuda, dll sebagai sukarelawan. Umumnya, jika anggota masyarakat tempat anak tinggal dapat diakses, mulailah penelitian dari mereka terlebih dahulu.
6. *Penelitian yang Baik*: Penelitian yang proaktif tetapi lebih mengutamakan keamanan anak dan keluarganya. Anda harus berhati-hati saat membagikan informasi ke seluruh organisasi utama yang terlibat dalam penelitian serta menjaga kerahasiaan

dan keamanan individu. Tidak menyebarkan foto, daftar, atau lokasi terkini anak ke orang asing.

7. *Kesabaran dan Komitmen*: Kesabaran dan komitmen jangka panjang: Pengungsian dapat menunda penyatuan anggota keluarga selama beberapa tahun.
8. *Penelitian dan Reunifikasi Anak*: Penelitian dan mempertemukan kembali anak dengan keluarganya bukan serta merta akhir dari proses: Anda harus berkomitmen untuk memfasilitasi penyesuaian masuknya kembali anak ke dalam keluarga melalui persiapan reuni keluarga yang memadai dan melakukan tindak lanjut atau rujukan setelahnya.
9. *Mengamankan Izin Kegiatan*: Amankan izin kegiatan penelitian keluarga dari otoritas terkait, jika diwajibkan, sehingga tidak ada potensi bahaya bagi anak dan keluarganya untuk melakukan hal tersebut.

HAMBATAN SAAT MELAKUKAN PENELITIAN:

1. Data tidak lengkap
2. Kecemasan;
3. Koordinasi dan kolaborasi antarlembaga yang buruk;
4. Akses terbatas;

APA ITU VERIFIKASI?

Verifikasi berarti memastikan kebenaran suatu hal. Hal ini berarti memeriksa apakah informasi tersebut benar dan faktual.

Contoh, mungkin Anda berpikir telah menemukan ibu dari anak yang terpisah. Namun, kebenarannya harus dipastikan dengan mengajukan banyak pertanyaan ke ibu dan anak dan mencocokkan jawabannya.

Banyak anak yang terpisah ketika masih muda, sehingga mungkin mereka sulit mengingat sesuatu tentang keluarganya.



Banyak orang mengungsi karena perang dan mungkin anak tidak tinggal di tempat ia ingat. Maka dari itu sangat penting untuk memastikan bahwa yang kita temukan adalah keluarga yang tepat.

Setiap kali orang dewasa mengklaim anak, atau ada anggota keluarga yang terlacak, identitas dan klaim mereka harus diverifikasi sebelum orang dewasa dan anak tersebut dipersatukan. Klaim bisa saja keliru atau palsu, beberapa keluarga dapat mengklaim anak yang sama.

Di semua kasus, perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama.

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang harus diambil dalam memverifikasi hubungan antara anak dan pengklaim dewasa.

Verifikasi harus dilakukan secara informal di sepanjang tahap penelusuran dan secara formal setiap kali klaim dibuat.

PERTANYAAN YANG TEPAT SAAT MELAKUKAN PENELUSURAN:

1. Dapatkah Anda mengingat beberapa nama teman anak Anda? [Pertanyaan bagus]
2. Apakah Anda punya tetangga bernama Deng? [Pertanyaan buruk]
3. Apa makanan favorit anak Anda waktu kecil? [Pertanyaan bagus]
4. Berapa jumlah saudara kandung anak Anda? [Pertanyaan bagus]
5. Apakah sahabat anak Anda bernama Aruk? [Pertanyaan buruk]
6. Dapatkah mengingat peristiwa khusus yang penting untuk anak Anda? [Pertanyaan bagus]
7. Kalau anak Anda punya tanda lahir di wajah, boleh jelaskan seperti apa? [Pertanyaan bagus]
8. Apa makanan favorit anak Anda daging? [Pertanyaan buruk]

Reunifikasi

Tahap selanjutnya setelah melakukan verifikasi dan mengonfirmasi hubungan adalah reunifikasi. Baik anak dan orang tua harus dilibatkan dalam proses persiapan agar mereka siap untuk proses reunifikasi. Selama persiapan reunifikasi, pastikan bahwa orang dewasa telah mengonfirmasi kemauan mereka untuk merawat anak dan anak merasa nyaman dengan proses reunifikasi ini.

Pastikan untuk memperoleh dokumentasi yang layak sebelum melakukan reunifikasi. Seorang anak harus selalu didampingi oleh pekerja sosial saat reunifikasi berlangsung. Baik anak & orang tua harus dilibatkan dalam proses persiapan proses reunifikasi. Prosedur tindak lanjut yang memadai membutuhkan peran serta dan dukungan masyarakat.

Reunifikasi harus ditinjau secara berkala dan pemantauan tindak lanjut harus rutin dilakukan untuk memastikan perawatan yang berkualitas - sertakan input dari anak itu sendiri. Perlu mempertimbangkan faktor dorong dan tarik (push and pull) yang menyebabkan perpisahan dan apakah perpisahan tersebut disengaja atau tidak.

TINDAK LANJUT REUNIFIKASI:

1. Walaupun sudah disatukan kembali dengan keluarganya, tindak lanjut harus dilakukan. Lingkungan perawatan harus dipantau guna mengetahui penyesuaian diri kembali anak dengan keluarga.
2. Tindak lanjut juga berfungsi untuk memastikan bahwa anak dan keluarga tersebut memiliki akses ke layanan yang dibutuhkan dan mendapatkan dukungan masyarakat.
3. Semua tindak lanjut yang dilakukan harus didokumentasikan dalam format yang tepat.
4. Panduannya ada di *Toolkit Perawatan*

Alternatif

5. Terus kunjungi dan dukung anak dan keluarga tersebut selama dibutuhkan.
6. Beri rujukan ke layanan

PENUTUPAN:

1. Kompleks, konteks, dan spesifik kasus
2. Panduan dikembangkan oleh IMS
3. Kasus yang telah ditutup dapat dibuka lagi jika situasi berubah.
4. Kasus bisa ditutup jika dialihkan ke lembaga lain, anak meninggal, dukungan tidak lagi dibutuhkan, dll.

RUJUKAN PUSTAKA DAN BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT

A practice handbook, for family tracing and reunification in emergencies: Save the Children, 2017

Materi pelatihan-Manajemen Kasus dan Pelatihan Penelusuran dan Reunifikasi Keluarga (FTR) di Sudan Selatan: Save the Children 2016

CATATAN



13

ASESMEN, MONITORING, DAN EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

DEFINISI ASESMEN

Asesmen perlindungan anak dalam situasi darurat adalah kegiatan dalam upaya menilai dampak dari situasi darurat kepada anak. Kegiatan yang biasa dilakukan berbentuk kajian cepat perlindungan anak atau dikenal dengan istilah CPRA (Child Protection Rapid Assessment). Kajian cepat perlindungan anak membantu kita untuk melihat a) Skala kebutuhan dan risiko; b) Prioritas respon perlindungan anak; c) Bagaimana respon di lakukan (menimbang kapasitas dan sumber daya yang ada)

DEFINISI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah Suatu penilaian yang dilaksanakan terus -menerus (berkelanjutan) dalam suatu kegiatan untuk program. Evaluasi adalah mengkaji nilai/hasil sesuatu (hasil kerja), proses membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan. Pengertian dan pemahaman tentang evaluasi ini membantu orang yang terlibat dalam program program pengembangan untuk mengkaji hasil kerja mereka secara sistematis.

PILAR MONITORING DAN EVALUASI

Pilar melakukan monitoring dan evaluasi:

1. Memiliki rencana kerja yang jelas, meliputi:

- Perubahan yang ingin dicapai
- Apa yang perlu dihasilkan untuk mencapai tujuan
- Apa yang perlu dilakukan
- Siapa penanggung jawabnya
- Siapa saja yang terlibat
- Kapan dan dimana akan dilaksanakan
- Apa saja yang diperlukan

2. Memiliki tujuan, pada umumnya tujuan monitoring dan evaluasi memiliki 2 hal pokok yaitu:

A. BELAJAR DARI PENGALAMAN

Secara terus menerus mencari “pelajaran baru” dari apa yang telah kita kerjakan selama ini. Pelajaran yang baru itu bisa menjadi masukan yang sangat berharga untuk perbaikan kinerja kita ke depan.

- Meningkatkan kinerja ke arah yang efektif: tujuan yang ditentukan.
- Meningkatkan kinerja ke arah yang efisien: tepat waktu, tidak boros
- Melihat dengan jernih sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan pekerjaan yang sedang dilakukan. Sehingga kita bisa meningkatkan kekuatan yang kita miliki, dan berusaha mengurangi kelemahan yang ada.

B. MENJADI TANGGUNG GUGAT

- Memberikan jawaban secara terbuka dan jujur terhadap apa saja yang ingin diketahui oleh masyarakat menyangkut suatu program dimana masyarakat berkepentingan terhadap program itu.
- Selain siap menjawab, kita harus siap “digugat” oleh masyarakat jika pekerjaan kita dianggap tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang telah disepakati sebelumnya.

3. MEMILIKI PRINSIP-PRINSIP

- *Partisipatif*, melibatkan banyak pihak mulai perencanaan hingga evaluasi.
- *Terbuka*, pertanggungjawaban dilaporkan secara terbuka.
- *Tanggung gugat*, pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya bisa ditanggung gugat di depan masyarakat luas.
- *Kesetaraan*, semua pihak terlibat mempunyai hak dan kedudukan setara.
- *Kejujuran*, pelaporan dilakukan dengan jujur dan sesuai kondisi lapangan.
- *Berjiwa besar*, Berjiwa besar menerima dan memberikan kritik dan saran
- *Keterpaduan*, Dilakukan melihat semua arah secara terpadu dan menyeluruh
- *Fleksibel*, tidak kaku, sesuai dengan keadaan waktu dan tempat
- *Kesepakatan*, pelaksanaan didasarkan pada kesepakatan semua pihak.

BAGAIMANA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)?

Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan pembuatan rencana monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dapat membantu kita Menyusun rencana monitoring dan evaluasi:

1. Apa yang perlu di monev?
2. Tolok ukur (indikator) apa yang dipakai?
3. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasi proses monev?

4. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Apa perannya?
5. Kapan dan dimana masing-masing langkah monev akan dilaksanakan?
6. Bagaimana monev akan dilakukan (pilihan bentuk, cara dan alat)?
7. Bagaimana kita akan mengemas hasil monev?
8. Kepada siapa kita akan membagikan hasil monev?

1. Apa yang dimonev?

Hal-hal yang akan dimonev sangat tergantung tujuan monev itu sendiri.

1. Perencanaan, apakah perencanaan program telah dilakukan bersama-sama (mengundang banyak pihak yang akan dilibatkan dalam program)?
2. Kegiatan, apakah kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik (tepat waktu, sesuai anggaran, partisipasi semua pihak, dll)
3. Penggunaan sumber daya, apakah penggunaan sumber daya sudah cukup baik? (tidak boros, tidak berlebihan)?
4. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan? Apakah kita telah melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat lain, LSM, pemerintah, donor, dll) sesuai kesepakatan?
5. Hasil, apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum?
6. Tujuan dan manfaat, apakah tujuan program sudah tercapai? Apakah masyarakat bisa merasakan manfaat dari program?
7. Nilai-nilai, apakah nilai-nilai yang telah disepakati masih ditaati oleh semua pihak?



2. Indikator yang digunakan

Indikator digunakan untuk memudahkan dalam menilai keberhasilan, kegagalan atau kondisi suatu program. Contoh indikator yang biasa dipakai untuk mengevaluasi sebuah program:

1. Apakah hasil program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?
2. Jumlah kegiatan pencegahan yang dilakukan?
3. Berapa persen jumlah anak penerima manfaat?
4. Berapa persen anak yang dirujuk?

3. Siapa yang melakukan monev

Sebelum menjawab pertanyaan siapa yang melakukan monev, maka kita perlu membedakan dua pertanyaan berikut:

1. a. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasikan proses monev?
2. b. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Perannya apa?

Seperti dalam permainan sepakbola, pertanyaan pertama adalah sama dengan siapa yang menjadi kapten. Pertanyaan kedua adalah sama dengan siapa yang menjadi pengatur serangan, penjaga gawang, penyerang, dsb. Jika monev dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak program lah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4. Kapan dan dimana dilakukan?

Pada prinsipnya monev dilakukan kapan saja, dan menjadi bagian tidak terpisahkan seiring dengan berjalannya kegiatan atau program. Namun demikian, seringkali kegiatan monev menjadi terlupakan karena tidak ditetapkan waktunya. Guna menetapkan waktu yang paling cocok, pertimbangkan saat strategis sesuai program kerja. Pilihannya adalah:

1. Awal, pertengahan dan akhir program
2. Terus menerus, perbulan, perkuartal, pertahunan
3. Beberapa bulan setelah program atau proyek selesai
4. Mengikuti alur kegiatan yang disepakati bersama

Penentuan tempat monev, tergantung apa yang dimonev dan cara yang dipilih. Secara umum:

1. Untuk pengamatan secara langsung, monev perlu dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan
2. Untuk diskusi dan pelaporan sebaiknya dilakukan di tempat yang nyaman dan gampang dijangkau oleh semua pihak yang perlu terlibat.

Rujukan Pustaka dan Bahan Bacaan lebih lanjut

- Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, Global Protection Cluster
- Child Protection Rapid Assessment Toolkit, Global Protection Cluster CPWG, 2012
- Monitoring & Evaluasi: Sebagai Media Belajar, DFID, 2001

CATATAN



14

KOORDINASI DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

DEFINISI KOORDINASI PADA SITUASI DARURAT

Koordinasi adalah cara, proses dan struktur untuk memastikan kebutuhan perlindungan dan kebutuhan dasar kemanusiaan dari orang-orang yang terdampak bencana/ situasi krisis dapat dipenuhi dan mencegah/ menghindari duplikasi dan tumpang tindihnya bantuan yang diberikan.

Tujuan koordinasi adalah untuk menyelaraskan strategi dan cara memenuhi kebutuhan, termasuk memberikan pelayanan, dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan kualitas. Koordinasi hendaknya terjadi di berbagai tingkat, termasuk tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan masyarakat, dan mencakup berbagai kalangan pemangku kepentingan yang utama mulai dari pembuat kebijakan, pemerintah setempat, pekerja lapangan, dan anggota dari masyarakat yang terkena imbas.

Biasanya, mekanisme koordinasi juga dipecah-pecah dan dirinci menjadi berbagai sektor dengan tujuan untuk mengatasi kebutuhan khusus seperti perlindungan, pengungsian, dan kesehatan. Dalam situasi semacam itu, koordinasi di antara berbagai sektor juga penting.

PENTINGNYA KOORDINASI

Tanpa koordinasi yang efektif, respons kemanusiaan berisiko menjadi tidak sistematis, tidak proporsional dan tidak efisien. Koordinasi sangat penting karena:

1. *Memberikan kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama.*
Dengan mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan bersama dengan aktor lain yang relevan, pemahaman situasi yang lebih baik dan bagaimana kebutuhan dapat ditangani dapat dicapai. Masalah prioritas dan kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada informasi bersama dan keahlian yang dihimpun dan disatukan.
2. *Menghindarkan duplikasi upaya yang dilakukan.* Biasanya akan ada lebih dari satu organisasi yang menyediakan jenis pelayanan dan respons tertentu. Berbagai tentang apa yang tengah dilakukan, di mana, dan oleh siapa, artinya adalah bahwa usaha yang dilakukan didistribusikan berdasarkan cakupan geografis dan saling melengkapi antara satu organisasi dengan yang lain sehingga dapat menjangkau penduduk dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Ini menghindari terjadinya keadaan di mana sejumlah organisasi memberikan pelayanan yang sama beberapa kali kepada sekelompok penerima bantuan tertentu, sementara di daerah lainnya hanya menerima sedikit pelayanan atau tidak menerima sama sekali.

3. *Menjamin bahwa kesenjangan program dan geografis diidentifikasi dan dijabatani.*

Secara umum, seiring dengan berjalannya keadaan darurat, kebutuhan penerima bantuan berubah juga. Koordinasi memberikan satu peluang untuk merubah arah dan strategi program dan untuk memastikan bahwa program bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang terkena bencana. Sementara suatu organisasi kadang-kadang menentukan perubahan program semacam itu secara terpisah dari program lainnya dalam suatu sektor, berbagi strategi dapat memaksimalkan respons secara keseluruhan. Hal ini dapat memaksimalkan dampak yang dicapai.

4. *Mempertahankan standar minimum.*

Tanpa standar minimum, ada risiko bahwa pekerjaan akan berkualitas buruk, kadang-kadang mengakibatkan pengaruh yang tidak baik pada mereka yang dimaksudkan untuk menerima manfaat dari usaha itu. Sulit untuk dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tanggap darurat menerapkan standar minimum dalam program mereka secara konsisten. Melalui koordinasi, mereka yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dapat bersama-sama menyepakati seperangkat standar minimum dalam melakukan pekerjaan mereka bagi penduduk yang terkena imbas. Penggunaan standar minimum yang disepakati dapat disebarluaskan agar diterapkan secara lebih luas kepada individu atau organisasi lainnya yang ditemui di lapangan.

5. *Meningkatkan upaya-upaya advokasi.*

Berbagi informasi memperkuat dasar pengetahuan dan memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat program dan melakukan advokasi secara

lebih pasti. Koordinasi menjadi alat bagi stakeholders untuk menetapkan pokok permasalahan utama yang perlu dipromosikan baik di sektor perlindungan anak, maupun dalam respons kemanusiaan yang lebih luas. Advokasi juga dapat menjadi alat untuk mencegah dan merespons pelanggaran perlindungan anak dalam masyarakat.

CARA MELAKUKAN KOORDINASI YANG BAIK

1. Melakukan penilaian/ asesmen situasi dan kebutuhan;
2. Menyepakati prioritas bersama;
3. Mengisi kekosongan dan kesenjangan dari bantuan dan respons, mencegah duplikasi
4. Mengarahkan respons ke yang paling rentan dan paling membutuhkan
5. Membangun strategi Bersama, seperti Pendekatan yang digunakan dan Standar Minimum Program/ Kegiatan
6. Mengerahkan Bersama sumber daya dan sumber dana
7. Memantau perkembangan dan
8. Memastikan pertanggungjawaban kepada anak, orang tua, masyarakat terdampak/ sasaran respons

CHECLIST AKSI KUNCI KOORDINASI

Kesiapsiagaan

1. Mengenali klaster dan narahubung koordinasi perlindungan anak secara nasional dan daerah
2. Mengumpulkan data terbaru mengenai perlindungan anak
3. Mengembangkan rencana kesiapsiagaan meliputi pelatihan perlindungan anak bagi semua staf dan relawan; pengembangan berbagai instrumen perlindungan anak; dsb
4. Mengembangkan sistem monitoring
5. Memastikan instrumen kaji cepat perlindungan anak sudah diadaptasi ke konteks lokal



6. Mengembangkan daftar siapa melakukan apa dan dimana
7. Mengembangkan atau memperkuat kebijakan perlindungan anak oleh lembaga, sekaligus kerja sama antar-lembaga untuk keselamatan anak;
8. Mempersiapkan pesan-pesan perlindungan anak dalam situasi darurat (keterpisahan, kekerasan seksual, dukungan psikoseksual, cedera, dll) dan tetapkan strategi penyebaran pesan-pesan tersebut
9. Mengadvokasi pentingnya mengkoordinasikan anggaran untuk perlindungan anak;
10. Melobi koordinator klaster perlindungan anak untuk melaksanakan pelatihan antar-lembaga tentang perlindungan anak dan koordinasi;
11. Membuat milist atau Whatsapp group untuk komunikasi rutin;

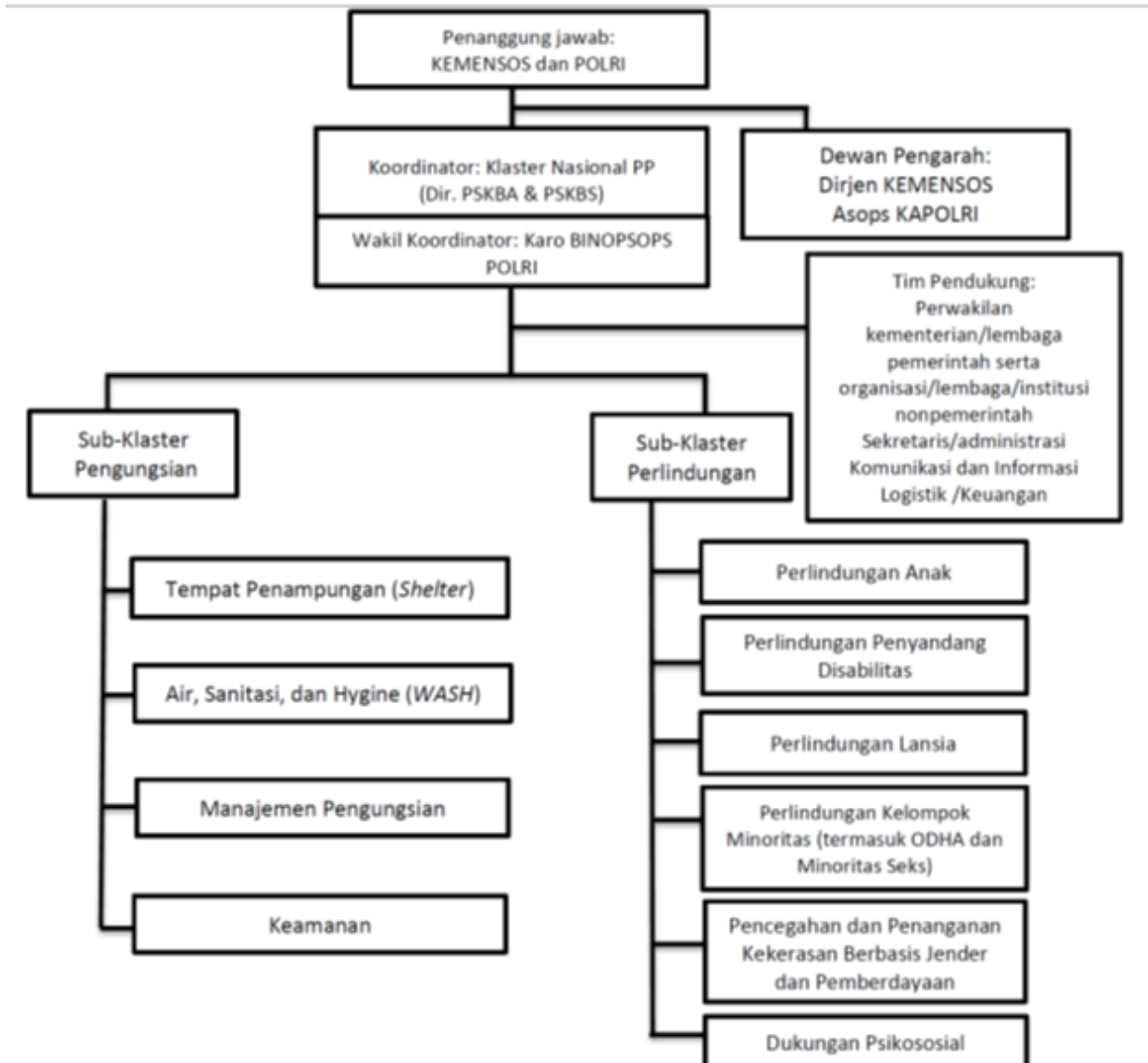
Respon

1. Bangun mekanisme koordinasi dengan memanfaatkan struktur koordinasi yang sudah ada, termasuk yang ada di dalam pemerintah dan masyarakat sipil;
2. Memastikan adanya seorang koordinator

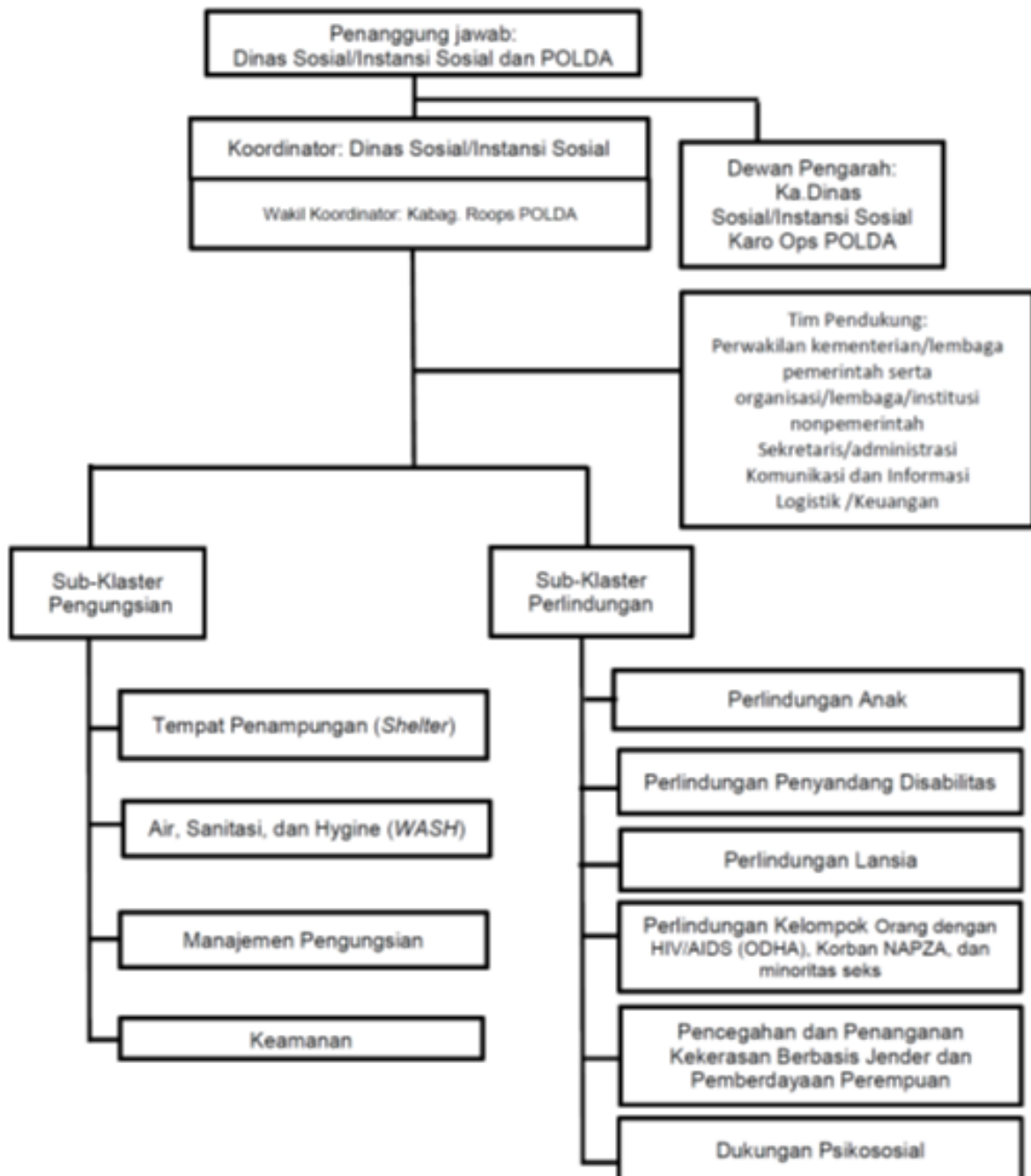
level nasional, koordinator daerah dan petugas manajemen informasi jika dibutuhkan;

3. Kaji kebutuhan untuk membangun mekanisme koordinasi lokal;
4. Libatkan masyarakat setempat dalam hal koordinasi (contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi berbasis masyarakat, dan pemimpin masyarakat termasuk pemerintah dan pihak berwenang lokal) jika perlu;
5. Klarifikasi pembagian tanggung jawab dan cara koordinasi dengan kelompok-kelompok lain (misalnya, wilayah tanggung jawab dapat terdiri dari perlindungan, kekerasan berbasis-gender, intervensi psikososial, pendidikan, pemulihan ekonomi, dll.);
6. Tetapkan perangkat bersama untuk komunikasi gabungan dan untuk mendukung koordinasi, seperti laman, format pelaporan dan seterusnya
7. Inisiasi kaji cepat perlindungan anak di situasi darurat antar-lembaga sesuai kebutuhan (dan lakukan analisa situasi dan konteks pada fase selanjutnya) dan ciptakan sistem bersama monitoring perlindungan anak yang berkesinambungan;

Bagan Koordinasi Nasional



Bagan Koordinasi Daerah



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada konteks situasi darurat, kebijakan perlindungan anak merupakan upaya untuk mengontrol segala sesuatu yang dapat dikontrol untuk membuat proses bantuan kemanusiaan aman bagi anak-anak. Bentuk kebijakan dapat berupa SOP organisasi, petunjuk teknis, MoU, surat edaran gubernur dan sebagainya untuk memastikan lembaga dan institusi tidak melakukan kekerasan kepada anak selama proses bantuan kemanusiaan.

BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Adanya pelatihan perlindungan anak bagi staf dan relawan antar lembaga kemanusiaan
2. Setiap staf dan relawan yang bekerja menandatangani kode etik berkegiatan bersama anak
3. Melakukan penunjukkan beberapa *focal point* yang bekerja memberikan pelatihan perlindungan anak, memastikan kode etik berkegiatan ditandatangani semua staf dan relawan, menyebarkan nomor aduan kekerasan kepada anak, sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat terdampak, menerima pengaduan dan membuat rujukan.

CONTOH KODE ETIK BERKEGIATAN BERSAMA ANAK

Semua karyawan, karyawan magang, relawan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Lembaga dilarang:

1. Memukul, menyerang atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak
2. Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa sesuai dengan hukum positif atau adat istiadat lokal. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak dapat dijadikan alasan pembelaan.
3. Membangun hubungan dengan anak-anak yang bisa dianggap mengeksploitasi atau melakukan perlakuan salah
4. Menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual
5. Mengajak anak atau anak-anak yang menjadi tanggung jawab profesionalnya menginap di rumah mereka tanpa ada pengawasan, kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari atasan mereka
6. Tidur di kamar yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab profesional mereka kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan ijin dari atasan mereka
7. Melakukan sesuatu yang bersifat pribadi untuk anak-anak yang dapat dilakukan anak-anak sendiri
8. Memakai bahasa yang memperlakukan, merendahkan, mencela atau menghina anak-anak, atau melakukan bentuk-bentuk kekerasan emosional.
9. Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil atau menganakemaskan anak-anak tertentu dibanding anak-anak lainnya.



10. Menempatkan diri di posisi yang rawan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Semua karyawan, karyawan magang, relawan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Lembaga wajib:

1. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan resiko serta mengendalikan situasi tersebut
2. Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi resiko
3. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan anak-anak
4. Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan
5. Berbicara dengan anak-anak mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan dengan staff atau pihak lain dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran
6. Memberdayakan anak-anak – diskusikan dengan mereka mengenai hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah
7. Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan professional
8. Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil terhadap mereka, jujur dan menghormati harga diri mereka

Saya sudah membaca dan memahami kode etik berkegiatan dengan anak, dan saya secara pribadi bertanggung jawab secara penuh untuk tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang tercantum di dalamnya dan bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran.

Nama dan Tandatangan

Tanggal



unicef 
untuk setiap anak

redrindonesia
improving humanitarian action